LAPORAN KLASTER 3:
Fidi Jaya



Oktober 2026

Disusun oleh Tim Delegasi Peneliti Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Dala Institute dan eLSiL Kie Raha

KONTRIBUTOR

Tim Penyusun

Aliyah A.D.C Bhuana
Ricky Nusah
Nur Rahmawati Lie
Rahmatia M. Daud
Marnita Dahlan
Musni Bakar

REVIEWER

Azka Azifa

VISUAL

Astari Parapat

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan oleh gabungan peneliti dari perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Dala Institute, dan eLSiL Kie Raha pada November 2025

Daftar Isi

Pendahuluan.....5

Latar Belakang 5
Pertanyaan Penelitian.....6
Metodologi.....8
Proses Pemilihan Desa Secara Partisipatif.....9
Data Primer.....12

Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur).....12
Diskusi Kelompok Terarah (FGD).....13

Tinjauan Data Sekunder.....13

Tahap 1: Analisis Dalam Kasus.....13
Tahap 2: Perbandingan Lintas Kasus.....13

Kerangka Analisis.....14

Gambaran Umum Klaster 3.....15

Kondisi Geografis Pertanyaan.....16
Demografis.....17
Struktur Ekonomi.....8
Struktur Kelembagaan dan Relasi Sosial.....9

Temuan Penelitian.....21

RQ1: Perubahan Sosial-Ekonomi Akibat Tambang.....22

1.1 Perkembangan Ekonomi dan Dinamika Sosial Desa.....22
1.2. Peningkatan Pendapatan Beriringan dengan Kenaikan harga barang.....23
1.3. Perubahan Kondisi Fisik–Ekologis Desa dan Kerinduan atas Lanskap yang Hilang.....25
1.4 Perubahan Relasi Sosial dan Dinamika Kehidupan Komunitas.....26
1.5 Beban Dampak Lingkungan.....28
1.6 Distribusi Manfaat dan Beban yang Berbeda Antar Pelaku Usaha.....29
1.7 Paparan Lingkungan dan Risiko Kesehatan yang Tidak Merata.....31
1.8 Sosialisasi yang Terbatas dan Mekanisme Pengaduan yang Belum Dipahami.....32
1.9. Dinamika Pemuda dalam Konteks Perubahan Sosial-Ekonomi.....34

RQ 2: Perubahan Akses Layanan Dasar

2.1 Fasilitas dan Layanan Kesehatan Gratis Menguat, Namun Kapasitas dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Perlu Diantisipasi.....36
2.2 Akses Pendidikan Semakin Terbuka dan Gratis, Namun Tantangan Kualitas dan Kesiapan SDM Masih Terlihat.....37
2.3 Infrastruktur Dasar Menguat, Namun Infrastruktur Lingkungan dan Tekanan Permukiman Masih Menjadi Tantangan.....38
2.4 Layanan Air Bersih Masih Menjadi Titik Kerentanan Layanan Dasar.....39
2.5 Bantuan Ekonomi Produktif: Program Tersedia, Namun Keberlanjutan dan Ketepatan Intervensi Masih Menjadi Tantangan.....41
2.6 Perencanaan dan Informasi Layanan Dasar Berjalan Formal, Namun Belum Menjangkau Seluruh Warga.....42

2.7 Mekanisme Kelompok dan Proposal sebagai Jalur Akses Program....44
2.8 Akses terhadap manfaat dan penyelesaian persoalan dipersepsikan dipengaruhi oleh kedekatan relasi sosial....45
2.9 Bantuan Sosial dan Perumahan: Program Tersedia, Namun Persepsi Ketepatan Sasaran dan Kemerataan Dipertanyakan....46

RQ 3: PPM/CSR....47
3.1 Ragam Manfaat PPM/CSR Diakui, Namun Persepsi dan Pemahamannya Beragam....47
3.2 Perubahan Mekanisme Penyaluran CSR melalui Pemerintah Daerah....48
3.3 Mekanisme Proposal dan Perantara Desa Dalam Pengajuan Program Bantuan Perusahaan....49
3.4 Persepsi Ketidakmerataan Berdasarkan Wilayah (Ring 1 vs Non-Ring 1)....49
3.5 Harapan Pelibatan Masyarakat yang Lebih Terbuka dalam Perencanaan dan Pengelolaan CSR/PPM....50
3.6 Aspirasi Penguatan Ekonomi Lokal dan Pengurangan Ketergantungan pada Tambang....51

RQ 4: Pemahaman dan Kesiapan Pascatambang
4.1 Kesadaran Risiko Pascatambang: Antara Memori Gebe dan Bayangan "Kota Mati"....52
4.2 Kekhawatiran Lingkungan dan Skeptisisme terhadap Pemulihan....53
4.3 Ketidakhadiran Forum dan Perencanaan Kelembagaan Pascatambang....54
4.4 Ketergantungan Ekonomi yang Tinggi terhadap Tambang dan Kerentanan Transisi....54
4.5 Aspirasi Penguatan Ekonomi Alternatif sebagai Kesiapan Sebelum Tambang Berakhir...56

Pembahasan....58
RQ 1....59
Implikasi Respon yang Diperlukan....60
RQ 2....64
Implikasi Respon yang Diperlukan....69
RQ 3....70
Implikasi Respon yang Diperlukan....73
RQ 4....74
Implikasi Respon yang Diperlukan....77

Penutup....79
Daftar Pustaka....87

Pendahuluan

Latar Belakang

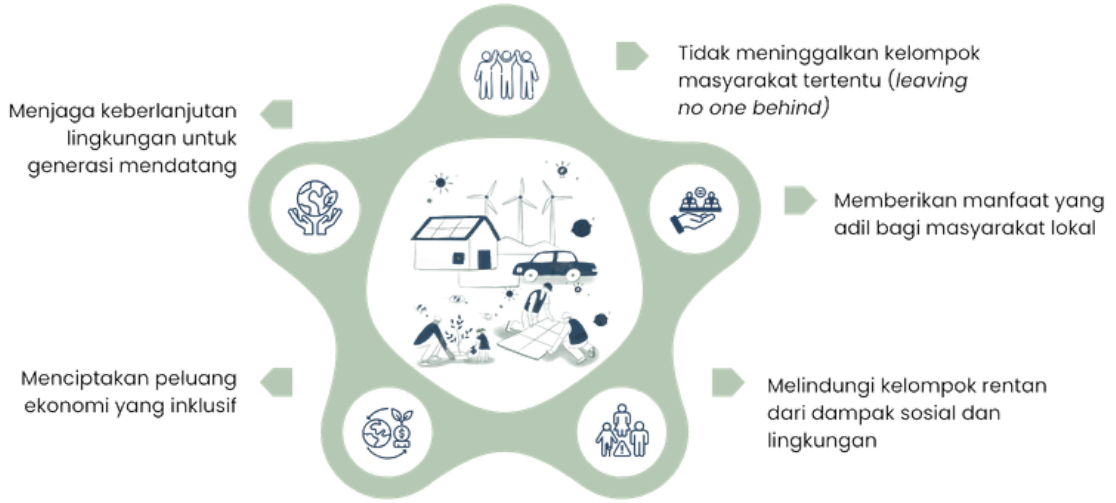
Ekspansi pertambangan nikel dan pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Tengah, merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang strategis dalam mendukung hilirisasi industri dan transisi energi global. Dengan cadangan nikel yang mencapai 5,3 miliar ton, wilayah ini memiliki posisi penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 telah mendorong percepatan hilirisasi nikel sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas industri nikel belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Tengah masih mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, dengan sekitar 30 persen penduduk mengalami ketidakcukupan pangan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara manfaat ekonomi makro dari industri nikel dengan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal

Dalam konteks tersebut, **pembangunan industri nikel tidak hanya dapat dipahami sebagai isu sektoral pertambangan, tetapi juga sebagai bagian dari tantangan tata kelola pembangunan daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan.** Pengalaman di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan kerap berkorelasi dengan degradasi lingkungan, persoalan sosial, dan kerentanan kelompok tertentu apabila tidak diiringi dengan kebijakan publik yang responsif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, pengelolaan dampak industri nikel di Halmahera Tengah menuntut pendekatan kebijakan yang melampaui rutinitas program sektoral dan mendorong pembaruan (inovasi) dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah.

Konsep transisi energi berkeadilan (just energy transition) menjadi kerangka penting dalam menjawab tantangan tersebut. Transisi ini tidak hanya menekankan peralihan sumber energi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan industri pendukung transisi energi:



Dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, tantangan-tantangan tersebut membuka ruang bagi lahirnya **inovasi kebijakan, program, kegiatan, maupun pendekatan pelaksanaan** yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Inovasi daerah dalam hal ini dipahami sebagai pembaruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak menimbulkan pembebanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta berpotensi direplikasi oleh perangkat daerah atau wilayah lain.

pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah menyediakan basis bukti empiris yang kuat untuk mendorong inovasi kebijakan tersebut. Melalui pelibatan aktif aparatur pemerintah daerah dan konsultasi dengan masyarakat—termasuk perempuan dan kelompok yang kurang terwakili—PAR menghasilkan temuan lapangan yang kaya mengenai dampak industri nikel terhadap kehidupan masyarakat serta kebutuhan pembangunan di wilayah terdampak tambang. Berdasarkan temuan tersebut, PAR difokuskan pada pengembangan gagasan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya pada:

Inisiatif Penelitian Aksi Partisipatif (*Participatory Action Research*/PAR) yang telah dilaksanakan bersama



- Perbaikan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
- Peningkatan efektivitas implementasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
- Perbaikan kualitas dan akses layanan dasar
- Perumusan strategi transisi ekonomi pascatambang yang berperspektif gender dan inklusi sosial.

Pertanyaan Penelitian

Tabel 1. Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
1.	 Apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, dan bagaimana perubahan ini terjadi dari sebelum tambang beroperasi hingga saat ini?	 **Keadilan Distributif:** • Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang dan industri pengolahan? Perubahan apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah adanya tambang dan industri pengolahan? Apa manfaat dan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi? • Bagaimana kebijakan atau rencana daerah untuk meminimalisir dan memitigasi perluasan dampak tambang?
		 **Keadilan Prosedural:** • Bagaimana pemahaman dan kekhawatiran masyararat terhadap perluasan tambang yang terjadi? • Apakah masyarakat merasa dilibatkan atau dipersiapkan untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi? Bagaimana mekanisme yang dilakukan? • Apakah tersedia mekanisme pengawasan independen (oleh masyarakat sipil/akademisi/media)?
		 **Keadilan Rekognisi:** • Bagaimana dampak manfaat dan masalah dirasakan oleh kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat)? • Bagaimana tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas atau kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan ketika terjadi perubahan sosial-ekonomi?

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
2.	Bagaimana kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terdampak tambang, serta bagaimana proyeksi kebutuhannya untuk mengatasi kesenjangan tersebut?	**Keadilan Distributif:** • Bagaimana kondisi layanan dasar sebelum 2018 dan saat ini? Bagaimana distribusi dan kesenjangan akses layanan dasar? • - Siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan dalam penyediaan dan akses layanan dasar di daerah tambang? • - Apa saja hambatan utama (regulasi, jarak, kapasitas SDM, biaya, lonjakan penduduk) dalam mengakses layanan dasar?
		 **Keadilan Prosedural:** • Apakah ada pembagian peran dalam proses perencanaan antara pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar di sekitar wilayah tambang? • - Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam diskusi, perencanaan, atau evaluasi terkait pemenuhan layanan dasar di daerah tambang? Apa mekanisme yang tersedia?
		Keadilan Rekognisi: • Bagaimana dan sejauh mana kebutuhan dan hak kelompok rentan (perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat adat) diakui dan dipenuhi dalam pemenuhan layanan dasar?
		Keadilan Restoratif: • Bagaimana upaya pemulihan standar/kualitas hidup atas dampak yang dirasakan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar? • Apa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait layanan dasar? Bagaimana proyeksi kebutuhan dan kesenjangan ke depan? Apa upaya dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan akses layanan dasar dimana depan?
3	Sejauh mana efektivitas program PPM dalam memperkuat layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana mekanisme evaluasinya selama ini?	**Keadilan Distributif:** • Bagaimana program PPM/CSR memberikan manfaat saat ini dan mengurangi dampak yang ada untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta persiapan pascatambang? Bagaimana proses evaluasi terhadap program-programnya?
		Keadilan Prosedural: • Bagaimana proses pengembangan program PPM & CSR selama ini dalam pelibatan masyarakat? Siapa saja yang terlibat? Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi PPM?
		Keadilan Restoratif: • Apa upaya yang dilakukan dalam program PPM untuk memulihkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan?
		Keadilan Rekognisi: • Bagaimana upaya penguatan peran kelompok perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, lansia, dll) lainnya dalam program pemberdayaan masyarakat dan layanan dasar?
4	Apa tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah terhadap fase pasca tambang, termasuk aspirasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pasca tambang yang adil?	**Keadilan Prosedural:** • Sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah memahami bahwa pertambangan adalah penggunaan lahan sementara dan memiliki fase pasca tambang? • Apa pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah terkait risiko dan peluang setelah tambang berakhir? Bagaimana peran dalam perencanaan pascatambang? • Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pascatambang? Apa mekanisme yang tersedia? • Bagaimana pemerintah daerah mengatur pembagian peran dengan pemerintah pusat/perusahaan agar distribusi manfaat pasca tambang tidak timpang?

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
		Keadilan Distributif: • Apa peraturan, kebijakan, dan program saat ini yang mendorong transisi pascatambang yang berkeadilan dan berkelanjutan? Bagaimana kebijakan memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata?
		Keadilan Restoratif: • Apa kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk masa depan wilayah mereka setelah tambang berakhir? Bagaimana kesiapan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada fase pascatambang? • Sektor ekonomi apa yang dipandang potensial sebagai pengganti tambang? Apakah ada upaya diversifikasi ekonomi lokal untuk kesiapan pasca tambang? • Apakah tersedia program penjaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok terdampak? • Apakah ada rencana rehabilitasi lingkungan dan pemanfaatan kembali infrastruktur tambang? Bagaimana kebijakan dan regulasi untuk perlindungan dan pemulihan dampak lingkungan khususnya di zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil?
		Keadilan Rekognisi: • Bagaimana penguatan peran kelompok rentan (perempuan, pemuda, lansia, disabilitas, masyarakat adat) dalam perencanaan dan kebijakan pasca tambang untuk manfaat jangka panjang?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus jamak kualitatif untuk menyelidiki dampak sosial ekonomi penambangan dan pengolahan nikel di tiga desa terpilih. Dengan berfokus pada eksplorasi mendalam metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aktivitas penambangan bersinggungan dengan akses masyarakat terhadap layanan dasar, efektivitas program.

Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), kesiapan lokal untuk masa depan pasca-tambang, dan implikasi kebijakan di tingkat regional. Studi kasus kami anggap cocok untuk penyelidikan ini karena memprioritaskan detail kontekstual, perspektif pemangku kepentingan, dan dinamika dunia nyata yang kompleks yang membentuk hasil sosial ekonomi di area yang terdampak penambangan.



Box 1. Metodologi Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian empiris yang meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan lingkungannya tidak didefinisikan dengan jelas (Yin, 2018). Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data—seperti wawancara, observasi, dan dokumen—untuk memberikan gambaran holistik dan terperinci tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, setiap desa menjadi kasus yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis komparatif tentang bagaimana penambangan nikel memengaruhi kondisi sosial ekonomi di berbagai lingkungan.

Studi ini mengadopsi desain studi kasus jamak, yang meneliti tiga desa yang sangat terdampak oleh penambangan nikel. Pendekatan kasus jamak memungkinkan:

- Perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi tema yang berulang atau pengalaman yang berbeda.
- Kedalaman kontekstual dalam menganalisis bagaimana faktor lokal (misalnya, tata kelola, geografi, praktik perusahaan pertambangan) membentuk hasil.

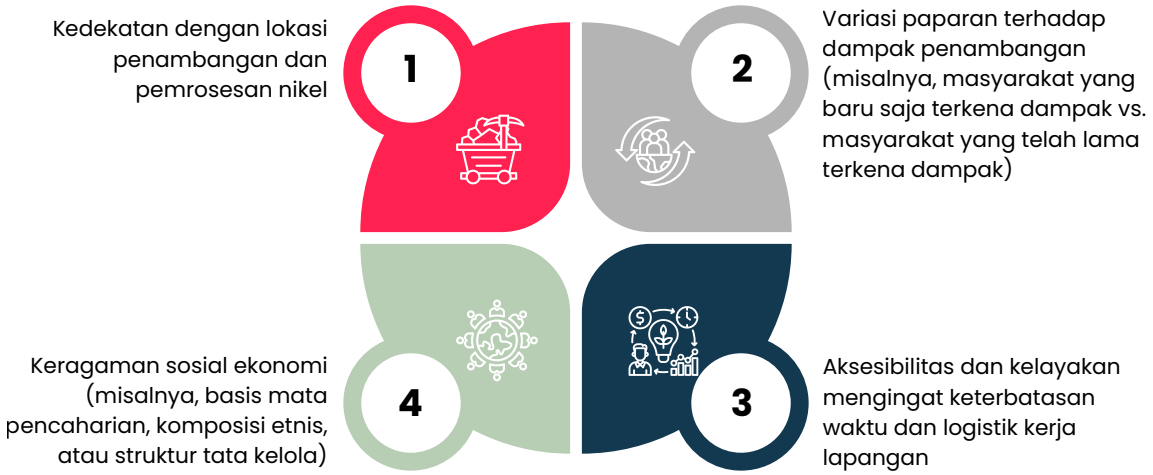
Analisis lintas kasus mengungkap:

- Bagaimana kedekatan geografis dengan pertambangan dan pengolahan nikel membentuk hasil sosial-ekonomi.
- Apakah program PPM dan CSR berkorelasi dengan peningkatan akses layanan atau dianggap sebagai sesuatu yang bersifat simbolis.
- Pandangan yang berbeda tentang masa depan pasca-pertambangan (misalnya, reintegrasi ke dalam ekonomi agraris vs. permintaan untuk pekerjaan industri).

Proses Pemilihan Desa Secara Partisipatif

Pemilihan tiga studi kasus desa dilakukan melalui proses partisipatif bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penelitian tetap berlandaskan konteks, peka terhadap politik, dan relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

Proses pemilihan melibatkan konsultasi awal dengan perwakilan pemerintah tingkat kabupate dengan mengidentifikasi desa kandidat berdasarkan kriteria seperti:



Tiga desa dipilih mewakili keberagaman aspek sosial dan ekonomi di Halmahera Tengah. Dengan adanya keberagaman ini, studi kasus dapat mengetahui dampak di konteks-konteks yang berbeda, sebagai contoh desa dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani dengan desa dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pedagang, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih meluas dan kaya. Hasil pun dapat lebih digeneralisasi untuk lingkup Halmahera Tengah. Alhasil, studi yang dihasilkan lebih meyakinkan bagi audiens tertentu, karena mencakup berbagai konteks yang berbeda.

Berdasarkan kriteria di atas, Tabel 3 menjelaskan kondisi umum desa terdampak tambang di Halmahera Tengah. Desa yang dijelaskan mengikuti cakupan penerima manfaat PPM berdasarkan Kepmen ESDM No. 1824/2018, dimana:

1. **Ring 1.** Wilayah terdampak langsung oleh operasi pertambangan dan menjadi lokasi fasilitas utama perusahaan. Masyarakat di sini memiliki intensitas hubungan tinggi dengan perusahaan. Cakupan umumnya satu atau beberapa desa yang mengalami dampak sosial dan lingkungan berdasarkan studi baseline dan AMDAL.
2. **Ring 2.** Wilayah terdampak langsung namun dengan intensitas hubungan sedang. Meliputi satu atau beberapa kecamatan yang masih berada dalam kabupaten yang sama dengan Ring 1, dan terdampak sosial-lingkungan sesuai hasil baseline dan AMDAL.
3. **Ring 3.** Wilayah dengan dampak tidak langsung dan frekuensi hubungan rendah. Meliputi satu atau beberapa kabupaten dalam provinsi yang sama (atau lingkup nasional), di mana terdapat kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak langsung oleh operasional perusahaan

Untuk menjaga independensi penelitian, keputusan pemilihan akhir menyeimbangkan masukan lokal dengan tujuan analitis studi dan kerangka kerja yang berorientasi pada keadilan. Pertimbangan juga diberikan pada potensi asimetri kekuasaan, untuk menghindari pemberian hak istimewa hanya kepada masyarakat yang lebih terlihat, terhubung, atau patuh pada narasi negara atau perusahaan.

Penjabaran kondisi desa pada bagian ini merupakan gambaran awal dan ditentukan secara kolaboratif dengan interlokutor Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini penting mengingat analisis menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2018 yang kemungkinan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini.

Analisis klaster bertujuan menangkap keberagaman desa berdasarkan empat indeks komposit di bawah ini:

Tabel 2. Indeks komposit dan variabel penyusun

Indeks Komposit	Variabel Penyusun
Indeks Komposit	Variabel Penyusun
Dampak pertambangan	Ring (lokasi relatif desa/kelurahan terhadap kawasan pertambangan)
Sosial-ekonomi (sosek)	Keberadaan produk unggulan/utama desa, Disabilitas, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Industri mikro dan kecil, Sarpras ekonomi, Kejadian tindak kejahatan.
Layanan dasar (ladas)	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik (%), Fasilitas buang air besar, Saluran pembuangan limbah cair, Sumber air minum, Sumber air mandi/cuci, Fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan, Kejadian luar biasa.

Beberapa desa seperti **Gemaf, Lelief Waibulan, dan Lelief Sawai** tidak muncul dengan skor dampak tinggi, padahal secara faktual memiliki keterpaparan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjaga representativitas analisis, diputuskan hanya menggunakan **variabel ring** sebagai dasar perhitungan indeks dampak.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa indeks komposit lainnya juga berpotensi menghadapi keterbatasan serupa. Oleh sebab itu, **diskusi verifikasi** dengan interlokutor digunakan untuk memastikan validitas data dan interpretasi.

Dengan mempertimbangkan keberagaman dan akses menuju desa (hanya desa yang dapat diakses yang dipilih), **kelompok desa dapat dibagi menjadi tiga klaster:**

Tabel 3. Klaster berdasarkan keberagaman dan pilihan desa

Klaster	Karakteristik Desa	Pilihan Desa
1	Dampak tinggi, sosek tinggi, ladas rendah, akses sedang	GEMAF, LELILEF WAIBULAN, LELILEF SAWAI
2	Dampak rendah, sosek rendah, ladas sedang, akses sedang	WERE, NURWEDA, FIDI JAYA, SIDANGA, WEDANA, GOENG, SAGEA, KIYA
3	Dampak sedang, sosek tinggi, ladas tinggi, akses tinggi	KOBE, SAWAI ITEPO, WOEJERANA, WOEKOP, KULO JAYA

Desa yang tidak dimasukkan dalam daftar pemilihan di klaster karena pertimbangan aksesibilitas ke lokasi (semuanya berada di klaster 2): NUSLIKO, FRITU, WALEH, dan UPT WALEH SP3

Adapun diskusi dengan interlokutor Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memberikan saran perubahan atas susunan desa berdasarkan definisi klaster. Perubahan ini menempatkan Desa Fidi Jaya di Klaster 3 lalu Sawai Itepo dan Kobe di Klaster 2.

Tabel 4. Klaster berdasarkan keberagaman dan pilihan desa yang disepakati bersama

Klaster	Karakteristik Desa	Pilihan Desa
1	Dampak tinggi, sosek tinggi, ladas rendah, akses sedang	GEMAF, LELILEF WAIBULAN, LELILEF SAWAI
2	Dampak rendah, sosek rendah, ladas sedang, akses sedang	WERE, NURWEDA, SIDANGA, WEDANA, GOENG, SAGEA, KIYA, KOBE, SAWAI ITEPO
3	Dampak sedang, sosek tinggi, ladas tinggi, akses tinggi	FIDI JAYA, WOEJERANA, WOEKOP, KULO JAYA

Atas dasar perubahan tersebut, pemilihan desa dilanjutkan dengan voting pemilihan lokasi dan rasionalisasi melalui diskusi bersama dengan interlokutor. Hasil voting akhir menentukan lokasi kegiatan penelitian sebagai berikut:

Klaster 1: Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai
Klaster 2: Kobe dan Sawai Itepo
Klaster 3: Fidi Jaya

Data Primer

Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

Pengumpulan data dilakukan selama periode 10 hari di tiga desa terpilih pada November 2025.

Kerja lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga pengumpul data terlatih, termasuk peneliti utama, bersama dengan 36 interlokutor dalam hal ini perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara

Pendekatan berbasis tim ini memungkinkan pengumpulan data secara simultan atau berurutan di beberapa lokasi, sehingga memungkinkan cakupan yang memadai dalam jangka waktu yang terbatas.

Mengingat kendala logistik dari kunjungan lapangan yang singkat, berbagai upaya dilakukan untuk memprioritaskan kedalaman daripada keluasan dengan menargetkan informan utama dan memfasilitasi diskusi yang mendalam seputar lima dimensi keadilan dari kerangka kerja transisi yang adil.

Wawancara menjadi metode inti untuk mengumpulkan wawasan terperinci dari para pemangku kepentingan utama. Kami melakukan wawancara dengan 41 responden, untuk memastikan representasi gender, usia, status disabilitas, latar belakang mata pencarian, dan pelaku kelembagaan

Tabel di bawah menunjukkan komposisi responden di Klaster 3:

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan mata pencaharian, gender, dan usia

Latar Belakang Mata Pencaharian/Kelembagaan			
Kategori Responden	Jumlah Responden		
	L	P	
Aparatur Pemerintah	6	1	7
Aparat Keamanan	1	0	1
Tenaga Pendidik	0	2	2
Petugas Kesehatan	1	2	3
Apoteker	0	1	1
Pekerja Tambang	1	0	1
Petani	4	1	5
Nelayan	3	2	5
Wirausaha	8	3	11
Penyedia Jasa Informal	4	0	4
Tokoh/Anggota Keagamaan	1	3	4
Belum/Tidak Bekerja	0	1	1
Total	**29**	**16**	**45**

Usia Responden	
Kelompok Usia	Jumlah
Pemuda (<35)	10
Dewasa (36-60)	23
Lansia (>60)	8
N/A	4
Total	**45**

Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Untuk melengkapi wawancara, kami melakukan 2 FGD, yang disusun untuk mendorong dialog terbuka tentang berbagai masalah, aspirasi, dan kebutuhan kolektif. FGD yang berhasil kami selenggarakan mencakup :

FGD khusus perempuan (8 orang)
Dampak sosial-ekonomi pertambangan terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk kenaikan biaya hidup, perubahan akses sumber pangan, pergeseran norma sosial, serta tingkat pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan CSR/PPM.



FGD Pemuda (15 Orang)
Persepsi generasi muda terhadap peluang kerja tambang, risiko ketergantungan ekonomi, kesiapan pascatambang, serta kebutuhan penguatan keterampilan, ruang partisipasi, dan tata kelola desa yang lebih inklusif.

Tinjauan Data Sekunder

Untuk mengontekstualisasikan temuan, kami akan menganalisis lebih lanjut menggunakan tinjauan data sekunder seperti data statistik dari BPS, OPD, dan instansi terkait.

Analisis Data

Analisis data akan mengikuti pendekatan dua fase, yang menggabungkan strategi analisis dalam kasus dan lintas kasus untuk menghasilkan kedalaman kontekstual dan generalisasi tematik. Analisis akan dipandu oleh kerangka transisi yang adil, dengan fokus pada empat dimensi keadilan utama: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan restoratif, keadilan rekognisi.

Tahap 1: Analisis Dalam Kasus

Masing-masing dari tiga kasus desa akan dianalisis secara independen terlebih dahulu untuk memahami dinamika sosial-ekonomi yang unik dan bagaimana dinamika tersebut dibentuk oleh keberadaan aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel. Transkrip wawancara semi-terstruktur dan catatan diskusi kelompok fokus (FGD) akan ditranskripsi dan dikodekan menggunakan kombinasi analisis tematik deduktif dan induktif. Secara deduktif, kerangka pengkodean akan mengacu pada empat dimensi keadilan dari kerangka transisi yang adil. Secara induktif, tema-tema yang muncul yang mencerminkan pengalaman, perhatian, dan realitas sosial-politik setempat juga akan dikodekan untuk menangkap nuansa khusus konteks.

Tahap ini bertujuan untuk membangun narasi terperinci untuk setiap desa, dengan mengkaji:

- Distribusi manfaat dan kerugian terkait pertambangan (keadilan distributif);
- Tingkat dan kualitas partisipasi dalam pengambilan keputusan (keadilan prosedural);
- Perspektif terkait pengakuan terhadap hak, identitas budaya, nilai sosial dan kepentingan komunitas lokal (keadilan rekognisi)
- Perspektif lokal tentang ganti rugi dan perbaikan kerusakan sosial-lingkungan (keadilan restoratif);

Tahap 2: Perbandingan Lintas Kasus

Tahap kedua akan melibatkan analisis perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan di ketiga kasus desa. Dengan menggunakan pendekatan berbasis matriks, temuan dari setiap kasus akan dibandingkan secara sistematis di sepanjang lima dimensi keadilan. Perbandingan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel kontekstual—seperti lokasi geografis, sejarah masyarakat, atau struktur sosial—mempengaruhi berbagai pengalaman.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Untuk melengkapi wawancara, kami melakukan 2 FGD, yang disusun untuk mendorong dialog terbuka tentang berbagai masalah, aspirasi, dan kebutuhan kolektif. FGD yang berhasil kami selenggarakan mencakup :

FGD khusus perempuan (8 orang)
Dampak sosial-ekonomi pertambangan terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk kenaikan biaya hidup, perubahan akses sumber pangan, pergeseran norma sosial, serta tingkat pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan CSR/PPM.



FGD Pemuda (15 Orang)

Persepsi generasi muda terhadap peluang kerja tambang, risiko ketergantungan ekonomi, kesiapan pascatambang, serta kebutuhan penguatan keterampilan, ruang partisipasi, dan tata kelola desa yang lebih inklusif.

Tinjauan Data Sekunder

Untuk mengontekstualisasikan temuan, kami akan menganalisis lebih lanjut menggunakan tinjauan data sekunder seperti data statistik dari BPS, OPD, dan instansi terkait.

Analisis Data

Analisis data akan mengikuti pendekatan dua fase, yang menggabungkan strategi analisis dalam kasus dan lintas kasus untuk menghasilkan kedalaman kontekstual dan generalisasi tematik. Analisis akan dipandu oleh kerangka transisi yang adil, dengan fokus pada empat dimensi keadilan utama: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan restoratif, keadilan rekognisi.

Tahap 1: Analisis Dalam Kasus

Masing-masing dari tiga kasus desa akan dianalisis secara independen terlebih dahulu untuk memahami dinamika sosial-ekonomi yang unik dan bagaimana dinamika tersebut dibentuk oleh keberadaan aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel. Transkrip wawancara semi-terstruktur dan catatan diskusi kelompok fokus (FGD) akan ditranskripsi dan dikodekan menggunakan kombinasi analisis tematik deduktif dan induktif. Secara deduktif, kerangka pengkodean akan mengacu pada empat dimensi keadilan dari kerangka transisi yang adil. Secara induktif, tema-tema yang muncul yang mencerminkan pengalaman, perhatian, dan realitas sosial-politik setempat juga akan dikodekan untuk menangkap nuansa khusus konteks.

Tahap ini bertujuan untuk membangun narasi terperinci untuk setiap desa, dengan mengkaji:

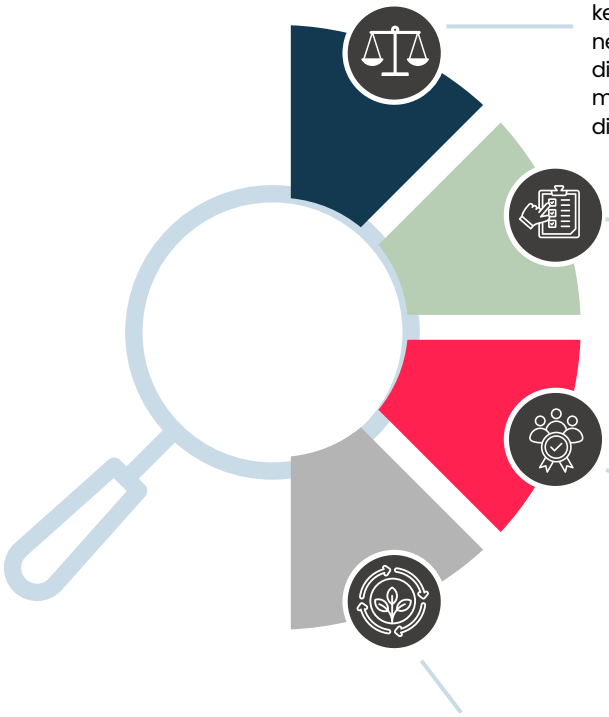
- Distribusi manfaat dan kerugian terkait pertambangan (keadilan distributif);
- Tingkat dan kualitas partisipasi dalam pengambilan keputusan (keadilan prosedural);
- Perspektif terkait pengakuan terhadap hak, identitas budaya, nilai sosial dan kepentingan komunitas lokal (keadilan rekognisi)
- Perspektif lokal tentang ganti rugi dan perbaikan kerusakan sosial-lingkungan (keadilan restoratif);

Tahap 2: Perbandingan Lintas Kasus

Tahap kedua akan melibatkan analisis perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan di ketiga kasus desa. Dengan menggunakan pendekatan berbasis matriks, temuan dari setiap kasus akan dibandingkan secara sistematis di sepanjang lima dimensi keadilan. Perbandingan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel kontekstual—seperti lokasi geografis, sejarah masyarakat, atau struktur sosial—mempengaruhi berbagai pengalaman.

Kerangka Analisis

Kerangka keadilan yang digunakan di dalam studi ini mengadopsi empat dimensi keadilan berikut:



Keadilan Distributif

Mengkaji sejauh mana manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari industri nikel dibagikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, serta bagaimana beban dan dampak negatif didistribusikan. Hal ini juga mencakup pertimbangan distribusi manfaat saat ini maupun pascatambang, seperti akses masyarakat terhadap lahan bekas tambang yang telah dipulihkan atau hasil dari program-program rehabilitasi.

Keadilan Prosedural

Menilai sejauh mana masyarakat lokal dan kelompok rentan terlibat secara bermakna dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam diskusi-diskusi terbuka mengenai pengelolaan tambang saat ini termasuk juga scenario pascatambang yang mencakup masa depan ekonomi lokal, rehalibitasi lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Keadilan Pengakuan

Mengakui bahwa prinsip keadilan harus berlaku secara luas tanpa diskriminasi, termasuk pengakuan terhadap hak, identitas budaya, nilai sosial, dan kepentingan komunitas lokal, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan perempuan dalam konteks pengelolaan tambang dan industri nikel serta persiapan pascatambang.

Keadilan Restoratif

Menilai pentingnya upaya untuk memulihkan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Selain itu, aspek pasca tambang juga menjadi sangat relevan dengan dimensi ini karena mencakup rehabilitasi lahan bekas tambang, pemulihan atau diversifikasi mata pencaharian masyarakat, program kompensasi dan pemulihan sosial, serta inisiatif pemulihan ekosistem dan layanan dasar yang terdampak akibat kegiatan pertambangan.



Gambaran Umum Klaster 3

Klaster 3 mencakup satu desa yakni Desa Fidi Jaya yang secara geografis berada paling jauh dengan sentral kawasan tambang dan industri pengolahan nikel dibandingkan Klaster 1 dan Klaster 2. Fidi Jaya berada pada teritori Ring 2 lingkar tambang menurut definisi pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1824/2018.

Kondisi Geografis

Desa Fidi Jaya terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dan berkembang sebagai **kawasan permukiman serta pusat ekonomi penunjang ibu kota.** Secara topografi, lanskap Fidi Jaya memiliki karakteristik yang khas, terdiri dari wilayah pesisir di bagian selatan, kawasan permukiman utama yang terhubung oleh dua jalan utama, serta area rawa yang berada di antara wilayah pesisir dan kawasan yang mengarah ke perbukitan. Mengingat lokasinya sebagai penunjang ibu kota, akses menuju Fidi Jaya relatif mudah. Posisi ini menjadikan Fidi Jaya lebih terintegrasi dengan aktivitas administratif dan ekonomi kabupaten dibandingkan desa-desa yang lebih dekat ke kawasan industri berat seperti di Klaster 1 dan Klaster 2.

Secara landskap, Fidi Jaya **mengalami perubahan dari tahun ke tahun**. Pada masa sebelum berkembangnya aktivitas pertambangan, area rawa tersebut relatif tidak padat dan berfungsi sebagai pemisah alami antara dua kawasan permukiman. Namun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan juga pertambangan, area rawa tersebut secara bertahap ditutup dan dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru.

Berdasarkan pengamatan dan penuturan warga, **perubahan signifikan terjadi utamanya pada lima tahun terakhir.** Hampir seluruh jalan utama sudah beraspal dan cukup lebar untuk dilalui dua mobil berpapasan. Banyak bangunan baru bermunculan, termasuk pusat perbelanjaan lokal, Pasar Fidi Jaya, kios buah, ruko, taman, lapangan, masjid besar, serta kehadiran jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Di samping itu, Fidi Jaya juga memiliki pelabuhan yang aktif digunakan untuk lalu lintas barang, termasuk distribusi makanan dan minuman serta mobilitas logistik lainnya.

Meskipun **demikian, sebagian wilayah yang dulunya berupa rawa kini ditutup untuk pembangunan permukiman dan fasilitas umum.** Akibatnya, beberapa area, terutama di sekitar masjid dan perpustakaan, sering mengalami genangan saat hujan karena air terperangkap di antara bangunan. Kualitas air sumur juga berbeda antar zona: pada wilayah yang dibangun di atas rawa, air cenderung berwarna kuning bahkan ketika menggunakan PDAM. Sementara di wilayah yang secara alami bukan rawa, kualitas air relatif lebih baik.

Gambar 1. Pelabuhan Weda yang berlokasi di Fidi Jaya sebagai salah satu tol laut



Demografis

Desa Fidi Jaya merupakan desa dengan **jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Weda.** Berdasarkan Kecamatan Weda Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Fidi Jaya pada tahun 2024 mencapai 17.052 jiwa, terdiri dari 12.897 Laki-laki dan 4.155 perempuan (BPS, 2025). Rasio jenis kelamin tercatat sebesar 310,40 Jumlah penduduk ini menonjak secara signifikan dibandingkan 2017 dimana penduduk Fidi Jaya sebanyak 3.715 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 112. Disamping **lonjakan penduduk, peningkatan ini menunjukkan dominasi penduduk laki-laki secara sangat signifikan** saat ini.

Dari sisi kepadatan, pada 2017 Fidi Jaya memiliki kepadatan sekitar 137,2 jiwa/km² (BPS, 2018). Pada 2024, kepadatan meningkat menjadi 708,63 jiwa/km² (BPS, 2025). Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan terhadap ruang permukiman, meskipun tidak dalam skala ledakan demografis seperti yang terjadi di desa penyangga industri. Secara spasial, peningkatan kepadatan ini tercermin dari bertambahnya bangunan baru, ruko, kos-kosan, serta fasilitas publik dalam lima tahun terakhir sebagaimana teramati di lapangan.

Lonjakan populasi ini sejalan dengan keterangan desa yang menyebutkan bahwa **arus masuk pendatang sangat tinggi dan sulit terkontrol.** Banyak penduduk yang datang dari Papua, Maluku (khususnya Ambon), serta Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dan tidak seluruhnya melapor secara administratif ke desa. Sekretaris Desa bahkan menyebutkan estimasi tidak resmi jumlah penduduk bisa mencapai 6.000–7.000 tambahan di luar data tercatat.

Jika dibandingkan jumlah penduduk di Klaster 1, jumlah ini terbilang lebih banyak. Menurut penuturan desa ini disebabkan banyak **pekerja tambang yang mendaftarkan kependudukannya di Fidi Jaya meski dalam praktiknya sebagian dari mereka tidak selalu bermukim di wilayah desa.** Hal ini disebabkan kemudahan akses administratif mengingat lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Menurut keterangan perangkat desa, banyak penduduk yang terdaftar di Fidi Jaya tinggal dan bermukim di dekat wilayah tambang dan industri seperti Lelilef Sawai atau Lelilef Waibulan.

Gambar 2. Jalan Masuk ke Kota Weda di area Fidi Jaya





Gambar 3. Pasar buah seberang Pasar Fidi Jaya yang sebagian besar pedagang berasal dari Gorontalo

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Desa Fidi Jaya menunjukkan **dominasi geliat ekonomi sejak dahulu dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Weda.** Pada 2017, jumlah penduduk Fidi Jaya tercatat sebanyak 1.258 jiwa (BPS, 2018), yang mencerminkan karakter desa administratif dengan skala ekonomi relatif kecil. Namun pada 2021, jumlah penduduk meningkat menjadi 8.406 jiwa (BPS, 2022)—naik sekitar 6,6 kali lipat dalam empat tahun. Pada 2024, jumlah tersebut kembali melonjak menjadi 17.052 jiwa atau 46,54% dari total penduduk Kecamatan Weda (BPS, 2025). Lonjakan ini menjadi indikator utama perubahan struktur ekonomi desa dari ekonomi lokal berskala kecil menuju pusat perdagangan dan jasa berskala semi-perkotaan.

Pada 2021, Fidi Jaya telah memiliki 99 toko/warung kelontong—jumlah tertinggi di kecamatan, setara dengan Wedana dan jauh melampaui desa lain (BPS, 2022). Selain itu, terdapat 1 hotel dan 8 penginapan, yang menunjukkan berkembangnya ekonomi hunian dan jasa akomodasi. Observasi lapangan menguatkan gambaran tersebut. Jalan-jalan utama dipenuhi ruko, kios, pasar, pusat perbelanjaan lokal, terminal, serta jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Terdapat **pasar rakyat Weda dan pasar Fidi Jaya yang menjadi simpul aktivitas ekonomi**, meskipun intensitas keramaiannya tidak selalu stabil dan sebagian besar pembelinya merupakan pegawai negeri atau pekerja formal.

Aktivitas ekonomi utama mencakup perdagangan, jasa penginapan, distribusi LPG, serta usaha kecil dan menengah yang melayani kebutuhan penduduk dan mobilitas pelabuhan.

Keberadaan **pelabuhan menjadi faktor kunci dalam struktur ekonomi desa**. Hilir-mudik distribusi barang, terutama makanan dan minuman, memperkuat fungsi Fidi Jaya sebagai simpul logistik regional. Berbeda dengan desa yang sangat bergantung pada kos-kosan pekerja tambang, Fidi Jaya menunjukkan diversifikasi ekonomi yang lebih luas karena ditopang oleh fungsi administratif dan perdagangan umum, meskipun tetap terdorong oleh pertumbuhan ekonomi kawasan industri secara tidak langsung.

Disamping itu, **observasi menunjukkan adanya diferensiasi usaha berdasarkan asal-usul dan modal.** Pedagang buah banyak berasal dari Gorontalo, pedagang makanan dari Jawa dan Sulawesi, sementara toko besar umumnya dimiliki oleh etnis Tionghoa yang telah lama menetap. Warga asli cenderung mengelola usaha dalam skala kecil atau menjual hasil kebun tahunan. Dalam beberapa kasus, warga yang memiliki lahan tetapi tidak mampu bersaing memilih menjual lahannya. Pola ini menunjukkan stratifikasi ekonomi berbasis jaringan dan akses modal. Meskipun demikian, tidak ditemukan pengemis atau gelandangan secara kasat mata.

Struktur Kelembagaan dan Relasi Sosial

Perubahan sosial di Fidi Jaya berjalan beriringan dengan perubahan spasial. Sebelum geliat ekonomi meningkat, penduduk asli umumnya bermukim di wilayah pesisir bagian selatan serta sebagian di wilayah yang mengarah ke perbukitan di utara. Area rawa di antara kedua wilayah tersebut belum berkembang secara intensif. Namun seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan arus migrasi, **kawasan rawa mengalami alih fungsi menjadi permukiman** baru yang banyak dihuni pendatang. Sementara itu, penduduk asli cenderung tetap bertahan di wilayah permukiman awal.

Pola ini menunjukkan bahwa **transformasi sosial tidak hanya berbentuk demografis, tetapi juga membentuk pembagian ruang** berdasarkan sejarah permukiman dan momentum kedatangan. Sebagian besar pendatang yang menghuni kawasan rawa berasal dari Kobe dan Lelief — wilayah yang lebih dekat dengan pusat operasi tambang — dan mayoritas merupakan pemeluk Nasrani. Observasi lapangan mencatat adanya pembagian sosial berbasis agama yang tercermin dalam struktur dusun: Dusun 1 dan 2 di bagian pesisir dekat laut dihuni mayoritas Muslim dengan beberapa masjid berdiri, sementara Dusun 3 di dekat perbukitan mayoritas Nasrani.

Terdapat rencana pemekaran Dusun 3 menjadi desa terpisah bernama "Ake Ici", sebuah perkembangan yang mengindikasikan bahwa diferensiasi berbasis agama dan sejarah kedatangan sudah cukup dalam untuk mendorong aspirasi pemisahan administratif.

Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan lapangan dan penuturan warga, **pembagian berbasis agama ini tidak serta-merta menghasilkan ketegangan yang terbuka.** Kehidupan sehari-hari di ruang ekonomi — pasar, pelabuhan, ruko, dan jasa — berlangsung lintas kelompok tanpa segregasi yang ketat. Warga dari berbagai latar belakang agama dan etnis berinteraksi dalam transaksi ekonomi dan aktivitas publik. Nilai fagogoru, baku sayang, baku hormat, baku hargai, masih disebut sebagai ideal bersama yang diakui secara luas, meskipun dalam praktik sehari-hari semakin sulit dijalankan seiring heterogenitas yang meningkat.

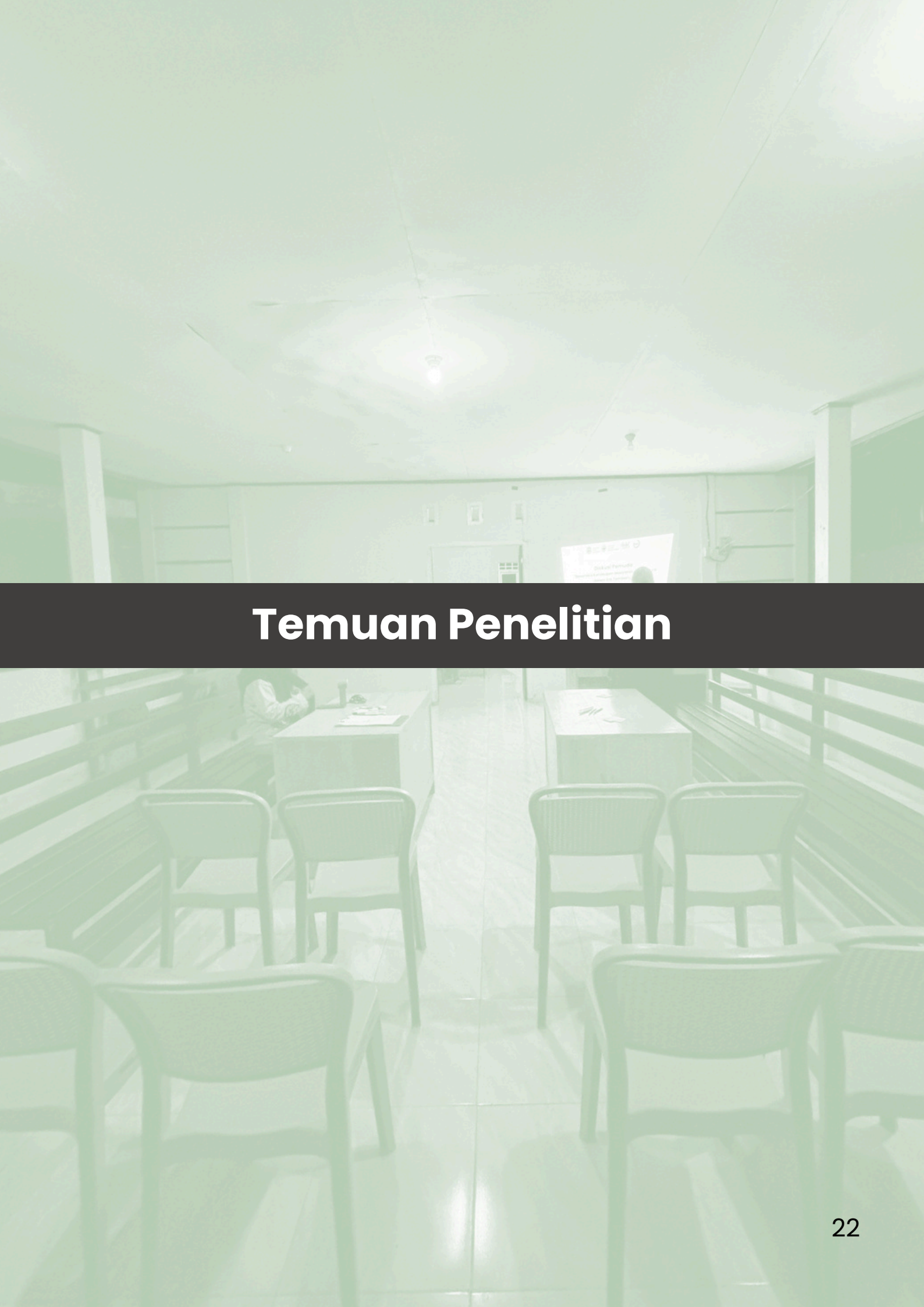
Gambar 4. Kantor Desa Persiapan Ake Ici yang berada di Dusun 3



Struktur dan relasi sosial Fidi Jaya dibentuk oleh tiga elemen utama: **posisi geografis sebagai desa pelabuhan dan pusat administratif, arus migrasi yang tinggi, serta diferensiasi ekonomi berbasis agama, etnis, dan modal.** Desa ini berkembang sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok sosial dengan kepentingan ekonomi yang beragam, sehingga relasi sosial yang terbentuk lebih banyak berada di sekitar kelompok agama, paguyuban etnis, maupun kelompok pelaku bisnis, daripada di sekitar identitas kewilayahan sebagai warga Fidi Jaya secara kolektif. Kondisi ini menjadi faktor yang memperlemah kapasitas komunitas untuk merespons dampak industri secara bersama, dan relevan untuk memahami mengapa informasi program, akses bantuan, dan partisipasi dalam musyawarah lebih mengikuti jalur jaringan sosial daripada jalur formal yang seharusnya terbuka untuk semua.

Tabel 6. Infrastruktur Layanan Dasar
Berdasarkan publikasi BPS Kecamatan Dalam Angka 2017, 2021, dan 2024

Sektor	Indikator	2017 (BPS, 2018)	2021 (BPS, 2022)	2024 (BPS, 2025)
Akomodasi	Hotel	1	1	1 (kecamatan)
	Penginapan	7	8	6
Pendidikan	TK	0	9 (kecamatan)	10 (kecamatan)
	SD	1	8 (kecamatan)	8 (kecamatan)
	SMP	0	3 (kecamatan)	3 (kecamatan)
	SMA/K	1	3 (kecamatan)	3 (kecamatan)
Kesehatan	Rumah Sakit	NA	1 (kecamatan)	1 (kecamatan)
	Puskesmas Rawat Inap	NA	0 (kecamatan)	1 (kecamatan)
	Puskesmas Non-Rawat Inap	NA	1 (kecamatan)	2 (kecamatan)
	Apotek	NA	2 (kecamatan)	2 (kecamatan)
	Poliklinik/Balai Pengobatan	NA	0 (kecamatan)	0 (kecamatan)
	Posyandu	2	NA	NA
	Praktik Dokter	4	NA	NA
Keagamaan	Masjid	1	1	NA
	Surau/Langgar	2	3	NA
	Gereja Protestan	0	5	NA
	Gereja Katolik	0	0	NA



Temuan Penelitian

RQ1: Perubahan Sosial-Ekonomi Akibat Tambang

1.1 Perkembangan Ekonomi dan Dinamika Sosial Desa

Perubahan kondisi desa di Fidi Jaya secara umum diakui oleh hampir seluruh responden sebagai sesuatu yang nyata dan terlihat. Baik pemilik kos-kosan, petani pedagang, tokoh agama, aparat keamanan, aparat desa, nelayan, hingga tenaga kesehatan memulai cerita mereka dengan pengakuan bahwa kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dibandingkan sebelum industri berkembang secara masif pada 2018 (05-02FJ3; 05-24FJ3; 05-24FJ3; 05-20FJ3; 05-22FJ3).

Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa masyarakat pada awalnya menerima kehadiran tambang karena kondisi ekonomi daerah yang saat itu relatif tertinggal (05-24FJ3). Seorang pemuda yang sejak lahir tinggal dan bekerja di Weda juga menyampaikan:

"mata pencaharian dahulu agak sulit, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki ketermpilan tertentu" (05-23FJ3, Pekerja Jasa, Laki-laki).

Dengan masuknya tambang dan industri pengolahan secara masif pada 2018, peningkatan aktivitas ekonomi di desa digambarkan dengan kondisi desa yang lebih ramai, banyaknya peluang pekerjaan, dan perputaran uang yang lebih cepat karena masuknya pendatang (05-22FJ3). Desa yang sebelumnya relatif tenang berubah menjadi lebih ramai dan padat aktivitas.

Namun, pendatang selain mencari pekerjaan dari pekerjaan turunan dari aktivitas tambang, mereka banyak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Hal ini disampaikan langsung oleh seorang tenaga kesehatan:

"Selain itu ada banyak pendatang yang melakukan pekerjaan negatif (PSK) yang akhirnya banyak menularkan penyakit HIV/AIDS." (05-43FJ3, Tenaga Kesehatan, 30 Tahun).

Meskipun demikian, dalam berbagai wawancara dan diskusi kelompok, **warga menceritakan manfaat ekonomi bersamaan dengan perubahan dinamika sosial.** Tambang dipahami sebagai kondisi yang membawa peluang sekaligus konsekuensi dalam kehidupan warga. Seperti disampaikan oleh seorang pegawai pemerintah yang lahir dan bekerja di Weda dimana sebelum adanya tambang masyarakat hidup "biasa-biasa saja" dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial belum "terlalu". Setelah 2018, pendatang semakin banyak yang mendorong berbagai aktivitas ekonomi di sisi lain membawa dampak pada kehidupan sehari-hari (05-22FJ3).

"Jelas sih pergeseran sosial itu kayak gimana ya kehidupan kita yang slow living banget dulu sekarang kayak semua serba sibuk. Belum lagi yang dulu kayak tenang sekarang lebih ramai." (05-44FJ3, Petugas Kesehatan, Laki-laki, 30 tahun).

Seiring meningkatnya mobilitas dan migrasi, beberapa responden juga menyoroti munculnya persoalan sosial yang sebelumnya jarang terdengar. Seorang guru menyampaikan bahwa situasi keamanan tidak lagi terasa setenang dulu dan menyebut adanya peningkatan kriminalitas (05-39FJ3).

Pemilik usaha kecil juga menyinggung:
"Semakin banyak kriminalitas dan adanya lokalisasi." (05-42FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 30 tahun)

Seorang pemuda menceritakan lebih lanjut
"Itu bahaya sampai babinsa fidi jaya minta pos kamling karena konflik antar suku, pencurian, dan anak Perempuan tidak nyaman. konflik sosial mendekati Jakarta sana. Jambret ada sekarang Kalau ada acara pesta itu ada konflik. Pemicunya mabuk. Pelakor ada jalan-jalan berkelok-kelok sudut-sudut. Bahaya ada perselingkuhan, pembunuhan." (05-23FJ3, Penyedia Jasa, Laki-laki)

Pandangan **aparat keamanan mengkonfirmasi narasi warga mengenai meningkatnya dinamika sosial pasca ekspansi tambang.** Ia membandingkan kondisi sebelum dan sesudah tambang dengan cukup tegas, menyebut bahwa sebelumnya situasi relatif aman, sementara setelah aktivitas industri dan migrasi meningkat, gangguan ketertiban menjadi lebih sering terjadi. Periode 2022–2024 bahkan ia gambarkan sebagai fase yang cukup rawan, dengan laporan keributan malam hari, perkelahian akibat konsumsi alkohol di kos-kosan pekerja, serta protes warga terkait kebisingan yang meningkat terutama pada masa gajian (05-17FJ3).

Selain itu, ia juga menyinggung munculnya kafe dan aktivitas malam yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko sosial, termasuk gesekan antar kelompok dan isu berbasis identitas di wilayah sekitar. Namun pada saat yang sama, aparat tersebut mengakui bahwa **upaya pengamanan dilakukan melalui patroli dan koordinasi lintas aparat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan dan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi.** Perspektif ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kompleksitas pengelolaan keamanan dan kohesi sosial di tingkat desa

1.2. Peningkatan Pendapatan Beriringan dengan Kenaikan harga barang

Peningkatan aktivitas ekonomi di Fidi Jaya **diakui membawa perubahan pada perputaran uang dan daya beli masyarakat**. Seorang pedagang menyampaikan bahwa sejak industri berkembang secara masif, barang dagangan lebih cepat terjual dan aktivitas jual beli menjadi lebih hidup dibandingkan sebelumnya (05-330FJ3). Pedagang buah yang sebelumnya berjualan di pasar dalam kemudian dipindahkan ke pinggir jalan juga menceritakan:
"Lebih laris sekarang karena kelihatan saja orang bisa beli buah. Kalau sebelumnya orang pengen beli buah saja baru masuk ke dalam." (05-10FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 34 Tahun)

Pengakuan mengenai meningkatnya daya beli juga datang dari kepala sekolah yang menyampaikan bahwa "lebih banyak pembeli dari pada dulu karena banyak pendatang" (05-13FJ3). Pada fase awal industri, seorang pemilik usaha mengingat bahwa cukup "menaruh jualan di depan rumah saja sudah ramai" (05-02FJ3). Bagi sebagian responden, terutama pedagang, kondisi ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan mempercepat perputaran barang.

Namun, **peningkatan perputaran ekonomi tersebut secara konsisten disertai dengan keluhan mengenai kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari.** Seorang aparatur pemerintah menyampaikan bahwa perubahan harga dapat terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan hari (05-12FJ3). Ia membandingkan kondisi saat ini dengan tujuh tahun sebelumnya, dimana harga dianggap lebih stabil dan jarang dikeluhkan. Kenaikan harga utamanya dirasakan pada komoditas pangan pokok. Beberapa responden membandingkan harga sebelum dan sesudah ekspansi industri.

Seorang aparat pemerintah menyampaikan:

"Dulu sebelum tambang ikan 10 ribu masih dapat, sayur 2000 dapat. Sekarang... harga melonjak. Sekarang jujur saja Weda mahal. Di sini satu tampah ikan 50 ribu, di Ternate bisa 20 ribu." (05-22FJ3, Pegawai Pemerintah, Laki-laki, 40 tahun)

Seorang kepala sekolah juga menyampaikan bahwa harga beras telah mencapai 17–18 ribu per kilogram (05-13FJ3). Bahkan dalam cerita yang lebih panjang, seorang pemilik usaha mengingat bahwa pada 2012 dengan Rp2.500 masih dapat satu ikat ikan, sementara saat ini Rp50.000 hanya memperoleh dua ekor (05-02FJ3).

Beberapa responden mencoba menjelaskan penyebab kenaikan harga ini. Menurut salah satu pegawai pemerintah, kenaikan upah buruh dan momentum gajian pekerja tambang mempengaruhi pola harga di pasar.

"Katanya karena Perusahaan. Upah buruh tinggi jadi pasaran juga menyesuaikan... tanggal 5 gajian jadi ikut naik juga." (05-12FJ3, Pegawai Pemerintah, Laki-laki, 34 tahun)

Alhasil, **rumah tangga sebagai konsumen paling terdampak dari kenaikan harga barang-barang ini**. Meskipun pendapatan meningkat, namun kenaikan harga barang-barang ini menyebabkan peningkatan biaya hidup. Seorang tenaga penyuluh KB mengeluhkan gaji yang lebih besar disebut tidak selalu berbanding lurus dengan kes ejahteraan karena biaya transportasi, harga barang, serta risiko kesehatan ikut meningkat (05-21FJ3). Kenaikan harga barang-barang ini juga banyak diutarakan utamanya oleh perempuan (05-21FJ3; 05-43FJ3; FGD Perempuan; FGD Pemuda). Seorang petugas kesehatan menceritakan:

"Dulu tidak begini ekonominya tapi barang tidak begitu mahalnya, jadi lebih Sejahtera. Tidak terlalu berdampak. Masyarakat sepertinya lebih Sejahtera karena sdah kurang orang jadi harga tidak terlalu tinggi. Dulu sayur 2000 sekarang serba 5000. Dulu 3 5000. 5 tahun lalu harga barang masih stabil. Uang sudah "tidak ada nilai"" (05-21FJ3, Tenaga Penyuluh KB, Perempuan, 52 tahun)

Beberapa responden menyampaikan aspirasi untuk penertiban harga barang yang lebih regular (05-12FJ3; 05-29FJ3).

Gambar 5. Kondisi di dalam pasar dengan bawang, rica, dan tomat (barito) sebagai komoditas yang paling banyak diperjualbelikan



1.3. Perubahan Kondisi Fisik–Ekologis Desa dan Kerinduan atas Lanskap yang Hilang

Perubahan yang dirasakan warga Fidi Jaya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyentuh kondisi fisik dan ekologis desa. Beberapa responden memulai cerita mereka dengan menggambarkan lanskap sebelum industri berkembang. Pada masa itu, kehidupan bertumpu pada berkebun, memancing, dan memanfaatkan sumber daya sekitar. Rawa dan pohon sagu masih banyak ditemui, dan relasi dengan alam terasa dekat.

"Sebelum tambang masih ada sagu, orang berkebun, orang pergi mancing, ada relasi dengan alam, dengan sesama juga." (05-15FJ3, Pelayan Gereja, Laki-laki, 29 tahun)

Dalam ingatan warga, **ruang hidup tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa nyaman dan kebersamaan.** Seorang petani lanjut usia yang telah tinggal sedari kecil dan tinggal di dekat pasar menceritakan perubahan ini dengan nada emosional:
"*Perkembangan sekarang lebih bagus, tapi "dulu lebih khidmat". Dulu masih ada pohon-pohon, rezekinya lancar bagus, meskipun tidak ada uang. Duduk-duduk tapi ingin makan bisa memancing... Kalau ingat "menangis" dulu banyak pohon, duduk dingin. Kalau dulu sekolah satu kelas itu seperti saudara. Sekarang beda jauh."* (05-18FJ3, Petani, Laki-laki)

Seiring meningkatnya aktivitas industri dan pertumbuhan penduduk, **perubahan fungsi lahan menjadi salah satu hal yang paling terasa.** Lahan kebun berkurang, sebagian dijual atau berubah menjadi permukiman dan bangunan permanen. Sebelumnya, sagu dan kelapa disebut banyak ditemukan dan menjadi bagian dari lanskap keseharian. Namun setelah tambang hadir dan aktivitas ekonomi meningkat, perubahan fungsi lahan mulai dirasakan. Lahan dijual, pohon sagu dan kelapa berkurang, dan pola penghidupan berubah mengikuti dinamika baru dan ketergantungan dari luar.

"Ada tambang ekonomi bekerja dan orang kenal Halteng, tapi karena tambang lahan dijual, sagu susah ditemui, orang mancing juga dapat ikan di dalamnya ada limbah." (05-15FJ3, Pelayan Gereja, Laki-laki, 29 tahun)

"Dulu penghasil kelapa, sekarang berkurang karena jadi pemukiman, habis dia... dulu tara beli, sekarang harus ambil dari luar." (05-03FJ3, Petani, Laki-laki, 66 tahun)

Responden lain menambahkan bahwa tanah pertanian semakin terbatas, dan generasi tua kesulitan kembali berkebun karena lahan tidak lagi tersedia (05-12FJ3; 05-42FJ3). Perubahan ini memperlihatkan pergeseran dari ekonomi berbasis produksi alam menuju ekonomi berbasis uang dan pasar.

Gambar 6. Lokasi di sekitar Masjid Agung yang sebelumnya merupakan rawa-rawa



Transformasi fisik desa juga tampak dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan observasi lapangan, jalan utama telah beraspal lebar dan banyak bangunan permanen seperti pasar, ruko, taman, masjid, dan fasilitas publik lainnya. Jumlah penduduk meningkat signifikan. Salah satu aparat desa menyebut lonjakan dari sekitar 5.000 menjadi 6.000–7.000 jiwa dalam waktu relatif singkat (05-14FJ3).

Perubahan tata ruang turut berdampak pada sistem air dan lingkungan sekitar. Beberapa responden menyampaikan bahwa banjir kini lebih sering terjadi dibanding sebelumnya (05-18FJ3,05-19FJ3, 05-03FJ3, 05-31FJ3). Seorang staf pemerintah menceritakan responden bahwa jalur alami sungai yang dahulu menjadi aliran keluar air kini sudah tidak ada, sehingga air mudah terjebak ketika hujan deras (05-12FJ3). Kondisi topografi yang miring ke daratan, ditambah pembangunan yang menutup sebagian area rawa, memperbesar potensi genangan. Seorang petani tahunan menyampaikan aspirasinya terkait hal ini:

"Wilayah kilo 3 rawan banjir, setiap hujan selalu banjir, semoga bisa dibenahi – normalisasi, kasian Masyarakat yang terendam dan gagal panen, hal ini pernah diusulkan ke Sekda dan Dinas PU Halmhera Tengah tapi sampai saat ini belum terealisasi." (05-03FJ3, Petani, Laki-laki, 66 tahun).

Di sektor perikanan, perubahan ekologis dirasakan melalui menurunnya hasil tangkapan dan bertambahnya jarak melaut. Nelayan menggambarkan bahwa kini untuk mendapatkan hasil yang cukup harus pergi lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Sebagian responden juga mengaitkan perubahan kualitas laut dengan limbah dan meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir (05-28FJ3,05-42FJ3), meskipun persepsi tentang tingkat dampaknya bervariasi.

1.4 Perubahan Relasi Sosial dan Dinamika Kehidupan Komunitas

Perubahan di Fidi Jaya tidak hanya tampak pada lanskap fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pola relasi sosial. Sejumlah responden menggambarkan bahwa sejak wilayah berkembang pesat dan jumlah penduduk meningkat, praktik berkumpul, kerja bakti, dan interaksi informal antarwarga mengalami penurunan.

"Kehidupan sosial? Animo untuk berkumpul? Perubahan jauh sekali… Sosialnya sudah tidak ada." (05-17FJ3, Aparat Keamanan, Laki-laki, 43 tahun)

Dalam berbagai wawancara, **perubahan ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kesibukan individu serta orientasi ekonomi yang semakin dominan.** Warga yang sebelumnya lebih mudah berkumpul untuk kegiatan lingkungan, kini dinilai lebih fokus pada pekerjaan dan usaha masing-masing.

"Kalau bicara gotong royong semua sudah berkurang karena masing-masing sudah disibukkan." (05-23FJ3, Penyedia Jasa, Laki-laki)

Seorang petani juga menyebut bahwa **gotong royong kini tersisa terutama untuk kepentingan masjid**, sementara untuk kebersihan kampung partisipasi cenderung rendah (05-03FJ3). Dalam diskusi kelompok, muncul refleksi bahwa metode musyawarah desa yang mengandalkan pertemuan tatap muka semakin sulit menjangkau masyarakat karena "orang susah dikumpulkan" dan lebih individualistis sejak adanya tambang.

"Orang tua di sini kaget juga dengan perubahan ini. Sebelum tamabng masuk kemudian masuk banyak perantau masuk ke sini dari seluruh Indonesia. Dulu banyak kegiatan masjid, dulu kuat. Banyak perubahan, termasuk Masyarakat." (05-20FJ3, BPD dan Pemilik Penginapan, Laki-laki, 63 tahun)

Perubahan relasi sosial ini juga dipengaruhi oleh masuknya pendatang dalam jumlah besar. Beberapa responden menggambarkan bahwa orang tua "kaget" dengan perubahan ritme kehidupan desa setelah banyak perantau datang dari berbagai daerah.

Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan komposisi sosial yang lebih beragam, tetapi juga memperbesar jarak sosial. Sebagian responden menyebut munculnya konflik kecil antarindividu, kecemburuan sosial, hingga meningkatnya kasus kriminalitas.

"Kriminalitas... sebelumnya tidak terjadi juga. Hadirnya perusahaan kriminalitas 'sudah menjadi wajar'." (05-12FJ3, Pegawai Pemerintah, Laki-laki, 34 tahun)

Isu perselingkuhan, konflik rumah tangga, dan pergaulan bebas juga beberapa kali disebut dalam wawancara, terutama dikaitkan dengan keberadaan kos-kosan dan pekerja luar daerah (05-21FJ3; 05-23FJ3). Meskipun tidak semua responden melihatnya sebagai krisis sosial, narasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai lama dan dinamika baru yang dibawa urbanisasi cepat.

Di sisi lain, **terdapat pula narasi tentang tetap bertahannya nilai lokal.** Konsep fagogoru—baku sayang, baku hormat, baku hargai—masih disebut sebagai fondasi relasi sosial di Weda (05-21FJ3). Beberapa responden menilai bahwa adat dan kebiasaan menerima pendatang tetap dijaga, meskipun dalam praktik sehari-hari muncul berbagai tantangan baru.

Cerita responden menunjukkan bahwa **perubahan sosial tidak hanya memunculkan persoalan keamanan baru, tetapi juga menuntut bentuk pengelolaan yang lebih kolaborat**if antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan instansi terkait agar respons yang diberikan lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal.





Gambar 7. Kondisi pesisir laut di Desa Fidi Jaya yang dalam proses reklamasii

1.5 Beban Dampak Lingkungan

Beberapa usaha berkembang dan daya beli meningkat, namun di saat yang sama **muncul keluhan mengenai pencemaran, debu, sampah, serta kondisi laut dan sungai**. Seorang wirausaha menyampaikan:

"Namun ada dampak terkait dengan pencemaran lingkungan, laut, dan limbah." (05-36FJ3, Pengusaha, Laki-laki, 50 tahun)

Seorang petani juga menegaskan:
"Tambang ke lingkungan 'itu berat itu' merusak, semua bergantung ke perusahaan." (05-03FJ3, Petani, Laki-laki, 66 tahun)

Jika dilihat dari keseluruhan wawancara, **keluhan terkait dampak lingkungan muncul di berbagai kelompok, terutama nelayan dan petani,** meskipun dengan intensitas yang berbeda. Hampir seluruh responden mengakui adanya perubahan pada laut, sungai, debu, atau kualitas lingkungan.

Keluhan serupa muncul dari nelayan yang menyebut hasil tangkapan menurun dan jarak melaut semakin jauh (05-06FJ3), serta dari responden lain yang mengaitkan perubahan kualitas sungai dan pesisir dengan aktivitas industri (05-12FJ3; 05-42FJ3). Warga juga menyebut persoalan debu dan polusi yang memengaruhi kenyamanan sehari-hari (05-31FJ3), serta peningkatan volume sampah seiring bertambahnya penduduk (05-12FJ3; 05-19FJ3).

Namun, **sebagian diantaranya memandang dampak tersebut sebagai konsekuensi yang menyertai peningkatan ekonomi.** Beberapa menyatakan bahwa ekonomi tetap membaik meskipun ada polusi (05-31FJ3; 05-28FJ3), atau menilai kondisi Fidi Jaya masih relatif lebih aman dibanding wilayah yang lebih dekat dengan tambang (05-45FJ3).

1.6 Distribusi Manfaat dan Beban yang Berbeda Antar Pelaku Usaha

Perubahan sosial-ekonomi akibat tambang di Fidi Jaya tidak terdistribusi secara merata, melainkan mengikuti pola sektor pekerjaan, kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi, serta ketergantungan pada sumber daya alam. Narasi responden menunjukkan bahwa manfaat dan risiko tidak hanya berbeda antar kelompok, tetapi juga berubah seiring perkembangan wilayah.

Perbedaan paling jelas terlihat antar kelompok pekerjaan. Pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi pendatang serta pekerja tambang memperoleh keuntungan paling cepat pada fase awal ekspansi industri. Pada periode 2018–2022, Fidi Jaya disebut sebagai pusat aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan hunian pekerja. Permintaan kamar kos meningkat, perputaran barang lebih cepat, dan aktivitas jual beli lebih ramai.

Di sektor produksi, **peningkatan yang cukup menonjol dirasakan oleh petani.** Baik petani komoditas tahunan seperti kelapa dan pala maupun petani musiman seperti rica dan sayuran menyebut bahwa pasar menjadi lebih pasti dan daya serap meningkat. Salah satu responden menyampaikan bahwa sebelumnya hasil panen sering bergantung pada pembeli terbatas atau harus dijual ke luar wilayah, sementara setelah tambang berkembang, produk lebih mudah terserap pasar lokal. Seorang petani menegaskan bahwa

"Setelah adanya tambang Semua merasakan manfaat." (05-26FJ3, Petani, Laki-laki, 52 tahun)

Seorang pedagang di pasar menceritakan lebih lanjut
"Makanya di sini meskipun pegawai agak cemburu sama pegawai karena Cuma jual tomat bisa beli mobil. Sekarang petani lebih untung ga ada ruginya, ruginya kalau gagal panen. Apalagi kelapa, dulu 5000 perbuah sekarang sekilo 20ribu. Apalagi kelapa di sini semua bagian bisa dijual" (05-16FJ3, Pedagang, Laki-laki)

Responden lain menyebut bahwa hasil pertanian kini lebih cepat terjual karena meningkatnya konsumsi dari penduduk dan pekerja tambang (05-26FJ3). Dalam beberapa kasus, harga komoditas bahkan mengalami kenaikan signifikan, seperti kelapa yang sebelumnya dihitung per buah kini memiliki nilai jual lebih tinggi dalam bentuk kiloan (05-16FJ3). Situasi ini menunjukkan bahwa baik petani tahunan maupun musiman memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan dan perluasan pasar.

Namun, **pola keuntungan ini tidak sepenuhnya stabil.** Beberapa responden juga mengingatkan bahwa komoditas musiman seperti rica sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Ketika produksi berlebih dan distribusi tidak terkelola dengan baik, harga dapat turun drastis dan merugikan petani (05-16FJ3; 05-23FJ3). Artinya, meskipun pasar lebih terbuka, ketergantungan pada satu atau dua komoditas juga menciptakan risiko baru

Pihak lain yang diuntungkan dari perubahan ini ialah pemilik kos-kosan, pemilik warung, pedagang, dan jasa. Pada awal pertumbuhan tambang (2018-2022), Fidi Jaya disebut sebagai pusat aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan pekerja dan hunian.



Permintaan hunian meningkat, perputaran barang lebih cepat, dan aktivitas jual beli lebih ramai. Namun seiring berkembangnya Lelief sebagai pusat kegiatan baru, sebagian aktivitas ekonomi bergeser.

"Naik turun. Sebelum Lelief ada ekonomi bagus… Penurunan ¼." (05-10F-J3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki)

"Kos-kosan dulu awal di Weda banyak yang pakai… sekarang sudah agak sepi." (05-02-FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 34 tahun)

Seorang pedagang buah juga menggambarkan dinamika serupa. Ia menyebut bahwa pada awalnya lapaknya ramai karena pembeli mudah terlihat dan daya beli meningkat. Namun, seiring bertambahnya pedagang dan pergeseran pembeli ke Lelief, persaingan semakin ketat dan penjualan tidak lagi stabil.

"Lebih laris sekarang karena kelihatan saja orang bisa beli buah… tapi sekarang sudah ke Lelief semua." (05-10FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 34 tahun)

Pedagang lain menyampaikan bahwa kondisi pasar di Fidi Jaya seringkali ramai hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti awal bulan atau menjelang pasar murah, sementara di hari biasa cenderung sepi (05-16FJ3). Bahkan ada keluhan bahwa pembangunan fasilitas pasar tidak sepenuhnya berfungsi optimal karena pembeli lebih memilih berbelanja di wilayah yang lebih dekat dengan lokasi kerja tambang (05-16FJ3).

Berbeda dengan sektor jasa, **kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya alam mengalami tekanan yang lebih nyata**. Nelayan menyampaikan bahwa jarak tangkap semakin jauh dan hasil berkurang. Beberapa nelayan menceritakan bahwa mereka harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan, dan kualitas ikan berubah dibandingkan sebelumnya.

"Kalau ikan cari banyak harus sampai ke Halsel, kalau deket sini bisa dikit. " (05-06FJ3, Nelayan, Perempuan, 54 tahun)

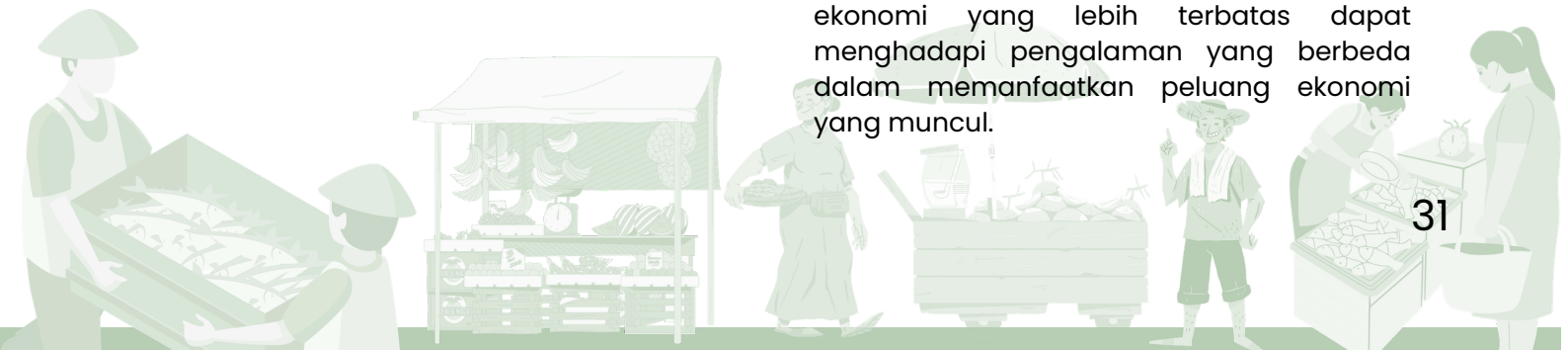
"Ikan dulu banyak. Kadang dari daratan, pesisir pulau. Sekarang makin jauh. Dulu 2-3 mil. Sekarang 30 mil." (05-01FJ3, Nelayan, Laki-laki, 40 tahun)

Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa kelompok yang bergantung langsung pada laut merasakan tekanan yang berbeda dibandingkan kelompok yang terhubung dengan ekonomi jasa dan perdagangan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kelompok yang terhubung langsung dengan rantai ekonomi tambang, seperti sektor jasa, perdagangan, dan sebagian petani, cenderung memperoleh manfaat lebih cepat dan lebih nyata. Sebaliknya, kelompok yang bergantung pada sumber daya alam, khususnya nelayan, menghadapi tekanan ekologis dan peningkatan risiko dalam mempertahankan penghidupan mereka.

Meskipun demikian, **tidak ada kelompok yang sepenuhnya bebas dari kerentanan.** Pelaku jasa dan petani tetap menghadapi fluktuasi pasar serta pergeseran pusat ekonomi, sementara kelompok berbasis alam menghadapi ketidakpastian ekologis dan biaya produksi yang meningkat. Dengan demikian, manfaat dan risiko terdistribusi secara berbeda, namun seluruh kelompok tetap berada dalam dinamika ketidakpastian yang berubah seiring perkembangan industri.

Di luar perbedaan antar sektor mata pencaharian, **variasi manfaat juga berpotensi dipengaruhi oleh posisi sosial dan karakteristik kelompok masyarakat**. Meskipun belum muncul secara dominan dalam wawancara, beberapa cerita menunjukkan bahwa perempuan, kelompok miskin, maupun kelompok dengan akses ekonomi yang lebih terbatas dapat menghadapi pengalaman yang berbeda dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.



1.7 Paparan Lingkungan dan Risiko Kesehatan yang Tidak Merata

Dampak lingkungan dan kesehatan di Fidi Jaya tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh warga, melainkan **berbeda tergantung lokasi tempat tinggal dan jenis pekerjaan yang dijalani.** Sejumlah responden menyampaikan bahwa wilayah mereka relatif jauh dari aktivitas utama tambang sehingga dampaknya tidak terlalu terasa.

"Weda ini lumayan jauh dari ring tambang jadi masih aman." (05-38FJ3, Tenaga Kesehatan, Laki-laki, 33 Tahun)

Beberapa responden juga membandingkan kondisi Fidi Jaya dengan wilayah yang lebih dekat dengan tambang seperti Lelief, yang dinilai lebih terdampak (05-45FJ3, 05-12FJ3).

Namun **pengalaman berbeda disampaikan oleh kelompok yang bekerja di ruang terbuka atau memiliki mobilitas tinggi.** Tukang ojek, pedagang pinggir jalan, serta pekerja tambang disebut lebih sering terpapar debu. Seorang apoteker menyampaikan bahwa kasus infeksi saluran pernapasan meningkat dan banyak dialami oleh pekerja yang terpapar langsung.

"Hampir 70% orang dari IWIP itu rata-rata infeksi saluran nafas... karena 'abu' debu yang mereka hirup." (05-43FJ3, Apoteker, Perempuan, 05-43FJ3)

Keluhan mengenai debu juga muncul dari warga yang tinggal di jalur lalu lintas padat. Beberapa menyebut harus menutup pintu rumah untuk mengurangi paparan debu (05-31FJ3), sementara yang lain mengaitkan peningkatan aktivitas industri dengan bertambahnya sampah dan kualitas udara yang menurun (05-12FJ3).

Selain itu, **peningkatan aktivitas hiburan malam menyebabkan peningkatan lokalisasi di Fidi Jaya.** Perubahan ini menyebabkan pertumbuhan signifikan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS (05-12FJ3). Hal ini diungkupkan oleh tenaga kesehatan yang menjelaskan bahwa tidak perlu waktu lama untuk menunggu adanya korban jiwa dari penyakit ini (05-21FJ3).

Di sektor perikanan, paparan juga bersifat ekologis. Nelayan menyebut bahwa perubahan kualitas laut dan aktivitas industri memengaruhi hasil tangkapan mereka (05-06FJ3; 05-01FJ3). Meskipun tidak semua secara eksplisit menyebut polusi sebagai penyebab utama, perubahan jarak tangkap dan penurunan hasil menunjukkan adanya tekanan ekologis yang dirasakan lebih kuat oleh kelompok ini.



1.8 Sosialisasi yang Terbatas dan Mekanisme Pengaduan yang Belum Dipahami

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Fidi Jaya berlangsung cepat dan signifikan. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana perubahan tersebut disosialisasikan kepada warga, dan melalui saluran apa?

Sebagian besar responden menyampaikan bahwa mereka **tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau sosialisasi terkait dampak dan manfaat tambang.** Pada FGD Pemuda yang hampir seluruhnya merupakan penduduk lokal seorang peserta menyampaikan,

*"Belum pernah diundang atau terlibat diskusi mengenai dampak atau pemanfaatan tambang." (*FGD Pemuda)

Pernyataan serupa disampaikan oleh nelayan non-kelompok (05-32FJ3), pelaku usaha (05-42FJ3), tenaga kesehatan (05-43FJ3; 05-44FJ3), guru (05-39FJ3), tenaga kesehatan (05-38FJ3) hingga tokoh agama (05-27FJ3).

Beberapa responden bahkan secara eksplisit menyebut **tidak mengetahui adanya program pemerintah atau perusahaan untuk mengatasi dampak tambang** (05-38FJ3; 05-33FJ3). Seorang kader menyampaikan bahwa sosialisasi desa "hanya beberapa saja yang diundang, tokoh-tokoh saja tidak semua" (05-21FJ3). Di sisi lain, perangkat desa menjelaskan bahwa mekanisme formal sebenarnya tersedia melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa (05-19FJ3; 05-14FJ3). Namun dalam praktiknya, forum tersebut tidak selalu dipahami atau dirasakan inklusif oleh warga.

Seiring berkembangnya aktivitas tambang dan meningkatnya dinamika sosial di desa, **warga menceritakan berbagai persoalan yang muncul dalam keseharian**, seperti konflik antar kelompok, pencurian, gangguan ketertiban, hingga keresahan sosial.

Namun, dalam banyak wawancara dan diskusi, responden menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme formal untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi. Beberapa responden menyebut adanya konflik dan kriminalitas yang meningkat.

"Ada konflik antar suku. Bisa setahun 3x." (05-05FJ3, Petani, Laki-laki, 39 Tahun)

"Semakin banyak kriminalitas dan adanya lokalisasi." (05-42FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 30 Tahun)

Namun, meskipun persoalan tersebut diakui terjadi, **tidak semua kejadian dilaporkan melalui jalur formal.** Dalam beberapa kasus, warga memilih untuk tidak melapor karena merasa tidak memiliki posisi sosial atau akses yang cukup kuat. Seorang pendatang menceritakan bahwa ketika delapan kompor miliknya dicuri, ia memilih tidak melapor karena merasa *"kita ini pendatang jadi biar saja"* (05-35FJ3). Pengalaman ini menunjukkan bahwa status sosial dan rasa kepemilikan terhadap ruang desa memengaruhi keberanian untuk menggunakan mekanisme formal.

Refleksi lapangan juga mencatat bahwa **sebagian besar responden tidak mengetahui secara jelas ke mana keluhan dapat disampaikan.** Dalam beberapa diskusi, muncul pernyataan bahwa warga

"tidak tahu bagaimana menyampaikan keluhan, ke siapa" (Refleksi Harian FJ3).

Ketika ditanya mengenai saluran pengaduan, seorang responden menyebut kemungkinan menyampaikan aspirasi ke dinas, anggota dewan, atau melalui media sosial (05-12FJ3). Seorang responden bahkan menyebut pemanfaatan teknologi digital sebagai kanal yang bisa dimanfaatkan

"Kalau ada keluhan disampaikan kemana? … sekarang ada foto medsos tinggal foto posting." (05-22FJ3, P3K, Laki-laki, 40 Tahun)

Namun akses tersebut tidak selalu dipahami sebagai mekanisme yang rutin dan terstruktur. Beberapa responden juga menyebut bahwa komunikasi ke tingkat yang lebih tinggi tidak terbuka untuk semua warga.

"Laporan ke atas? Tidak ada saluran komunikasi ke atas. Hanya orang yang dekat saja yang bisa dapat akses." (05-10FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 34 Tahun)

Dalam situasi tersebut, **penanganan persoalan seringkali dilakukan secara informal atau berbasis inisiatif kelompok kecil.** Refleksi lapangan mencatat adanya inisiatif ibu-ibu yang melakukan sweeping secara mandiri karena merasa tidak ada respons dari pemerintah terhadap isu sosial tertentu (Refleksi Harian FJ3).

Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah perubahan sosial yang cepat, **sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengaduan belum terlembagakan secara jelas dan inklusif.** Forum formal secara prosedural tersedia, tetapi tidak sepenuhnya dipahami, tidak diakses secara merata, atau tidak dirasakan efektif oleh berbagai kelompok sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah perubahan sosial yang cepat, **sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengaduan belum terlembagakan secara jelas dan inklusif.** Forum formal secara prosedural tersedia, tetapi tidak sepenuhnya dipahami, tidak diakses secara merata, atau tidak dirasakan efektif oleh berbagai kelompok sosial.

Akibatnya, pengelolaan konflik dan aspirasi lebih banyak bergantung pada jalur informal dan relasi personal dibandingkan sistem yang transparan dan kolektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa **efektivitas mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian persoalan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparat keamanan**, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah desa dan koordinasi lintas pihak yang memahami konteks sosial serta lokasi permasalahan di tingkat lokal.

Gambar 8. Kantor Desa Fidi Jaya yang minim papan informasi



1.9. Dinamika Pemuda dalam Konteks Perubahan Sosial-Ekonomi

Perubahan sosial-ekonomi akibat ekspansi tambang secara nyata memengaruhi posisi dan orientasi pemuda di Fidi Jaya. Berbeda dengan generasi yang lebih tua yang membandingkan kondisi "sebelum dan sesudah", kelompok pemuda lebih banyak berbicara tentang peluang kerja, mobilitas ekonomi, serta ketidakpastian masa depan pascatambang. Namun respons mereka tidak tunggal.

Beberapa responden menyampaikan bahwa **kehadiran tambang secara signifikan mengurangi pengangguran,** terutama di kalangan pemuda lokal. Seorang tenaga medis sekaligus pemuda aktif gereja menyampaikan bahwa sebelum hadirnya perusahaan, pengangguran di kalangan pemuda cukup tinggi dan akses kerja di sektor formal relatif sulit.

"Pengangguran khususnya di kalangan pemuda… cukup banyak. Jadi pada saat tambang itu datang peluang kerja bagi anak-anak pemuda… cukup meningkat dan pengangguran di antara mereka pun mulai berkurang." (05-38FJ3, Tenaga Kesehatan, Laki-laki, 33 Tahun)

Hal serupa tercermin dari pernyataan responden lain yang menyebut bahwa setelah lulus SMA, banyak anak muda memilih langsung bekerja di tambang dibanding melanjutkan studi:

"Sekarang orang lulus SMA yaudah ada tambang. Mau studi lanjut lebih ke bekerja saja." (05-15FJ3, Pelayan Gereja, Laki-laki, 29 Tahun)

Di sektor informal, peningkatan pendapatan juga dirasakan, seperti disampaikan oleh seorang ojek yang menyebut bahwa sebelum tambang mencari Rp100.000 "setengah mati", sementara sekarang pada hari tertentu bisa mencapai Rp700.000–Rp1.000.000 (05-08FJ3).

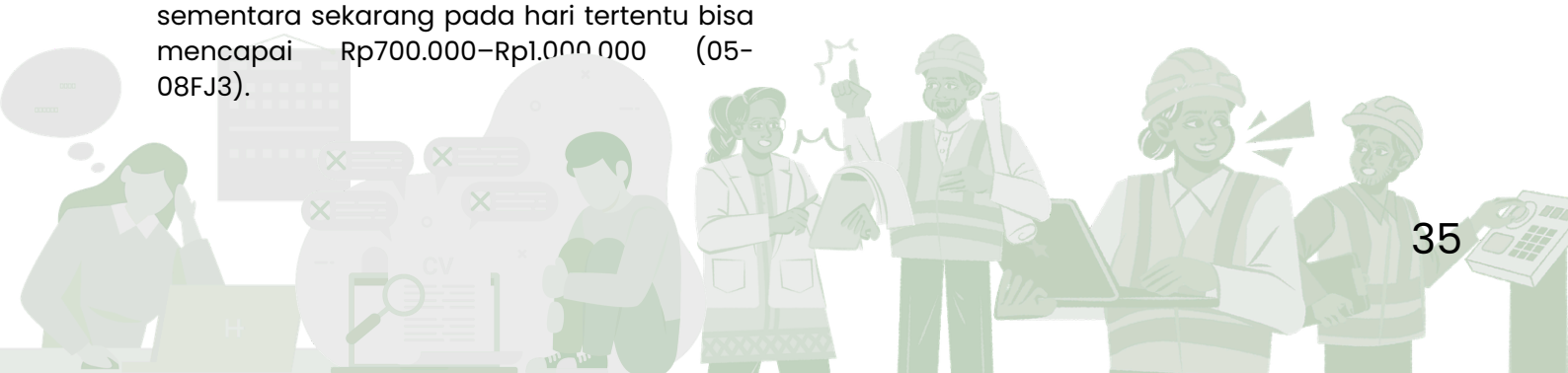
Namun demikian, **peningkatan akses kerja tidak selalu berarti keberlanjutan kerja di sektor tambang.** Sejumlah narasi menunjukkan bahwa sebagian pemuda tidak bertahan lama dalam sistem kerja industri. Seorang pekerja tambang menyampaikan bahwa:

"Sistem di perusahaan itu kian lama kian kapitalis… banyak pekerja lokal yang keluar atau mengundurkan diri karena kurang mampu beradaptasi." (05-41FJ3, Pekerja Tambang, Laki-laki, 30 Tahun)

Pada kesempatan wawancara yang lain, seorang mantan pekerja tambang yang saat ini menjadi buruh harian lepas memberikan tanggapan ketika ditanya kenapa keluar dari IWIP,

"Karakter kita tidak bisa Ibu!" kita tidak bisa ditekan lebih baik kita ke kebon! Orang bule hanya focus pembersihan dan selesai dan tepat waktu, hujan istirahat. Kalau china, belum jam waktu kerja hujan sikat sampai seleesai, mau mati pokoknya harus selesai. Safety hanya 2. Kita pasang panel itu hujan-hujan. 2 tahun. Kalau bule waktu istirahat harus istirahat, punting rokok tidak boleh ada. Kumpul itu punting rokok baru dikasih kantong. Kalau china tidak pakai tissue." (05-23FJ3, Pekerja Jasa, Laki-laki).

Refleksi lapangan juga mencatat bahwa ada pemuda yang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum keluar karena merasa tidak nyaman atau tidak sejalan dengan prinsip hidup mereka. Beberapa bahkan dinilai merasa pekerjaan tersebut "bertentangan dengan paradigma atau prinsip hidup mereka sehingga tidak mau bekerja di sana atau hanya setahun lalu keluar" (Catatan Tim Peneliti Klaster 3)



Seorang pemimpin organisasi keagamaan yang juga aktif pada kegiataan keagamaan mengamati fenomena serupa:

"Mereka keluar karena 'lelah'... terus mereka ingin masuk lagi." (05-24FJ3, Pemimpin Organisasi Keagamaan, Perempuan, 54 Tahun)

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi pemuda dengan tambang bersifat dinamis dan tidak selalu stabil. Tambang membuka akses, tetapi tidak semua mampu atau bersedia beradaptasi dengan ritme dan disiplin kerja industri.

Di samping itu, **tidak semua pemuda menilai distribusi akses berjalan merata.** Pemuda yang bekerja sebagai tenaga medis menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih terdapat pola kedekatan atau koneksi ("orang dalam") yang memengaruhi penerimaan kerja (05-38FJ3). Ia juga menyebut bahwa beasiswa perusahaan jarang terdengar di kalangan pemuda Kristen, sementara beasiswa pemerintah relatif lebih dikenal dan diakses.

Respons pemuda terhadap perubahan juga menunjukkan perbedaan orientasi. Sebagian pemuda menekankan manfaat ekonomi dan berharap tambang terus berjalan. Seorang sopir menyampaikan harapan agar tambang "janganlah berakhir" (05-45FJ3), dan dalam diskusi kelompok beberapa pemuda mengaku belum pernah benar-benar memikirkan kemungkinan pascatambang (FGD Pemuda).

Namun di sisi lain, terdapat pemuda yang menunjukkan kegelisahan lebih reflektif. Seorang pelayan gereja menyoroti peningkatan banjir dan hilangnya hutan bakau, serta mengingatkan bahwa tanpa persiapan pascatambang desa dapat mengalami penurunan drastis seperti wilayah lain yang ditinggalkan industri (05-15FJ3).

Beberapa responden juga mengaitkan **perubahan ekonomi dengan perubahan pola pergaulan pemuda.** Perangkat desa menyebut munculnya kasus "lem" dan narkoba yang sebelumnya tidak terlihat (05-14FJ3). Aparat keamanan menyinggung berkembangnya kafe dan potensi risiko sosial bagi anak muda (05-17FJ3). Seorang pelayan gereja menyampaikan kekhawatiran atas perubahan relasi dan nilai sosial akibat masuknya pendatang (05-15FJ3).

Meskipun terdapat pemuda yang kritis dan reflektif, hampir seluruh wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat wadah kepemudaan yang aktif dan terlembagakan di desa. Beberapa responden menyebut bahwa karang taruna belum terbentuk (05-22FJ3; 05-19FJ3). Pemuda (05-38FJ3) menyatakan belum pernah dilibatkan dalam diskusi desa terkait dampak tambang. Oleh karenanya dalam diskusi kelompok, muncul **aspirasi agar desa menyediakan ruang atau komunitas bagi pemuda untuk membahas isu lingkungan, ekonomi, dan masa depan desa.**

Cerita para responden menunjukkan bahwa **terdapat kesenjangan antara potensi dan aspirasi sebagian pemuda dengan ruang partisipasi yang tersedia di tingkat desa**. Di satu sisi, beberapa pemuda menunjukkan keinginan untuk terlibat dan memiliki gagasan mengenai masa depan desa, namun belum menemukan wadah yang memadai. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa tidak semua pemuda memiliki motivasi atau kesiapan yang sama untuk mengambil peran aktif. Situasi ini menggambarkan bahwa penguatan kapasitas pemuda memerlukan pendekatan dua arah, yakni penyediaan ruang partisipasi yang lebih terbuka sekaligus pembinaan yang mendorong keterlibatan aktif dari kalangan pemuda sendiri.

RQ 2: Kondisi dan Kesenjangan Layanan Dasar

2.1 Fasilitas dan Layanan Kesehatan Gratis Menguat, Namun Kapasitas dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Perlu Diantisipasi

Dalam berbagai wawancara, **responden secara konsisten membandingkan kondisi layanan kesehatan saat ini dengan situasi sebelum berkembangnya aktivitas industri dan pertambangan**. Perbandingan ini muncul lintas profesi dan generasi, dan secara umum menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dinilai jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Program kesehatan gratis untuk pemegang KTP Halmahera Tengah disebut telah berjalan sejak kepemimpinan sebelumnya dan diteruskan hingga sekarang, sehingga dipahami sebagai kesinambungan kebijakan daerah, bukan program sesaat.

Sektor kesehatan menjadi aspek yang paling sering disebut mengalami peningkatan signifikan. Seorang aparat keamanan yang merupakan pendatang di Fidi Jaya (05-17FJ3) menggambarkan perubahan tersebut secara langsung:

"Dulu hanya puskesmas, sekarang sudah sampai RS. Untuk KTP Halteng semua gratis. Obat, perawatan, dll."

Pernyataan ini diperkuat oleh seorang tenaga penyuluh KB yang sehari-hari berinteraksi dengan ibu hamil dan keluarga (05-21FJ3). Ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan gratis tidak hanya mencakup pengobatan, tetapi juga insentif bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia.

Dari pengalamannya di lapangan, kebijakan tersebut mendorong kelompok rentan lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan

Namun demikian, **peningkatan akses belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas.** Seorang aparatur pemerintah yang istrinya bekerja sebagai tenaga kesehatan, menyampaikan bahwa bertambahnya jumlah pendatang menyebabkan antrean layanan semakin panjang dan dalam beberapa situasi memicu ketegangan (05-12FJ3). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan fasilitas dan tenaga medis.

Keterbatasan sarana juga disebutkan oleh petugas kesehatan yang menilai dukungan alat medis masih perlu ditingkatkan (05-44FJ3). Seorang apoteker menekankan kebutuhan jangka menengah, khususnya dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan wilayah:

"Fasilitas sekarang itu untuk nanti menyambut 5–10 tahun kayaknya harus ditambah… terutama bidang kesehatan seperti apotek… penambahan tenaga medis terutama dokter spesialis." (05-43FJ3, Apoteker, Perempuan, 30 Tahun)

Selain persoalan kapasitas, **dinamika sosial akibat meningkatnya mobilitas penduduk juga berdampak pada isu kesehatan masyarakat.** Beberapa responden, termasuk tenaga kesehatan dan apoteker, menyampaikan adanya peningkatan kasus penyakit menular dalam beberapa waktu terakhir (05-43FJ3; 05-21FJ3; 05-12FJ3).





Fenomena ini dikaitkan dengan bertambahnya pendatang dan perubahan pola sosial ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun layanan kesehatan tersedia secara gratis, tekanan terhadap sistem layanan dinilai semakin kompleks karena harus merespons dinamika demografis yang berubah cepat.

Secara keseluruhan, **masyarakat mengakui bahwa akses layanan kesehatan saat ini jauh lebih terbuka dan terjangkau dibandingkan masa lalu**. Namun, dalam narasi yang sama muncul kesadaran bahwa keberlanjutan kualitas layanan, kesiapan fasilitas menghadapi pertumbuhan penduduk, serta penguatan sistem kesehatan masyarakat menjadi isu penting yang perlu diantisipasi ke depan.

2.2 Akses Pendidikan Semakin Terbuka dan Gratis, Namun Tantangan Kualitas dan Kesiapan SDM Masih Terlihat

Di sektor pendidikan, responden secara umum menilai bahwa fasilitas dan pembiayaan mengalami kemajuan signifikan dibandingkan masa lalu. Pendidikan gratis hingga jenjang S3 disebut oleh beberapa aparatur pemerintah, menunjukkan bahwa kebijakan daerah tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mendorong penguatan sumber daya manusia dalam jangka panjang (05-12FJ3; 05-38FJ3).

Dalam FGD Perempuan, seorang peserta menggambarkan perubahan tersebut secara langsung:

"Kalau pendidikan lebih baik, dulu tanggung sendiri, sekarang gratis. Fasilitas juga bagus, gedung tidak lama-lama langsung diperbaharui." (FGD Perempuan)

Seorang guru menambahkan bahwa kini terdapat dukungan fasilitas tambahan, seperti papan digital untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah, termasuk di wilayah yang sebelumnya tergolong terbatas. Menurutnya, fasilitas tersebut cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran (05-39FJ3).

Namun demikian, **di balik peningkatan sarana dan pembiayaan, sejumlah responden menyoroti persoalan kualitas dan kedisiplinan tenaga pendidik.** Seorang responden menyebut jumlah guru masih kurang (05-37FJ3), sementara responden lain menyinggung persoalan ketidakhadiran guru (05-28FJ3). Bahkan seorang tokoh agama secara tegas menyampaikan:

"Alhamdulillah sudah baik. Air baik, listrik, jalan semua baik. Kesehatan tiap bulan ada pemeriksaan gratis, ada lansia juga. Semua sekolah sudah baik, fasilitas pendidikan sudah baik, tapi tolong tingkatkan disiplin guru!" (05-27FJ3, Tokoh Agama, Perempuan, 46 Tahun).

Selain isu tenaga pendidik, refleksi harian Tim Peneliti Fidi Jaya juga mencatat bahwa **kesiapan dan motivasi sebagian generasi muda untuk memanfaatkan peluang pendidikan yang tersedia masih menjadi pertanyaan.** Meskipun pembiayaan telah banyak ditanggung pemerintah, terdapat kesan bahwa peningkatan kualitas diri, kedisiplinan, dan komitmen belajar belum selalu berjalan seiring dengan dukungan struktural yang telah diberikan.

Secara keseluruhan, **pendidikan di Fidi Jaya dipersepsikan semakin terbuka dan terjangkau secara finansial, dengan dukungan fasilitas yang terus diperbarui.** Namun, tantangan bergeser dari persoalan akses menuju penguatan kualitas, disiplin tenaga pendidik, dan kesiapan individu untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia.



Gambar 9. Kondisi jalan utama menuju Weda dari Fidi Jaya

2.3 Infrastruktur Dasar Menguat, Namun Infrastruktur Lingkungan dan Tekanan Permukiman Masih Menjadi Tantangan

Perubahan infrastruktur dasar menjadi salah satu temuan yang paling konsisten muncul dalam wawancara. Pada sektor kelistrikan, responden secara jelas **membandingkan kondisi sebelumnya yang sering mengalami pemadaman dengan situasi saat ini yang dinilai jauh lebih stabil.** Seorang petani menyebut bahwa listrik dulu cukup sering padam, sementara sekarang kondisinya jauh lebih baik dan jarang mengalami gangguan (05-18FJ3).

Narasi serupa juga disampaikan oleh dua pedagang yang merupakan pendatang, serta oleh beberapa penduduk asli Fidi Jaya, termasuk seorang petani non-kelompok (05-16FJ3;05-26FJ3; 05-28FJ3; 05-30FJ3). **Mereka menggambarkan situasi masa lalu dengan ungkapan sederhana namun kuat, bahwa listrik sering "mati pagi nyala malam."** Perbandingan lintas kelompok—baik pendatang maupun warga asli—menunjukkan bahwa perbaikan kelistrikan dirasakan luas dan berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga maupun usaha sehari-hari.

Perbaikan serupa juga dirasakan pada infrastruktur jalan. Persepsi ini muncul lintas profesi dan usia. Seorang pedagang yang telah tinggal delapan tahun di Fidi Jaya menyampaikan, "Kalau di sini jalan. Semua jalan diperbaiki." (05-16FJ3). Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemilik usaha kecil berusia 50 tahun yang menyebut bahwa "jalan ada peningkatan, jalan sudah baik." (05-35FJ3).

Seorang sopir organda yang kesehariannya bergantung pada kondisi akses transportasi, juga menegaskan bahwa jalan di dalam Kota Weda, termasuk Desa Fidi Jaya, "sudah bagus." (05-45FJ3). Bahkan seorang tenaga penyuluh KB menggambarkan perubahan itu secara singkat: "Kampung jalan semakin bagus."(05-21FJ3). **Dibandingkan periode sebelumnya, kondisi jalan tidak lagi menjadi keluhan utama dalam percakapan masyarakat.**

Namun demikian, ketika pembahasan bergeser ke infrastruktur lingkungan, **persoalan drainase dan genangan muncul secara konsisten.** Seorang penduduk asli Fidi Jaya menjelaskan bahwa meskipun jalan sudah membaik, aliran air masih menjadi masalah karena posisi daratan yang relatif lebih rendah dari laut membuat air mudah meluap saat hujan deras (05-21FJ3). Hal ini dikonfirmasi oleh responden berusia 76 tahun yang juga merupakan pemilik usaha kecil, yang menyampaikan:

"Jalan sudah cukup baik, tapi untuk sarana saluran di gang-gang/lorong-lorong perlu segera diperbaiki, karena sering terjadi genangan pada saat hujan dan mengakibatkan banjir di beberapa rumah warga." (05-37FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 76 Tahun)

Observasi lapangan Tim Peneliti FJ3 juga mencatat bahwa beberapa saluran air terlihat tidak teratur dan menyebabkan genangan ketika curah hujan tinggi. Karakter topografi wilayah yang miring ke daratan turut memperburuk situasi, karena air hujan dan pasang laut berpotensi bertemu dan menyebabkan genangan di titik tertentu. Selain itu, meningkatnya kepadatan permukiman juga berdampak pada persoalan sanitasi dan munculnya tikus di kawasan yang semakin padat (Observasi Tim Peneliti FJ3).

2.4 Layanan Air Bersih Masih Menjadi Titik Kerentanan Layanan Dasar

Tantangan terkait air tidak dirasakan secara seragam di seluruh wilayah. Hal ini ditentukan dari perbedaan kondisi antara kawasan tanah lama dengan wilayah yang berkembang di atas lahan bekas rawa (05-42FJ3).

Seorang responden menjelaskan, "Solusinya kalau tidak ada air bicara PAM, kita pakai sumur-sumur saja... tapi tidak semua tempat bisa pakai sumur." (05-23FJ3). Refleksi harian tim peneliti mencatat bahwa kawasan "pondok ke atas itu rawa jadi harus pakai PAM, sedangkan ke bawah adalah tanah lama jadi pakai sumur bisa." Di tanah lama, sumur masih menjadi sumber air utama yang relatif stabil. "Air di sini pakai sumur bersih... belum pernah kering," (05-25FJ3). Sebaliknya, di kawasan bekas rawa, air cenderung kuning meskipun menggunakan PAM. Kemudian, **persoalan ini semakin terasa setelah aktivitas industri berkembang** (05-35FJ3).

Gambar 10. Pengaspalan jalan di Dusun 3





Gambar 11. Kondisi Drainase Yang Kotor (Hewan Pengerat dan Tanaman Dijumpai)

Meskipun air tidak menjadi masalah bagi masyarakat dengan akses kepada sumur, **persoalan layanan air bersih melalui PAM** disebut dalam berbagai wawancara. Responden lintas usia dan profesi menyampaikan bahwa air PAM masih sering macet atau berwarna keruh. Seorang pemilik usaha kecil menceritakan:

"Yang bermasalah sampai hari ini 'sampai detik ini PAM', kalau tidak macet ya hitam." (05-30FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Perempuan, 37 Tahun).

Pernyataan ini diperkuat oleh responden lain yang menyebut air PAM masih menjadi kendala dalam aktivitas sehari-hari (05-29FJ3).

Kekhawatiran juga muncul terkait tekanan jangka panjang terhadap sumber air. Seorang pekerja tambang menyampaikan kekhawatirannya terhadap perubahan fungsi sungai dan potensi dampaknya terhadap ketersediaan air dalam 10–20 tahun ke depan (05-41FJ3). Refleksi wawancara turut mencatat bahwa rencana ekspansi industri dan pertambahan penduduk dipersepsikan akan semakin membebani kapasitas layanan air bersih (05-42FJ3).

Secara evaluatif, **air bersih menjadi sektor layanan dasar yang belum menunjukkan perbaikan sekuat listrik dan jalan**. Konsistensi keluhan lintas responden menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kasus individual, melainkan isu sistemik yang memerlukan perencanaan kapasitas dan perlindungan sumber daya air secara lebih terintegrasi.





Gambar 12 (atas). Masjid tertua di Fidi Jaya dengan sumur yang masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini; **Gambar 13** (bawah). Kegiatan masyarakat mengisi jerigen saat air PAM menyala

2.5 Bantuan Ekonomi Produktif: Program Tersedia, Namun Keberlanjutan dan Ketepatan Intervensi Masih Menjadi Tantangan

Dalam berbagai wawancara dan diskusi kelompok, **responden mengakui bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah bentuk bantuan ekonomi produktif, khususnya di sektor pertanian dan perikanan**. Seorang petani menyebut bahwa desa pernah menyalurkan 99 bibit pohon yang langsung dibagikan kepada petani (05-03FJ3). Seorang aparat pemerintah juga menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat penyaluran bibit dari pemerintah daerah (05-12FJ3).

Di sektor perikanan, bantuan berupa fiber dan alat tangkap juga disebutkan. Seorang nelayan perempuan menceritakan bahwa pada tahun 2022 kelompoknya menerima bantuan senilai 40 juta rupiah yang digunakan untuk membeli box, mantel, alat pancing, serta perahu, dan kemudian tambahan fiber (05-07FJ3). Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk modal dan alat produksi memang tersedia.

Dalam FGD Perempuan juga **muncul dorongan agar dukungan lebih konkret**, seperti modernisasi alat nelayan dan penguatan pertanian melalui pupuk dan pembibitan.

Seorang peserta menyebut bahwa figur lokal tertentu mampu membantu hingga empat kapal melaut, dan hal seperti itu "harus dibantu."

Meskipun demikian, **terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, mekanisme distribusi melalui kelompok tani memunculkan dinamika tersendiri**. Responden menjelaskan bahwa "syarat utamanya kelompok" untuk mengakses program (05-05FJ3), tetapi dalam praktiknya muncul kecemburuan karena dianggap hanya ketua kelompok yang lebih banyak menikmati manfaat (05-05FJ3).

Kedua, terdapat **persepsi bahwa pendatang lebih aktif dan menguasai hortikultura**, sementara petani lokal yang memiliki lahan lebih luas justru tertinggal dalam pengembangan kapasitas (05-05FJ3).

"Pendatang rata-rata hortikultura. Local masih harus didekati penyuluh. Orang local lahannya luas tapi untuk tanaman tahunan. Jadi harus peningkatan kapasitas." (05-05FJ3, Petani, Laki-laki, 39 Tahun)

Ketiga, **kemampuan kelompok untuk merawat dan mengelola.** Refleksi Harian Tim Peneliti Fidi Jaya mencatat bahwa terdapat bantuan fiber yang baru diterima 1–2 bulan namun sudah rusak. Dalam wawancara lain disebutkan bahwa ada penerima bantuan yang belum menggunakan fiber yang diterima (05-06FJ3).

Gambar 14. Penyaluran bibit tanaman oleh penyuluh pertanian



Hal ini dikonfirmasi juga oleh petani yang memberikan bantuan fiber ke keluarganya yang lain karena tidak menggunakan bantuan tersebut (05-18FJ3). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada ketersediaan bantuan, tetapi juga pada kualitas barang, ketepatan sasaran, serta pemanfaatannya.

Selain sektor pertanian dan perikanan, sejumlah responden juga menyoroti **pentingnya penguatan keterampilan dan pengembangan UMKM.** Seorang pemilik usaha kecil menyampaikan perlunya kerja sama pemerintah dengan lembaga pelatihan seperti K3 untuk peningkatan keterampilan teknis, serta dengan PKBM untuk penguatan kemampuan bahasa asing agar masyarakat memiliki alternatif pekerjaan di luar sektor tambang (05-42FJ3).

Senada dengan itu, seorang apoteker menekankan bahwa pemerintah **tidak hanya perlu menyediakan pelatihan, tetapi juga dukungan ekosistem usaha**, termasuk penyediaan lahan atau ruang berjualan bagi pelaku UMKM seperti food car (05-43FJ3).

Namun demikian, **persepsi terhadap program yang berjalan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan implementasi.** Seorang pedagang yang telah delapan tahun menetap di Fidi Jaya menyebut bahwa program UMKM memang tersedia, tetapi "yang dikasih yang pisang-pisang saja" (05-16FJ3), mencerminkan kesan bahwa bantuan cenderung terbatas pada jenis usaha tertentu dan belum sepenuhnya menjawab keragaman kebutuhan pelaku usaha. Di sisi lain, seorang pemimpin organisasi keagamaan menyampaikan adanya bantuan tunai sekitar lima juta rupiah serta dukungan alat dari dinas terkait (05-24FJ3), meskipun informasi tersebut bersifat tidak langsung dan tidak semua pelaku usaha merasakan akses yang sama.

Responden dalam FGD Pemuda menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan:
"Yang penting ada pendampingan dan pelatihan agar masyarakat. Tapi kalau cuma pelatihan 1–2x itu susah tidak akan berlanjut. Perlu ada berkelanjutan agar terus berputar." (FGD Pemuda)

2.6 Perencanaan dan Informasi Layanan Dasar Berjalan Formal, Namun Belum Menjangkau Seluruh Warga

Secara administratif, **perencanaan layanan dasar di Desa Fidi Jaya telah berjalan melalui mekanisme formal seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes).** Seorang aparat desa menjelaskan bahwa aspirasi dijaring dari tingkat dusun, kemudian dibahas di tingkat desa untuk menentukan prioritas program (05-14FJ3). Ia juga menyebut bahwa jika anggaran desa tidak mencukupi, terdapat kemungkinan mengajukan dukungan ke perusahaan, meskipun hingga saat ini belum pernah dilakukan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara struktur, ruang perencanaan tersedia.

Namun, pengalaman warga terhadap pelibatan dalam proses tersebut tidak sepenuhnya merata. Beberapa responden dari latar belakang berbeda—guru, perawatm dan pemilik usaha kecil — menyatakan bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam diskusi atau sosialisasi terkait layanan dasar maupun dampak tambang (05-39FJ3; 05-40FJ3; 05-42FJ3). Salah satu responden menyampaikan secara langsung:

"Belum pernah… masyarakat umum jarang dilibatkan dan belum ada wadah atau diskusi di sekitar desa." (05-42FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 30 Tahun)



Meskipun ada responden yang pernah menghadiri pertemuan di tingkat kabupaten, jangkauan forum tersebut tidak selalu dirasakan sampai ke tingkat warga desa secara luas (05-18FJ3).

Selain pelibatan, **penyampaian informasi program juga dinilai belum sistematis.** Refleksi lapangan mencatat bahwa pemberitahuan sering dilakukan secara lisan, tanpa undangan tertulis atau media informasi tetap. Seorang responden menyebut bahwa informasi bantuan disampaikan dari rumah ke rumah tanpa surat resmi (Refleksi Harian FJ3). Beberapa warga bahkan mengaku mendapatkan informasi karena kebetulan berada di warung (05-42FJ3). Papan informasi desa yang dahulu ada kini sudah tidak tersedia (05-20FJ3), dan grup WhatsApp desa juga belum terbentuk (05-25FJ3).

Dalam konteks ini, **media sosial—terutama Facebook—menjadi ruang alternatif untuk menyampaikan keluhan dan kritik**. Seorang aparat pemerintah (05-09FJ3) dan seorang guru menyebut bahwa Facebook kerap digunakan warga untuk menyuarakan aspirasi karena dianggap lebih terbuka (05-39FJ3).

Bahkan dalam FGD Pemuda disebutkan bahwa desa lain, seperti Wedana dan Were, telah memanfaatkan Facebook untuk menginformasikan rencana kegiatan desa. Sementara itu, meskipun kepala desa menyebut adanya website dan akun media sosial desa, tim peneliti tidak menemukannya secara aktif.

Observasi tim peneliti juga mencatat adanya tantangan kapasitas administratif, termasuk pengelolaan data dan distribusi bantuan. Isu yang dibahas dalam musyawarah kerap berulang, sementara pemahaman mengenai peran RT, RW, dan dusun belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa **mekanisme formal perencanaan memang tersedia. Namun, celah pada jangkauan komunikasi, transparansi informasi, dan kapasitas administratif** menyebabkan pengalaman partisipasi dan akses informasi belum dirasakan merata oleh seluruh warga.



2.7 Mekanisme Kelompok dan Proposal sebagai Jalur Akses Program

Dalam berbagai wawancara, **responden menggambarkan bahwa akses terhadap program bantuan—baik perikanan, pertanian, maupun UMKM—umumnya ditempuh melalui pembentukan kelompok dan pengajuan proposal ke dinas terkai**t. Mekanisme ini dipahami sebagai jalur resmi yang menjadi prasyarat administratif untuk memperoleh bantuan.

Seorang petani menjelaskan secara langsung bahwa hampir semua program mensyaratkan pembentukan kelompok.

"Syarat utamanya kelompok." (05-05FJ3, Petani, Laki-laki, 39 Tahun)

Ia menambahkan bahwa banyak warga berlomba masuk kelompok karena program dari dinas dan pusat mensyaratkan hal tersebut. Jika tidak tergabung dalam kelompok, peluang memperoleh benih atau bantuan menjadi kecil.

Namun dalam praktiknya, dinamika kelompok tidak selalu berjalan stabil. Seorang aparat desa menyebut bahwa kelompok sering bersifat musiman dan muncul ketika ada program. "Biasanya musiman. Intervensi pemerintah daerah terlalu tinggi." (05-24FJ3). Dalam FGD perempuan juga disampaikan bahwa secara data kelompok sudah ada, tetapi persoalannya terletak pada pemberdayaan.

"Data itu sudah ada. Pokja. Tinggal pemberdayaannya saja!!!" (FGD Perempuan)



Di sektor perikanan, seorang nelayan perempuan menyampaikan bahwa kelompoknya telah dua kali mengajukan proposal ke dinas perikanan tanpa pernah menerima informasi resmi mengenai hasilnya (05-06FJ3). Ia juga menyebut bahwa saat ini hanya dua kelompok yang masih aktif. Sebaliknya, nelayan lain menceritakan bahwa kelompoknya berhasil memperoleh bantuan, mulai dari dana 40 juta rupiah untuk perlengkapan melaut hingga perahu fiber pada 2024 (05-07FJ3).

Ketidaksesuaian antara mekanisme formal dan praktik lapangan juga muncul dalam refleksi tim peneliti. Disebutkan bahwa proposal diajukan atas nama kelompok, tetapi dalam pelaksanaannya bantuan lebih bersifat perorangan.

"Program untuk nelayan dan petani biasanya perorangan, harusnya berkelompok, tapi kalau masukkan proposal itu kelompok, di lapangan itu perorangan. Tidak sesuai." (Refleksi Harian Tim Peneliti Fidi Jaya)

Di sektor pertanian, seorang petani juga menyampaikan bahwa tidak semua jenis usaha cocok dikelompokkan. Untuk tanaman tahunan seperti pala atau cengkeh, pola pengelolaan cenderung individual. Ia bahkan menolak salah satu program karena kelompok binaannya sudah berjalan di bawah dinas lain (05-05FJ3). Sementara itu, dalam FGD pemuda disebutkan bahwa di Fidi Jaya tidak ada pola petani yang seragam sehingga pengelompokan sering kali sulit diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, **mekanisme kelompok dan proposal memang menjadi pintu masuk utama untuk mengakses program bantuan**. Namun pengalaman warga menunjukkan bahwa keberlanjutan kelompok, kesesuaian jenis usaha dengan model kelompok, serta kejelasan respons administrasi masih beragam. Mekanisme formal tersedia, tetapi dinamika di lapangan tidak selalu berjalan seragam di setiap sektor dan kelompok.

2.8 Akses terhadap manfaat dan penyelesaian persoalan dipersepsikan dipengaruhi oleh kedekatan relasi sosial

Ketika pembicaraan beralih dari prosedur formal ke pengalaman sehari-hari, sejumlah responden mulai menceritakan dimensi lain dalam akses terhadap manfaat dan respons layanan di desa—yakni peran relasi sosial. Isu ini tidak selalu muncul di awal wawancara, tetapi mengemuka ketika responden diminta menjelaskan mengapa sebagian warga merasa lebih cepat ditangani dibandingkan yang lain.

Beberapa responden menggambarkan bahwa sistem kekeluargaan di desa masih sangat kuat. Persoalan yang terjadi di masyarakat akan cepat teratasi atau didengar jika memiliki hubungan keluarga dengan aparatur pemerintah atau tokoh masyarakat.

"Ditambah menurut narasumber pemerintah desa di Fidi Jaya ini sistem kekeluargaannya tinggi (monarki), sehingga persoalan masalah di masyarakat akan cepat teratasi atau didengar jika ada hubungan keluarga. Bahkan persoalan beda gereja pun menjadi hal yang cukup krusial. Jika satu gereja dengan anggota pemdesnya maka keluh kesah akan cepat ditanggap. Namun jika tidak ada, maka tidak ada wadah sama sekali." (05-38FJ3, Tenaga Kesehatan, Laki-laki, 33 Tahun)

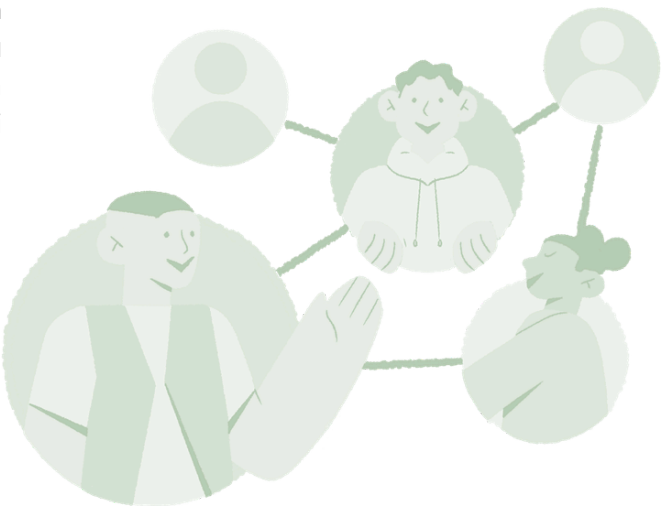
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kedekatan tidak hanya dipahami dalam arti hubungan darah, tetapi juga kedekatan sosial dan keagamaan. Dalam penuturannya, isu akses tidak berdiri sendiri sebagai persoalan administratif, melainkan terhubung dengan jaringan sosial yang sudah lama terbentuk di desa.

Narasi serupa muncul dari responden lain, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Dalam konteks pemerataan manfaat pekerjaan dan bantuan, istilah "orang dalam" atau "kenalan" beberapa kali disebutkan. Seorang nelayan perempuan menyampaikan persepsi yang lebih personal dan reflektif. Dalam pengalamannya, keberadaan keluarga atau relasi di desa menentukan apakah seseorang lebih mudah memperoleh manfaat.

"Sekarang intinya kalau ada 'orang dalam', ada keluarga tinggal di desa pasti dapat semuanya. Kalau tidak ada siapa-siapa jadi siapa kita." (05-06FJ3, Nelayan, Perempuan, 54 Tahun)

Ungkapan "jadi siapa kita" menggambarkan perasaan posisi sosial yang berbeda antara mereka yang memiliki jaringan dan mereka yang tidak. Nuansa ini menunjukkan bahwa persoalan akses dipersepsikan bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan posisi dalam struktur sosial desa.

Cerita mengenai distribusi informasi secara selektif juga muncul dalam wawancara dengan seorang pengemudi ojek (05-08FJ3). Ia memberi contoh pembagian undangan untuk bantuan ikan gratis yang menurutnya hanya diberikan kepada orang-orang yang dikenal oleh pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak terletak pada absennya mekanisme, melainkan pada distribusi informasi dan jangkauan partisipasi yang belum merata.



2.9 Bantuan Sosial dan Perumahan: Program Tersedia, Namun Persepsi Ketepatan Sasaran dan Kemerataan Dipertanyakan

Dalam berbagai wawancara, **responden mengakui bahwa secara administratif layanan bagi kelompok rentan telah berjalan.** Lansia disebut menerima insentif rutin serta dapat mengakses layanan kesehatan gratis menggunakan KTP daerah. Seorang nelayan perempuan berusia 62 tahun menyebut bahwa bantuan lansia diberikan setiap tiga bulan (05-07FJ3), sementara responden lain berusia 76 tahun mengonfirmasi bahwa insentif lansia sebesar Rp800.000 per orang diterima secara berkala (05-37FJ3). Dalam praktiknya, jika penerima tidak dapat datang ke kantor desa, aparat dusun atau perangkat desa mengantarkan bantuan ke rumah. Mekanisme ini dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan fisik penerima manfaat.

Selain bantuan lansia, program Rumah Layak Huni (RLH) juga disebut sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah. Seorang responden menyampaikan bahwa "ada juga bantuan RLH lewat pemda" (05-29FJ3). Responden lain melihat bahwa program pemerintah saat ini banyak berfokus pada pembangunan atau renovasi rumah.

"*Saya sekarang lihat program pemerintah lebih ke bangun rumah. RLH.*" (05-16FJ3, Pedagang, Laki-laki)

Beberapa warga menyebut telah menerima bantuan renovasi RLH dari desa (05-07FJ3). Namun dalam percakapan lain, muncul **persepsi bahwa distribusi RLH belum sepenuhnya merata.** Refleksi harian tim peneliti mencatat adanya komentar bahwa program dikejar dengan narasi pemerataan, "tapi akhirnya tidak merata," dan dinilai oleh sebagian warga sebagai "tidak tepat sasaran." Dalam cerita lain, disebut bahwa bantuan yang diajukan untuk seseorang justru diterima oleh pihak lain (Refleksi Harian Tim Peneliti Fidi Jaya).

Seorang nelayan non-kelompok berusia 74 tahun (05-28FJ3) bahkan menunjukkan kondisi rumahnya yang berada di antara rumah saudara yang telah menerima RLH, sementara dirinya belum memperoleh bantuan meskipun bupati pernah turun meninjau. Cerita ini memperlihatkan bagaimana pengalaman akses program dapat berbeda dalam konteks yang berdekatan secara geografis maupun sosial.

Di luar RLH, **persoalan ketepatan sasaran juga muncul pada bantuan sektor produktif.** Seorang nelayan perempuan berusia 54 tahun menyampaikan bahwa bantuan perikanan lebih banyak diterima laki-laki, meskipun perempuan juga aktif dalam aktivitas melaut. Dalam konteks pengajuan proposal yang telah dilakukan dua kali tanpa hasil, ia menyampaikan dengan nada emosional:

"salah sasaran!!! Dua kali masuk proposal di perikanan tapi kita tidak dapat. Yang dapat Laki-laki." (05-06FJ3, Nelayan, Perempuan, 54 Tahun)

Isu pengakuan juga muncul pada kelompok pemuda. Seorang pemuda yang aktif di organisasi keagamaan menjelaskan bahwa ia pernah dilibatkan dalam diskusi dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis, tetapi tidak pernah diundang sebagai pemuda Fidi Jaya (05-38FJ3). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa identitas sosial memengaruhi ruang partisipasi: seseorang dapat diundang sebagai profesional, tetapi tidak sebagai representasi kelompok sosialnya.



RQ3: PPM/CSR

3.1 Ragam Manfaat PPM/CSR Diakui, Namun Persepsi dan Pemahamannya Beragam

Dalam berbagai wawancara, **persepsi masyarakat terhadap PPM/CSR menunjukkan variasi yang cukup lebar. Sejumlah responden menyatakan belum pernah mendengar atau belum pernah menerima bantuan dari perusahaan**. Seorang pemilik usaha kecil menyebutkan, "Belum pernah dapat bantuan dari perusahaan. Sosialisasi juga belum ada." (05-10FJ3). Pernyataan serupa disampaikan oleh seorang pedagang yang mengatakan belum pernah mendengar bantuan perusahaan (05-16FJ3), serta seorang kader posyandu yang menyatakan "belum pernah dengar, termasuk belum pernah keterlibatan." (05-31FJ3). Seorang nelayan non-kelompok juga menyampaikan hal yang sama (05-28FJ3).

Sebagian responden lainnya pernah mendengar tentang program tersebut, namun tidak mengetahui secara detail mekanismenya. Seorang pekerja jasa menyebut bahwa ia "pernah dengar, tapi manfaat tidak tau," (05-23FJ3), sementara seorang aparat keamanan mengatakan, "Pernah dengar program PPM? Ada, tapi ujung-ujungnya nanti bekerja ke perusahaan." (05-17FJ3).

Beberapa responden lain juga menyampaikan bahwa mereka tahu ada program, tetapi tidak memahami siapa yang mengelola atau siapa yang berhak menerima (05-23FJ3; 05-42FJ3).

Di sisi lain, terdapat pengakuan yang jelas atas keberadaan dan manfaat program PPM/CSR. Beasiswa pendidikan menjadi bentuk bantuan yang paling sering disebut. Seorang guru menyampaikan bahwa "CSR, terutama digelontorkan untuk pendidikan," (05-39FJ3), sementara seorang aparat desa menjelaskan bahwa akses beasiswa terbuka namun kompetitif (05-14FJ3). Meski demikian, bantuan yang diberikan oleh perusaahan dinilai memiliki jangkauan yang terbatas, mengingat

"perusahaan memanggil mahasiswa untuk penandatanganan… tapi sampai hari ini sepertinya jangkauan terbatas." (05-41FJ3, Pekerja Tambang, Laki-laki, 30 Tahun)

Pada level komunitas, bantuan rumah ibadah disebut sebagai bentuk kontribusi yang paling terlihat. Seorang tokoh agama menyampaikan, "Ada ke masjid, berulang, dari PT IWIP. Sering Ada bantuan bahan bangunan…" (05-09FJ3).

Gambar 15. Renovasi masjid dengan bantuan material dari perusahaan di Dusun 1



Pernyataan ini diperkuat oleh seorang pendeta dan seorang pemilik usaha kecil yang juga menyebut bantuan material untuk rumah ibadah (05-27FJ3;05-37FJ3). Dalam situasi darurat seperti banjir, CSR juga dinilai hadir secara langsung. Seorang pekerja tambang menyampaikan bahwa saat banjir, "CSR sangat berperan penting," terutama karena adanya desakan dari pemerintah daerah (05-41FJ3).

Temuan ini menunjukkan bahwa PPM/CSR diakui keberadaannya dan sejumlah manfaatnya disebut secara konkret oleh sebagian warga. Namun tingkat pengetahuan, pengalaman menerima manfaat, dan pemahaman mengenai mekanisme program tidak dirasakan secara merata.

3.2 Perubahan Mekanisme Penyaluran CSR melalui Pemerintah Daerah

Dalam berbagai wawancara, **responden membandingkan mekanisme penyaluran CSR pada masa perusahaan sebelumnya (WBN) dengan periode setelah IWIP beroperasi.** Pada masa WBN, bantuan dinilai lebih langsung dan lebih mudah dikenali sumbernya. Program disalurkan melalui desa dan diteruskan kepada masyarakat, sehingga identitas perusahaan sebagai pemberi bantuan terasa lebih jelas.

"Kalau dulu dari Weda Bay pemberitahuan ke desa lalu ke masyarakat." (05-22FJ3, P3K dan Anggota Keagamaan, 40 Tahun)

Namun setelah IWIP beroperasi, alur distribusi dinilai berubah. Dana CSR lebih banyak dialihkan ke pemerintah daerah, yang kemudian mengelola dan menyalurkannya kembali dalam bentuk program pemberdayaan (05-20FJ3; 05-34FJ3). Perubahan ini tidak hanya dipahami sebagai pergeseran prosedur, tetapi juga sebagai perubahan cara masyarakat merasakan dan mengenali keberadaan CSR.

"Dana CSR dulu ketika WBN langsung ke masyarakat, tapi setelah IWIP masuk CSR dialihkan ke pemda. Perusahaan ke pemda dan pemda yang kelola untuk pemberdayaan masyarakat." (05-20FJ3, Pemilik Penginapan, Laki, laki, 63 Tahun)

Perubahan alur ini membuat sebagian masyarakat tidak selalu mengetahui apakah suatu bantuan berasal dari perusahaan atau dari pemerintah daerah. Dalam praktiknya, program yang diterima lebih sering dipersepsikan sebagai program pemerintah, tanpa penjelasan eksplisit mengenai sumber pendanaan atau bentuk kerja sama. Akibatnya, keberadaan CSR tidak selalu dikenali secara langsung oleh warga, meskipun program tetap berjalan.

Gambar 16. Gereja di Dusun 3



3.3 Mekanisme Proposal dan Perantara Desa Dalam Pengajuan Program Bantuan Perusahaan

Dalam hampir semua percakapan mengenai **akses PPM/CSR, responden menggambarkan bahwa bantuan perusahaan umumnya diperoleh melalui mekanisme proposal yang diajukan lewat pemerintah desa.** Desa dipahami sebagai pintu utama, bahkan satu-satunya, jalur menuju perusahaan.

Seorang aparat pemerintah menjelaskan bahwa **bantuan rumah ibadah hanya dapat diperoleh setelah desa menyusun permohonan resmi dan menyampaikannya ke perusahaan** (05-19FJ3). Tanpa jalur tersebut, peluang dinilai kecil. Selain itu, akses bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga terkait peran dan inisiatif aktor tertentu dalam struktur desa.

"Kalau tidak dari desa susah. "semua bergantung pimpinan" bawahan tidak" (05-19FJ3, Aparat Desa, Laki-laki)

Cerita muncul dari tokoh agama juga menceritakan bahwa masjidnya telah beberapa kali menerima bantuan material seperti semen dan bahan bangunan (05-09FJ3). Prosesnya pun tetap melalui desa, yang menyusun proposal berdasarkan kebutuhan yang disampaikan pengurus masjid

sponden lain juga menyatakan bahwa sejauh yang ia ketahui, bantuan CSR memang hanya dapat diakses melalui proposal yang difasilitasi desa, khususnya untuk bantuan rumah ibadah dalam bentuk material bangunan (05-37FJ3).

ReNamun pengalaman berbeda juga muncul. Seorang nelayan kelompok menyampaikan bahwa meskipun pernah membuat proposal ke perusahaan, ia tidak pernah menerima bantuan langsung dari CSR (05-07FJ3).

Cerita serupa disampaikan oleh seorang petani kelompok yang menyebut telah mengajukan proposal sejak 2019 untuk kebutuhan pertanian, namun hingga kini belum memperoleh respons atau bantuan (05-05FJ3).

Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa **mekanisme proposal memang menjadi jalur formal yang diakui, tetapi keberhasilannya tidak selalu dapat dipastikan.** Jalur tersebut sangat bergantung pada posisi desa sebagai perantara, serta pada proses internal yang tidak sepenuhnya terlihat oleh masyarakat.

3.4 Persepsi Ketidakmerataan Berdasarkan Wilayah (Ring 1 vs Non-Ring 1)

Dalam berbagai wawancara, **responden membandingkan manfaat PPM/CSR antara wilayah yang berada di sekitar operasional tambang (Ring 1) dengan wilayah lain seperti Fidi Jaya.** Perbandingan ini muncul ketika responden diminta menceritakan siapa yang lebih banyak merasakan program perusahaan. Seorang guru membedakan pengalaman masyarakat di sekitar tambang dengan warga Fidi Jaya (05-34FJ3).

"Dulu saat Weda Bay Nickel ada bantuan untuk masyarakat Fidi Jaya. Di sekitar lingkungan perusahaan (ring 1) ada beberapa masyarakat yang mendapat bantuan dari IWIP. Jadi masyarakat sekitar tambang yang merasakan. Tapi yang di Fidi Jaya belum merasakan manfaat dari tambang." (05-34FJ3, Guru, Perempuan, 36 Tahun)

Dalam refleksi tim peneliti, beberapa responden menyebut bahwa program CSR lebih banyak berjalan di wilayah Ring 1, sementara di sekitar Kota Weda manfaatnya lebih banyak dirasakan sebagai program pemerintah. Seorang wirausaha menyebut mengetahui ada delapan program CSR/PPM yang sudah berjalan di Ring 1, namun di Fidi Jaya "belum tersentuh." (05-36FJ3).

Seorang responden yang pernah tinggal di Lelief juga membandingkan pengalamannya. Ia menyebut bahwa **ketika tinggal di wilayah dekat perusahaan, bantuan lebih terasa, tetapi setelah pindah ke Fidi Jaya tidak lagi merasakan hal yang sama** (Refleksi Harian Tim Peneliti Fidi Jaya).

Seorang pekerja tambang menyampaikan bahwa secara aturan Kecamatan Weda Kota termasuk lingkar tambang dan tidak seharusnya dibatasi (05-41FJ3). Namun ia merasakan bahwa akses terhadap fasilitas bantuan tidak selalu terbuka bagi semua warga. Sementara itu, seorang aparat desa menjelaskan bahwa untuk seharusnya perusahaan memberikan bantuan karena Fidi Jaya berada pada ring 3 (05-14FJ3).

Cerita-cerita tersebut menggambarkan adanya perbandingan pengalaman antarwilayah. Ring 1 dipersepsikan lebih banyak menerima program, sementara Fidi Jaya dinilai belum merasakan manfaat secara setara.

3.5 Harapan Pelibatan Masyarakat yang Lebih Terbuka dalam Perencanaan dan Pengelolaan CSR/PPM

Ketika responden diminta menyampaikan harapan terhadap program CSR/PPM, isu pelibatan masyarakat muncul berulang dalam berbagai wawancara. **Mayoritas responden menyatakan belum pernah diajak terlibat dalam musyawarah maupun perencanaan program** (05-05FJ3; 05-10FJ3; 05-31FJ3).



Seorang pemilik usaha kecil menjawab singkat ketika ditanya apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program CSR: "Tidak pernah dilibatkan." (05-37FJ3). Pernyataan serupa disampaikan oleh seorang guru yang menyebut bahwa sebagai masyarakat, ia belum pernah terlibat dalam perencanaan CSR (05-39FJ3). Dalam refleksi harian tim, tercatat bahwa informasi mengenai PPM/CSR masih minim dan sulit digali; ketika ditanyakan, sebagian responden hanya mengiyakan petunjuk yang disampaikan pewawancara tanpa dapat menjelaskan lebih jauh.

Sebagian lainnya menyampaikan bahwa sosialisasi memang terlihat, tetapi keterlibatan langsung belum dirasakan. Seorang pekerja tambang menjelaskan bahwa program CSR tampak tersosialisasi, baik secara daring maupun luring, namun pemanfaatannya dan siapa penerimanya belum sepenuhnya jelas di tingkat masyarakat (05-41FJ3). Ia juga menyebut bahwa keterlibatan selama ini lebih banyak melalui perwakilan tertentu, bukan partisipasi langsung warga secara luas. Seorang petugas kesehatan menambahkan bahwa ia sendiri tidak mengetahui apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam pengelolaan dana CSR (05-44FJ3).

Dalam beberapa percakapan, muncul harapan agar masyarakat dilibatkan sejak tahap awal perencanaan. Seorang guru mencontohkan bahwa program seharusnya disesuaikan dengan karakter ekonomi lokal.
"Program yang diutamakan adalah program sesuai kebutuhan di masyarakat. Misalnya, jika presentase masyarakat Fidi Jaya basicnya adalah nelayan, maka akan banyak anggaran yang lebih mengarah untuk penguatan nelayan..." (05-39FJ3, Guru, Perempuan, 46 Tahun)

Cerita-cerita tersebut memperlihatkan bahwa **pelibatan yang diharapkan bukan hanya hadir dalam sosialisasi, tetapi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan mengetahui bagaimana program dirancang serta dijalankan.**

3.6 Aspirasi Penguatan Ekonomi Lokal dan Pengurangan Ketergantungan pada Tambang

Ketika responden diminta menyampaikan harapan terhadap program CSR/PPM ke depan, pembicaraan banyak mengarah pada kebutuhan **penguatan ekonomi yang lebih berkelanjutan.** Beberapa responden menyebut bahwa bantuan yang bersifat sekali beri dinilai kurang berdampak dibandingkan program yang memperkuat usaha masyarakat dalam jangka panjang.

Di wilayah seperti Fidi Jaya yang **sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, penguatan nelayan menjadi harapan utama.** Seorang guru yang merupakan penduduk asli di Fidi Jaya, menyampaikan bahwa program seharusnya disesuaikan dengan karakter ekonomi lokal.

"Program yang diutamakan adalah program sesuai kebutuhan di masyarakat. Misalnya, jika presentase masyarakat Fidi Jaya basicnya adalah nelayan, maka akan banyak anggaran yang lebih mengarah untuk penguatan nelayan…" (05-39FJ3, Guru, Perempuan, 46 Tahun)

Gagasan ini dijelaskan lebih konkret oleh seorang pekerja tambang. Ia menyebut bahwa tidak ada solusi lain bagi masyarakat pesisir selain kembali ke laut. Ia mengusulkan pembangunan pabrik es batu berkapasitas besar yang dapat mendukung jalur nelayan tuna yang melintasi Halmahera Tengah (05-41FJ3).

Selain perikanan, b**eberapa responden menyebut pentingnya pelatihan keterampilan bagi warga lokal.** Seorang pemilik usaha kecil mengusulkan pelatihan peningkatan skill, termasuk penguasaan bahasa asing, agar masyarakat memiliki peluang kerja di luar sektor tambang (05-42FJ3). Penguatan UMKM juga disebut, terutama bagi kelompok ekonomi rendah, lansia, dan penyandang disabilitas (05-37FJ3).

Isu lingkungan turut muncul dalam konteks keberlanjutan ekonomi. Seorang guru menyebut bahwa seharusnya ada pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemulihan bekas lahan tambang dan kontribusi yang jelas bagi daerah (05-39FJ3). Sementara itu, persoalan drainase, sampah, dan kondisi laut juga disinggung oleh responden lain, yang menilai perusahaan dapat membantu memikirkan solusi atas persoalan tersebut (05-22FJ3).

Cerita-cerita tersebut memperlihatkan harapan agar program CSR/PPM tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi mendukung usaha ekonomi yang lebih tahan lama di tengah kesadaran bahwa aktivitas tambang tidak berlangsung selamanya.



RQ4: Pemahaman dan Kesiapan Pascatambang

4.1 Kesadaran Risiko Pascatambang: Antara Memori Gebe dan Bayangan "Kota Mati"

Dalam berbagai wawancara dan diskusi kelompok, **hampir semua responden menyadari bahwa aktivitas tambang tidak berlangsung selamanya.** Ketika ditanya tentang masa setelah tambang berhenti, tidak ada yang menyatakan bahwa hal tersebut mustahil terjadi. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa fase pascatambang akan datang terasa cukup kuat. Namun kesadaran itu sering kali disampaikan dalam kalimat sederhana yang sarat makna: "siap tidak siap, harus siap." (05-38FJ3).

Kesadaran ini diperkuat oleh pengalaman dan memori kolektif tentang Pulau Gebe. Dalam beberapa wawancara, Gebe disebut sebagai contoh nyata bagaimana sebuah wilayah tambang mengalami perubahan drastis setelah operasi berhenti (05-23FJ3; 05-27FJ3; 05-28FJ3; 05-45FJ3). Seorang petani yang seumur hidup tinggal di Fidi Jaya menyampaikan dengan singkat namun tegas:

"Setelah tambang habis, habis sudah. Seperti di Gebe. Semua orang akan kembali." (05-18FJ3, Petani, Laki-laki, 67 Tahun)

Cerita tentang Gebe tidak hanya berupa gambaran umum, tetapi memuat detail mengenai fasilitas yang ditinggalkan dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Seorang aparat pemerintah yang juga penduduk asli Fidi Jaya mengingat masa kecilnya ketika Gebe masih berjaya:

"Tidak ada yang abadi, dulu pas kecil orang Gebe itu jaya. Pascatambang mati... Setelah tambang, mau makan saja susah." (05-09FJ3, Aparat Pemerintah, Laki-laki, 53 Tahun)

Istilah **"kota mati" muncul secara eksplisit** dalam beberapa percakapan (05-09FJ3; 05-52FJ3). Dalam FGD Pemuda, gambaran tersebut dijelaskan dengan ilustrasi konkret: kos-kosan kosong, pedagang kehilangan pembeli, sopir tidak lagi mendapat penumpang, dan pasar yang tidak lagi seramai sekarang. Seorang sopir organda menggambarkan situasi tersebut dengan bahasa lokal:

"Kalau misalnya tambang ini berakhir nanti akan 'ancor'... keadaan akan kembali ke awal sebelum tambang, apalagi dari segi ekonomi pendapatan akan menurun drastis." (05-45FJ3, Sopir Organda, Laki-laki, 39 Tahun)

Selain aspek ekonomi, **beberapa responden juga membayangkan dampak fisik yang tertinggal.** Seorang aparat pemerintah menyebut bahwa bangunan dan fasilitas yang tidak lagi dihuni dapat menjadi persoalan baru:

"Banyak fasilitas dan bangunan yang tidak dihuni. Akan menjadi dampak lingkungan. Bangunan yang tidak dirawat akan menjadi tantangan." (05-12FJ3, Aparat Pemerintah, Laki-laki, 34 Tahun).

Pengalaman vakum WBN pada periode sebelumnya juga disebut sebagai pengingat bahwa perlambatan ekonomi bukan sesuatu yang sepenuhnya hipotesis (05-17FJ3). Dalam konteks ini, **Gebe dan pengalaman penghentian sementara tambang berfungsi sebagai lensa historis yang membentuk cara masyarakat membayangkan masa depan.** Dengan skala aktivitas tambang yang jauh lebih besar saat ini, sebagian responden membayangkan bahwa dampaknya bisa terjadi lebih cepat dan lebih dalam jika tidak ada persiapan.

4.2 Kekhawatiran Lingkungan dan Skeptisisme terhadap Pemulihan

Selain bayangan "kota mati" dan lumpuhnya ekonomi, pascatambang juga dibicarakan melalui lensa lingkungan. Dalam berbagai wawancara, **hutan, air, dan tanah muncul sebagai simbol masa depan yang rapuh.** Kekhawatiran ini tidak disampaikan dalam nada konfrontatif, tetapi lebih sebagai kegelisahan yang reflektif.

Sejumlah responden secara langsung mengaitkan pembukaan hutan dengan meningkatnya banjir. Seorang pelayan gereja menyampaikan bahwa tanpa hutan bakau dan vegetasi penahan air, banjir menjadi lebih sering dan lebih parah dibanding masa lalu (05-15FJ3). Petani juga menyoroti wilayah yang kini rawan genangan setiap hujan, hingga berdampak pada gagal panen (05-03FJ3). Seruan "kembalikan hutan-hutan yang gundul" muncul berulang dalam percakapan (05-31FJ3; Refleksi Harian Tim).

Kekhawatiran tidak berhenti pada banjir. Beberapa responden mempertanyakan kemungkinan pemulihan lahan bekas tambang. Seorang pekerja tambang menjelaskan bahwa reboisasi mungkin dilakukan, tetapi "tidak akan kembali seperti dulu," karena seluruh lapisan tanah—subsoil dan topsoil—telah diangkat dalam proses penambangan nikel (05-41FJ3). Pemahaman serupa juga disampaikan oleh 05-20FJ3 yang berprofesi sebagai BPD dan pemilik penginapan. Menurutnya, ketika tanah permukaan telah hilang, kembali ke pertanian atau perikanan tidak sesederhana "tanam ulang."

Isu sumber air menjadi kekhawatiran yang paling sering diulang. **Kawasan hulu dan daerah tangkapan air dipandang sebagai penyangga kehidupan Kota Weda**. Seorang responden menegaskan agar perluasan tambang tidak menyentuh wilayah Kobe yang menjadi sumber air utama:

"Kalau perusahaan masuk ke arah Kobe… kesulitan air bukan hanya menunggu pasca tambang, tapi saat tambang beroperasi pun sudah terasa."(05-41FJ3, Pekerja Tambang, Laki-laki, 30 Tahun)

Dalam diskusi kelompok, **kekhawatiran ini diperluas menjadi refleksi tentang skala konsesi yang mengitari Halmahera Tengah**. Seorang peserta FGD Pemuda menggambarkan kondisi wilayah yang "diapit banyak konsesi" dan mempertanyakan masa depan lingkungan yang tersisa: "Apa yang tong punya nanti?" Gambaran ini mengaitkan pengalaman Gebe dengan kemungkinan yang dapat terulang di Weda.

Dengan demikian, pascatambang tidak hanya dibayangkan sebagai krisis ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan ekologis yang berpotensi meninggalkan lanskap rusak, sumber air tertekan, dan ruang hidup yang menyempit.



4.3 Ketidakhadiran Forum dan Perencanaan Kelembagaan Pascatambang

Meskipun kesadaran akan risiko pascatambang cukup kuat, ketika pembicaraan bergeser pada kesiapan konkret, **jawaban responden menunjukkan bahwa belum ada perencanaan yang terstruktur dan diketahui publik.** Dalam berbagai wawancara, hampir tidak ada yang mengetahui adanya forum khusus, roadmap, atau rencana resmi yang membahas transisi pascatambang.

Seorang lansia menyampaikan secara sederhana: *"Pernah sosialisasi soal pascatambang? Tidak tahu. Forum juga belum tah*u." (05-33FJ3, Perempuan, 68 Tahun)

Pernyataan serupa muncul dari tenaga kesehatan: *"Ada sosialisasi pascatambang? Belum pernah sama sekali. Perlu penglibatan masyarakat. Kalau bisa ada forum."* (05-31FJ3, Tenaga Kesehatan, Perempuan, 48 Tahun).

Guru SMP menyampaikan bahwa masyarakat belum pernah dilibatkan dalam diskusi khusus mengenai pascatambang dan menekankan perlunya pemerintah dan perusahaan "duduk bersama" membahas solusi (05-34FJ3). Seorang wirausaha bahkan menyebut perlunya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan lahan setelah tambang berhenti (05-36FJ3). **Harapan terhadap peran pemerintah daerah muncul berulang.**

"Pemda harus melakukan sosialisasi persiapan pasca tambang secara rutin…" (05-42FJ3, Pemilik Usaha Kecil, Laki-laki, 30 Tahun)

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa **hingga saat ini belum terlihat mekanisme kelembagaan yang secara sistematis dipahami masyarakat sebagai persiapan transisi pascatambang.**

4.4 Ketergantungan Ekonomi yang Tinggi terhadap Tambang dan Kerentanan Transisi

Di sisi lain, **pembicaraan mengenai kesiapan hampir selalu kembali pada satu hal: ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap tambang.** Banyak responden menyadari bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi—transportasi, kos-kosan, perdagangan, hingga pendapatan daerah—berkembang karena keberadaan industri tambang.

Seorang sopir organda menyampaikan secara langsung:
"Tidak akan siap… berkurangnya penumpang maka pendapatan juga menurun." (05-45FJ3, Sopir Organda, Laki-laki, 39 Tahun)

Pemilik usaha kecil menyebut bahwa harga kebutuhan sudah meningkat dan masyarakat sangat bergantung pada perputaran uang dari tambang (05-42FJ3). Dalam FGD Pemuda bahkan disebut bahwa kontribusi sektor tambang terhadap transaksi ekonomi dan APBD sangat dominan.

Seorang aparat keamanan menggambarkan situasi ini dalam bentuk narasi historis:
"Dulu miskin – kaya – miskin lagi tapi lebih sengsara… karena sudah biasa dengan kehidupan tambang segini, lalu setelah tambang tidak punya uang." (05-17FJ3, Aparat Keamanan, Laki-laki, 43 Tahun)

Ia juga menyebut kemungkinan meningkatnya kriminalitas akibat hilangnya sumber pendapatan. Sementara itu, pemimpin organisasi keagamaan menyatakan bahwa masyarakat sudah "keasikan" dengan keberadaan tambang (05-24FJ3).

Kemungkinan berakhirnya tambang direspon berbeda antara pendatang dengan penduduk lokal yang sudah lama menetap. Pendatang seperti pedagang buah, penjual di pasar, maupun pemilik warung yang hadir karena geliat ekonomi yang tumbuh, opsi kembali ke daerah asal muncul berulang. "Lihat keadaan, kalau sepi ya balik ke Gorontalo" (05-10FJ3). Bahkan, dalam bayangannya, ketika tambang berhenti "banyak yang pulang," karena "di sini rata-rata pendatang" (05-16FJ3). Narasi ini menunjukkan bahwa bagi kelompok non-lokal, keterikatan pada wilayah bersifat instrumental, selama ekonomi bergerak, mereka bertahan. Ketika melambat, migrasi kembali menjadi strategi rasional. Gambaran eksodus ini juga dikaitkan dengan kekhawatiran akan penurunan daya beli dan berkurangnya konsumen, sehingga kota berpotensi menjadi "sepi" atau bahkan "seperti kota mati lagi seperti di Buli" (05-25FJ3).

Namun demikian, **tidak semua pendatang melihat pulang sebagai pilihan mudah.** Ada yang telah membeli aset dan merasa memulai kembali dari nol di kampung halaman justru lebih berisiko. Seorang pendatang yang berjualan di pasar menjelaskan:

"Saya sudah beli aset di sini. Kalau balik Gorontalo akan dari 0 lagi... cenderung bertahan" (05-16FJ3, Pedagang, Laki-Laki).

Ini menunjukkan spektrum respons di kalangan pendatang sendiri, antara yang siap hengkang dan yang mulai membangun akar ekonomi baru. Meski begitu, kesadaran bahwa ekonomi lokal sangat bergantung pada tambang tetap kuat: "Semua berharap dari tambang, kalau tambang pergi 'aduh'" (05-16FJ3). Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis—ditandai dengan kekhawatiran akan pengangguran besar-besaran, turunnya pendapatan usaha, dan ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan mendadak.

Berbeda dengan pendatang, **penduduk lokal cenderung memandang pascatambang sebagai situasi yang harus dihadapi di tempat yang sama.** Berakhirnya tambang perlu direspon dengan kebutuhan persiapan termasuk penguatan sumber daya dan perekonomian lokal.

"*Harapan satu saja jangan bergantung ketika perushaan saja, jadi apa yang bisa dilakukan dari sekarang. Dan perlu dilakukan dari "awal". Untuk teman2 yang IQ tinggi bisa kembangkan, mau bikin usaha apa, pembinaan. kita tidak mungkin keluar ke kampung lagi. mau tidak mau ke pertanian*" (05-23FJ3, Penyedia Jasa, Laki-Laki).

Temuan ini menunjukkan bahwa **bukan hanya kesiapan kelembagaan yang belum terbentuk, tetapi juga struktur ekonomi yang sangat bertumpu pada tambang memperbesar potensi guncangan ketika aktivitas berhenti.**

Gambar 16. Salah satu toko tertua di Fidi Jaya yang bertahan



4.5 Aspirasi Penguatan Ekonomi Alternatif sebagai Kesiapan Sebelum Tambang Berakhir

Di tengah kesadaran bahwa aktivitas tambang tidak berlangsung selamanya, **sejumlah responden mulai membayangkan bentuk ekonomi alternatif yang dapat menopang kehidupan setelah tambang berhenti.** Aspirasi ini tidak selalu dirumuskan dalam bahasa kebijakan formal, tetapi muncul dalam bentuk gambaran konkret yang berakar pada pengalaman lokal. Seorang responden laki-laki berusia 66 tahun menegaskan bahwa "siap tidak siap harus siap" menghadapi situasi pasca tambang (05-03FJ3). Namun ia juga mengakui bahwa hingga kini belum pernah mendengar adanya forum khusus yang membahas perencanaan pasca tambang (05-03FJ3), sehingga bayangan tentang masa depan tersebut masih bersifat individual dan sporadis.

Sektor yang paling sering disebut adalah pertanian dan perikanan. Beberapa responden menyampaikan bahwa ketika tambang berhenti, masyarakat "pasti kembali berkebun dan melaut." Seorang sopir organda secara langsung mengaitkan profesinya dengan risiko tersebut: jika tambang berhenti dan penumpang berkurang, ia harus kembali bekerja seperti dulu—bertani atau melaut (05-45FJ3). Namun dalam FGD Pemuda, muncul refleksi bahwa generasi muda kini lebih terbiasa bekerja di sektor tambang dan jasa pendukungnya, sehingga kemampuan dasar bertani atau berkebun tidak lagi dimiliki secara merata.



Di sisi lain, **kondisi lahan menjadi pertimbangan serius**. Seorang responden menyoroti bahwa produksi kelapa yang dulu mencukupi kebutuhan lokal kini berkurang karena lahan berubah menjadi pemukiman; masyarakat yang sebelumnya "tara beli" kini harus membeli dari luar (05-03FJ3). Ia juga mempertanyakan, "kalau tidak ada lahan bagaimana?" dan menekankan bahwa masyarakat yang tidak memiliki lahan akan menjadi pihak yang paling terdampak (05-03FJ3). Responden lain menambahkan bahwa untuk tanaman tahunan seperti pala, cengkeh, dan cokelat, terdapat kekhawatiran bahwa lahan hanya "tinggal menunggu waktu untuk dibebaskan," sehingga keberlanjutan jangka panjang menjadi tidak pasti (05-05FJ3).

Di luar gagasan "kembali ke sektor primer", muncul pula ide penguatan ekonomi berbasis nilai tambah. Dalam berbagai wawancara dan refleksi lapangan disebutkan usulan pengembangan desa wisata, UMKM olahan hasil laut, hingga kebutuhan pabrik es untuk mendukung nelayan (05-15FJ3; 05-36FJ3; 05-41FJ3). Seorang pekerja tambang bahkan menegaskan bahwa penguatan sektor perikanan harus dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap tambang (05-41FJ3). Seorang pedagang di pasar juga memberikan gagasan:

"Membangun pabrik yang dapat mengolah kelapa menjadi minyak kelapa contohnya." (05-36FJ3, Wirausaha, Laki-Laki, 50 Tahun)

Seorang guru kembali menekankan bahwa arah **penguatan ekonomi harus berbasis pada karakter mayoritas masyarakat** (05-39FJ3). Jika masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada laut, maka dukungan seharusnya diarahkan pada penguatan sektor tersebut secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.

Di sisi lain, **sejumlah responden melihat penguatan ekonomi alternatif tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.** Seorang pemilik usaha kecil menyampaikan harapannya agar peningkatan kapasitas dimulai sejak sekarang, karena kesiapan tidak dapat dibangun secara instan (05-42FJ3). Seorang perawat juga menyebut bahwa meskipun pemulihan lahan mungkin dilakukan, kondisi tidak akan kembali sepenuhnya seperti semula, sehingga masyarakat tidak boleh terus bergantung pada tambang (05-40FJ3). Ia menekankan pentingnya membuka peluang kerja sektor non-tambang serta melanjutkan program beasiswa untuk menyiapkan generasi muda. Seorang pemuda mantan pekerja tambang yang membuka usaha menjelaskan:

"Harapannya SDM yang ada sudah siap dan mau tidak mau harus di mulai peningkatan SDM dari sekarang." (05-42FJ3, Penjual Es Batu, Laki-Laki, 30 Tahun)

Namun aspirasi tersebut juga disertai pengakuan bahwa kesiapan saat ini masih rendah. Seorang pekerja tambang dengan tegas menyatakan:
"Tidak bisa, belum bisa! Mereka belum siap dengan itu." (05-41FJ3, Pekerja Tambang, Laki-Laki, 30 Tahun).

Dalam diskusi kelompok, **beberapa peserta menegaskan bahwa pelatihan keterampilan tidak boleh bersifat sesaat.** Penguatan ekonomi dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan—baik melalui pelatihan kewirausahaan, penguasaan keterampilan digital, maupun pengembangan usaha kecil yang terarah.

Dalam sejumlah wawancara, terlihat bahwa **sebagian kecil pemuda dan individu yang aktif dalam ruang-ruang desa mulai memikirkan pascatambang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.** Seorang responden muda menyampaikan bahwa pascatambang adalah sesuatu yang "tidak bisa dimungkiri" dan karenanya perlu dipersiapkan melalui penguatan pendidikan dan akses terhadap sumber ekonomi produktif. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program beasiswa serta penyediaan lahan agar masyarakat tetap memiliki basis ekonomi ketika tambang tidak lagi beroperasi (05-38FJ3).

Nada serupa muncul dari seorang penduduk asli di Fidi Jaya yang menyoroti **pentingnya pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan.** Ia menilai bahwa hingga kini belum ada sistem yang secara konsisten membina pemuda, seperti model karang taruna dengan pembinaan rutin dan terstruktur (05-20FJ3). Bagi responden ini, kesiapan pascatambang tidak cukup dengan bantuan sesaat atau proyek jangka pendek, melainkan memerlukan sistem penguatan kapasitas yang berkelanjutan.



Pembahasan



RQ 1: Apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, dan bagaimana perubahan ini terjadi dari sebelum tambang beroperasi hingga saat ini?

Meskipun Fidi Jaya terletak cukup jauh dari pusat tambang, namun Mmasuknya industri pertambanganpengolahan nikel secara masifh di Halmahera Tengah sejak 2018 telah mengubah lanskap sosial-ekonomi di Fidi Jaya. Temuan penelitian menujukkan bahwa perubahan tidak berlangsung secara tunggal atau linear, namun membentuk lima pola dinamis yang saling terkait: lonjakan aktivitas ekonomi berbasis tambang (boom cycle), kenaikan harga yang mengikis daya beli kelompok rentan, kompleksitas dinamika sosial yang meningkat tajam, lemahnya penegakan aturan yang memperparah kondisi tersebut, tekanan lingkungan yang semakin nyata, serta mekanisme pengaduan yang belum berfungsi efektif.

Penjelasan Pola Teridentifikasi

Pola 1: Lonjakan Aktivitas Ekonomi dan Manfaat Turunan Dari Ekonomi Tambang

Meski Fidi Jaya tidak masuk wilayah pusat operasi pertambangan nikel, lonjakan ekonomi yang terjadi merupakan efek turunan yang timbul dari uang beredar di pusat tambang yang mengalir ke Fidi Jaya melalui pendatang. Fidi Jaya mengalami peningkatan arus pendatang seperti Gorontalo, Manado, dan Bugis, tumbuhnya permintaan jasa transportasi dan hunian, meluasnya aktivitas perdagangan, dan naiknya daya beli sebagian masyarakat.

. Populasi Fidi Jaya melonjak dari 3.715 jiwa pada 2017 menjadi 17.052 jiwa pada 2024, hampir lima kali lipat dalam tujuh tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya kondisi indirect employment multiplier, dimana setiap pekerjaan langsung di sektor ekstraktif berpotensi menciptakan beberapa pekerjaan tambahan di sektor jasa dan perdagangan lokal (Moretti, 2010). Di samping itu, perubahan yang terjadi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, dari kondisi desa yang digambarkan "tenang" dan "biasa-biasa saja" menuju keramaian dan perputaran uang yang jauh lebih tinggi dalam 7-8 tahun terakhir.

Dalam kerangka keadilan distributif, pola ini menghasilkan manfaat bagi beberapa kelompok khususnya masyarakat pendatang ataupun penduduk asli yang memiliki akses terhadap modal dan keterampilan untuk memanfaatkan peluang seperti membuka kos, lapak berjualan, atau akses ke rantai jasa, serta pemuda lokal Fidi Jaya yang mampu bersaing untuk bekerja di pertambangan. Namun, manfaat dari lonjakan aktivitas ekonomi ini tidak dirasakan oleh kelompok-kelompok yang tidak terhubung dengan rantai ekonomi tambang, terutama nelayan yang justru menanggung beban dari penurunan kualitas air dan kenaikan harga-harga.

Di tambah lagi**, lonjakan kegiatan ekonomi (boom) biasa diiring oleh kemunduran ekonomi atau bust (Auty, 1993)** dimana bagi masyarakat Fidi Jaya kekhawatiran ini muncul dari perkembangan wilayah yang lebih dekat dengan industri tambang seperti Lelilef dan Gemaf yang berdampak terhadap penurunan permintaan kos-kosan maupun bahan makanan yang dirasakan masyarakat Fidi Jaya. Di mata pencaharian lain, seperti nelayan, mereka yang harus melaut 30 mil untuk mendapatkan hasil yang dulu bisa diperoleh dalam 2–3 mil tidak memiliki kapasitas untuk memulihkan diri selama ekologi laut belum membaik, dan tanpa data bantuan dari pemerintah, seperti data pemulihan kualitas air laut.

Pola 2: Kenaikan Harga Sebagai Akibat Dari Peningkatan Aktivitas Ekonomi

Adanya lonjakan aktivitas ekonomi di Fidi Jaya menyebabkan **peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli sebagian kelompok justru mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok** yang mengikis kesejahteraan kelompok lain ketika lonjakan harga tidak diirigi peningkatan pendapatan. Kontradiksi ini terbentuk dari daya beli yang naik di satu kelompok, misalnya pekerja tambang, mendorong penyesuaian harga pasar ke atas, yang kemudian memukul kelompok lain yang pendapatannya tidak ikut naik, seperti nelayan. Selain itu, absensi mekanisme penertiban harga dari pemerintah daerah menyebabkan dinamika pasar berjalan tanpa koreksi.

Pola ini paling relevan dibaca melalui dimensi keadilan distributif: manfaat dari lonjakan ekonomi tidak terdistribusi secara proporsional terhadap beban yang ditanggung, dan kelompok yang paling menanggung beban kenaikan harga adalah mereka yang paling jauh dari rantai manfaat tambang, perempuan mengurus rumah tangga, rumah tangga miskin, dan nelayan

Pola 3: Dinamika sosial yang semakin kompleks di tengah industri ekstraktif yang masif

Lonjakan penduduk mengubah komposisi sosial desa secara mendasar dan memunculkan dinamika yang sebelumnya tidak dikenal. Sebelum 2018, penduduk Fidi Jaya relatif homogen, artinya didominasi warga lokal yang saling mengenal, terikat jaringan kekeluargaan, dan berbagi norma sosial yang sama. desa mengalami lonjakan penduduk hampir lima kali lipat akibat aktivitas industri tambang yang terletak 25–30 km dari desa, menyerap ribuan pendatang dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Secara spasial, Fidi Jaya tampak tersegregasi dimana penduduk asli di pesisir selatan dan perbukitan utara, pendatang di kawasan rawa yang dikonversi. Pola yang muncul bersifat berlapis: pada satu sisi, praktik sosial yang selama ini menjadi perekat komunitas seperti gotong royong, berkumpul, musyawarah, mengalami pelemahan. Di sisi lain, persoalan sosial baru yang sebelumnya lebih diasosiasikan dengan kota besar mulai hadir di Fidi Jaya, seperti pencurian, lokalisasi, dan meskipun dinyatakan jarang namun terjadi, konflik antar suku.

Dinamika ini dapat dipahami menggunakan dua dimensi keadilan, yaitu keadilan rekognisi, karena nilai-nilai lokal dan komunitas asli tidak diakui dan dilindungi dalam proses ekspansi industri yang cepat; dan keadilan distributif, karena beban dari kompleksitas sosial ini, seperti rasa tidak aman, risiko kriminalitas tekanan pergaulan, tidak ditanggung secara merata, melainkan lebih berat dipikul oleh perempuan, anak muda, dan warga yang tidak memiliki modal sosial untuk melindungi diri.

Pola ini dapat dipahami melalui konsep social disruption theory (Freudenburg, 1984; Jacquet, 2014) yang menjelaskan **bagaimana pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akibat industri ekstraktif melemahkan kapasitas komunitas lokal untuk mempertahankan kohesi sosialnya**. Hal ini mengakibatkan kontrol sosial informal, yang sebelumnya menjadi mekanisme utama pengelolaan perilaku, melemah secara struktural. Falsafah fagogoru, baku sayang, baku hormat, dan baku hargai, yang sebenarnya masih diakui sebagai ideal namun semakin sulit dijalankan dalam praktik sehari-hari karena komposisi sosial yang semakin heterogen. Ini bukan sekadar pergeseran budaya organik, melainkan erosi yang dipercepat oleh absensi kebijakan sosial yang seharusnya mengantisipasi dampak migrasi masif dan terhubung langsung dengan Pola 5 di mana kompleksitas sosial yang semakin tinggi justru tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas tata kelola keamanan dan sosial.

Box 2 : Skenario kritis Fidi Jaya dalam pengabaian dampak turunan kegiatan ekstraktif

Dalam jangka panjang, dan ini adalah **skenario yang paling kritis, Fidi Jaya berisiko mengalami apa yang dalam literatur post-extractive communities disebut sebagai double dispossession** (Freudenburg, 1992; Arsel, Adaman & Saad-Filho, 2021): pertama dirampas oleh *boom* yang tidak merata manfaatnya, kemudian ditinggalkan oleh bust yang meninggalkan bekas luka ekologis, sosial, dan ekonomi yang jauh lebih dalam dari kondisi sebelum tambang hadir. Pengalaman Pulau Gebe, yang disebut berulang kali oleh warga Fidi Jaya sendiri sebagai bayangan masa depan yang mereka takutkan, memberikan preseden yang sangat konkret untuk skenario ini: desa yang dulu ramai seperti "kota kecil" kini menjadi "monumen penghancuran" (Project Multatuli, 2024) setelah Antam keluar dan meninggalkan ekosistem yang bangkrut tanpa mekanisme pemulihan yang memadai.

Pola 4: Tekanan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Turunan dari Industri Ekstraktif

Dampak lingkungan yang terjadi di Fidi Jaya merupakan efek multiplier dari kegiatan pertambangan dan turunannya. Sebagai contoh, masuknya tambang mendorong konversi lahan kebun dan rawa menjadi permukiman, fasilitas ekonomi, dan infrastruktur pendukung industri. Hilangnya tutupan lahan, termasuk rawa-rawa yang sebelumnya berfungsi sebagai area resapan air, secara langsung berkontribusi pada meningkatnya frekuensi banjir yang dilaporkan warga. Tekanan lingkungan lainnya adalah pencemaran udara dan air yang bersumber dari aktivitas tambang dan transportasi material yang melalui jalan utama.

Puskesmas Lelilef yang didokumentasikan oleh Climate Rights International (2025) mengkonfirmasi tren ini secara lebih sistematis, dengan kasus ISPA yang melonjak dari 434 pasien pada 2020 menjadi 10.579 pasien pada 2023. Selain itu, degradasi ekosistem pesisir dan laut yang dirasakan paling tajam oleh nelayan. Meskipun hubungan kausal antara aktivitas tambang dan penurunan hasil tangkapan ikan belum dapat dipastikan secara definitif dari data yang tersedia, karena ada kemungkinan faktor lain seperti intensifikasi penangkapan akibat meningkatnya permintaan, fakta bahwa sebagian pasokan ikan untuk Fidi Jaya kini dipasok dari Wailolo mengindikasikan bahwa perubahan ekologis di perairan.

Pola ini dijelaskan dalam environmentalism of the dispossessed, kondisi di mana kelompok yang paling bergantung pada ekosistem lokal untuk penghidupannya menjadi yang pertama dan paling keras merasakan degradasi lingkungan, namun memiliki kapasitas paling kecil untuk melawan atau mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut (Arsel, Pellegrini & Mena, 2019). Dalam kaitannya dengan kerangka keadilan, tekanan lingkungan ini paling tepat dibaca melalui dua dimensi keadilan sekaligus. Dari perspektif keadilan distributif, beban lingkungan tidak terdistribusi secara merata: nelayan yang penghidupannya paling bergantung pada sumber daya alam menanggung beban terbesar, sementara kelompok yang menikmati manfaat ekonomi terbesar, pelaku jasa dan perdagangan, relatif terlindung dari dampak langsung. Dari perspektif keadilan rekognisi, perubahan ekologis yang dirasakan warga, termasuk hilangnya sagu, berubahnya kondisi laut, dan meningkatnya banjir, merupakan kehilangan atas relasi dengan alam yang selama ini menjadi bagian dari identitas dan cara hidup komunitas.

Pola 5: Arsitektur Penegakan dan Pengaduan Yang Belum Efektif Berfungsi

Kompleksitas dinamika sosial dan lingkungan tidak terjadi dalam ruang kosong, namun terjadi akibat keterbatasan struktural, yaitu melalui lemahnya penegakan aturan dari atas ke bawah maupun tidak berfungsinya mekanisme pengaduan dari bawah ke atas. Keduanya membentuk satu tantangan keadilan prosedural yang saling mengunci — ketika pengaduan tidak efektif, tidak ada tekanan yang mendorong penegakan; ketika penegakan tidak berjalan, tidak ada insentif bagi warga untuk percaya bahwa menyampaikan keluhan akan menghasilkan perubahan. Persoalan intinya bukan ketiadaan aparat atau forum: Babinsa berpatroli, musyawarah desa tersedia. Persoalannya adalah efektivitas substantif — patroli lebih berfungsi sebagai dokumentasi daripada penyelesaian masalah, sementara forum tidak dipahami dan tidak diakses secara merata oleh sebagian besar warga. Di sisi penegakan, persoalan yang seharusnya ditangani jalur formal biasanya dibiarkan berlarut, seperti pendatang yang enggan melapor hingga penyelesaian konflik secara informal. Selain itu, muncul kecurigaan akan indikasi bahwa sebagian usaha bermasalah terlindungi oleh relasi kuasa informal yang melibatkan oknum tertentu. Akibatnya, terdapat normalisasi dari tindakan kriminalitas dan lokalisasi yang meningkat yang menunjukkan seberapa dalam absensi sistem di masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Fidi Jaya merupakan hasil dari tiga faktor yang saling menopang. Pertama, kapasitas pemerintah desa dan aparat keamanan level lokal jauh melampaui batas kemampuannya untuk merespons kompleksitas sosial yang tumbuh jauh lebih cepat dari pertumbuhan kapasitas institusi. Andrews, Pritchett & Woolcock (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat meninggalkan kapasitas tata kelola jauh di belakang. Kedua, status IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 secara de facto menciptakan iklim di mana pemerintah daerah dan aparat lokal memiliki insentif yang sangat kecil untuk menegakkan aturan yang berpotensi mengganggu kelancaran operasi industri atau ekosistem bisnis yang mengelilinginya. Ketiga, kesenjangan informasi yang struktural, di mana informasi tentang hak-hak warga, mekanisme pengaduan yang tersedia, dan dampak tambang yang diantisipasi hanya mengalir melalui jaringan tokoh-tokoh tertentu. Kondisi ini dijelaskan oleh McGoey (2012) sebagai strategic ignorance, di mana absensi informasi berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang mempertahankan status quo.

Implikasi dan respon yang diperlukan

Berikut merupakan beberapa poin-poin tindak lanjut[1] yang dapat digunakan dalam penyelesaian berbagai persoalan sebagai akibat ekspansi industri pertambangan yang masif di Fidi Jaya:



- **Distribusi manfaat dari kegiatan industri ekstraktif**
  - Penyusunan rencana kapasitas ekonomi yang antisipatif dan berbasis proyeksi pertumbuhan jangka menengah
  - Kebijakan distribusi manfaat ekonomi yang eksplisit, termasuk target tenaga kerja lokal yang terukur dan mekanisme pemantauannya

- **Koreksi kenaikan harga**
  - Penertiban harga kebutuhan pokok melalui survei harga berkala oleh Disperindag Halteng
  - Penyusunan mekanisme stabilisasi harga yang responsif terhadap dinamika pasar pasca gajian pekerja tambang
  - Sosialisasi yang jelas kepada warga tentang hak mereka atas mekanisme penertiban harga dan ke mana keluhan terkait harga dapat disampaikan

- **Antisipasi dinamika sosial**
  - Penguatan tata kelola keamanan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tidak hanya aparat keamanan tetapi juga pemerintah desa, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, khususnya untuk penertiban usaha hiburan malam
  - Pengembangan wadah kepemudaan yang terlembagakan sebagai ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pengawasan dampak industri di tingkat desa
  - Pelembagaan falsafah fagogoru sebagai prinsip tata kelola desa yang eksplisit dalam RPJMDes

- **Peningkatan penegakan dan pengaduan**
  - Pembentukan forum pengaduan yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti di level desa
  - Penguatan sosialisasi dampak dan manfaat tambang secara inklusif dan terdokumentasi, tidak hanya melalui jaringan tokoh atau media sosial informal

- **Meminimaslisir dampak lingkungan sebagai akibat kegiatan industri ekstraktif dan kegiatan turuananya**
  - Penguatan sektor lokal yang berbasis sumberdaya alam
  - Normalisasi drainase dan jalur aliran air di wilayah rawan banjir melalui koordinasi Dinas PU Halteng dan pemerintah desa
  - Pemantauan kualitas air laut, sungai, dan udara secara berkala dan transparan oleh DLH Halteng dengan hasil yang dapat diakses publik

RQ 2: Bagaimana kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terdampak tambang, serta bagaimana proyeksi kebutuhannya untuk mengatasi kesenjangan tersebut?

Kondisi layanan dasar di Fidi Jaya memiliki peningkatan yang nyata, namun juga teridentifikasi sebuah kesenjangan kebutuhan akibat lonjakan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa ketidakmerataan ini tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola yang dapat diidentifikasi: mereka yang tinggal di kawasan dengan infrastruktur lebih baik, memiliki jaringan sosial ke aparat dan tokoh desa, serta memiliki modal awal untuk merespons program yang tersedia cenderung menikmati manfaat lebih besar, sementara warga di kawasan padat bekas rawa, perempuan nelayan tanpa koneksi, dan pendatang tanpa status kependudukan lokal menanggung beban terbesar dari pertumbuhan yang tidak merata. Enam pola yang dibahas akan menelusuri bagaimana kondisi ini terbentuk, mengapa ia bertahan, dan apa implikasinya bagi keberlanjutan layanan dasar di Fidi Jaya setelah tambang berakhir.

Penjelasan Pola-pola Teridentifikasi

Pola 6: Terdapat peningkatan kapasitas dan kualitas layanan dasar secara umum dan kekhawatiran masa depan

Terdapat kontradiksi yang menjadi benang merah dari narasi warga Fidi Jaya tentang layanan dasar: peningkatan nyata terjadi di berbagai sektor, misalnya listrik lebih stabil, jalan beraspal, fasilitas kesehatan bertambah, pendidikan gratis hingga jenjang tinggi, namun peningkatan tersebut tertinggal dari laju pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat.

Tekanan ini paling terasa pada drainase dan sanitasi di permukiman bekas rawa, sistem air PAM yang sering macet atau keruh, serta fasilitas kesehatan yang menghadapi antrean semakin panjang dengan keterbatasan tenaga medis. Dalam kerangka keadilan distributif, beban dari kesenjangan ini tidak ditanggung secara merata, warga di kawasan bekas rawa, kelompok tanpa akses layanan swasta, dan pendatang tanpa KTP lokal menanggung dampak paling besar dari kapasitas layanan yang tidak memadai.

Kesenjangan ini berakar dari perencanaan infrastruktur yang dirancang untuk desa berskala kecil, bukan untuk kota kecil semi-perkotaan yang tiba-tiba hadir dalam lima tahun. Konversi lahan bekas rawa menjadi kawasan terbangun yang minim resapan air memperburuk kondisi ini, sehingga genangan dan banjir lebih sering terjadi. Bryceson & MacKinnon (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan mendadak akibat industri ekstraktif umumnya tidak diikuti kapasitas fiskal dan teknis yang cukup dari pemerintah daerah , respons lebih bersifat reaktif daripada antisipatif, tercermin dari perbaikan gorong-gorong dan jalan yang baru berjalan setelah tekanan sudah terasa

Merujuk pada pengalaman Pulau Gebe, infrastruktur yang dibangun pada era tambang cenderung melayani kepentingan industri, bukan keberlanjutan komunitas, ketika tambang pergi, fasilitas kehilangan fungsi dan pemeliharaannya tanpa jaminan keberlanjutan. Ini adalah persoalan keadilan restroratif, yakni siapa yang bertanggung jawab memastikan layanan dasar tetap berfungsi setelah industri berakhir belum terjawab dalam perencanaan yang ada. Ketika tambang berakhir dan APBD yang didominasi penerimaan tambang menyusut, sistem layanan, termasuk program kesehatan gratis yang sangat diandalkan warga, akan menghadapi tekanan yang berbeda namun tidak kalah beratnya, sementara kelompok yang sudah menanggung beban terberat saat ini tidak memiliki kapasitas tambahan untuk menyerapnya.

Pola 7: Krisis Air dan Kerentanan Lingkungan Sebagai Tantangan Dari Pertumbuhan Fidi Jaya

Air bersih[5] menjadi salah satu sektor yang belum menunjukkan perbaikan yang diakui secara luas, dan persoalannya bersifat spasial: warga di kawasan tanah lama dengan sumur menikmati sumber air yang relatif stabil, sementara warga di kawasan bekas rawa bergantung sepenuhnya pada PAM[6] yang sering macet dengan kualitas air berwarna kuning. Ancaman yang lebih struktural muncul dari rencana ekspansi tambang ke kawasan Kobe-Sidanga dan Gunung Akejira, sumber air pertahanan utama wilayah Weda yang berpotensi memperparah krisis air secara permanen. Ini menjadi titik kritis yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat: ketika sumber air terganggu, tidak ada program bantuan atau mekanisme pengaduan yang dapat menggantikan fungsinya.

Pola ini dapat dibaca dalam tiga dimensi keadilan: keadilan distributif karena beban krisis air paling berat ditanggung warga di kawasan bekas rawa: keadilan rekognisi karena kebutuhan kelompok ini tidak diakui dalam perencanaan infrastruktur yang ada; dan keadilan restoratif karena ancaman terhadap sumber air dari ekspansi tambang membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang hingga kini belum ada.

Krisis air yang terjadi di Fidi Jaya terjadi, salah satu alasanya adalah konversi ekosistem rawa yang masif dan tidak terencana dengan baik. Lapisan tanah rawa yang sebelumnya berfungsi sebagai filter alami digantikan oleh bangunan dan pengerasan yang mengubah dinamika hidrologi kawasan secara mendasar. Selain itu, tekanan permintaan melampaui kapasitas sistem PAM yang dirancang untuk populasi jauh lebih kecil, sehingga kemacetan dan penurunan kualitas adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari pertumbuhan yang tidak terencana. Ekspansi industri ekstraktif juga menjadi ancaman terhadap sumber air hulu. Berbeda ari infrastruktur fisik yang bisa dibangun ulang, sumber air yang hilang akibat perubahan fungsi kawasan tangkapan air tidak dapat dipulihkan dalam skala waktu yang bermakna. Dalam kerangka McCauley & Heffron (2018), absensi perlindungan sumber air dari ekspansi industri merupakan persoalan restorative justice yang melampaui kerugian individual, artinya tanggung jawab antargenerasi yang belum memiliki mekanisme pemenuhannya.

[5] kualitas air sumur dan PAM di Fidi Jaya dari DLH Halteng atau hasil uji laboratorium
[6] data cakupan jaringan PAM per dusun di Fidi Jaya dari PDAM Halteng

Pola 8: Mekanisme Akses Program Bantuan yang Cenderung Eksklusif

Di balik ketersediaan program bantuan yang secara administratif cukup beragam, misalnya bantuan perikanan, bibit pertanian, hingga UMKM dan RLH, **akses terhadap manfaat tidak ditentukan oleh kebutuhan, melainkan oleh posisi seseorang dalam dua sistem yang bekerja bersama.** Pertama, mekanisme kelompok-proposal yang menjadi prasyarat administratif hampir semua program: dalam praktiknya menghasilkan kelompok musiman dan oportunistik yang muncul ketika ada program dan bubar setelahnya, sementara kelompok yang sudah aktif justru kesulitan karena hambatan administratif. Kedua, jaringan relasi sosial-kekeluargaan, seperti kekerabatan, afiliasi keagamaan, dan kedekatan dengan aparat, yang menentukan siapa mendapat informasi lebih awal, siapa masuk dalam daftar penerima, dan siapa keluhannya lebih cepat ditanggapi. Arsitektur ini menempatkan pendatang, perempuan nelayan, dan petani lokal tanpa koneksi di posisi paling jauh dari manfaat. Pola ini menyentuh dua dimensi keadilan: keadilan distributif karena manfaat tidak terdistribusi berdasarkan kebutuhan melainkan posisi jaringan sosial; dan keadilan rekognisi karena kelompok yang paling membutuhkan tidak diakui sebagai subjek yang berhak secara setara. Dimensi gender menjadi contoh paling konkret: perempuan nelayan aktif melaut namun bantuan perikanan lebih banyak mengalir ke laki-laki, sementara program kapasitas perempuan dari DP3A masih bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan Dinas Perikanan maupun Disnaker.

Eksklusivitas ini terbentuk dari tiga kondisi struktural. Pertama, kesenjangan antara desain formal dan realitas lapangan: model kelompok-proposal tidak mempertimbangkan bahwa sebagian besar warga Fidi Jaya yang berhak mendapat bantuan tidak terorganisasi dalam kelompok. Petani tanaman tahunan seperti pala dan cengkeh tidak cocok dengan model yang dirancang untuk komoditas musiman; nelayan dengan pola kerja individual sulit dipaksakan ke struktur kolektif; dan pendatang tanpa jaringan lokal hampir tidak mungkin membentuk kelompok yang diakui aparat desa. Kedua, program yang tidak bereskalasi: pelatihan yang ditawarkan dari tahun ke tahun cenderung sama tanpa peningkatan ke jejaring pemasaran, akses modal, atau integrasi ke rantai suplai lokal. Akibatnya, kelompok yang sama terus muncul bukan karena membutuhkan atau mengalami peningkatan kapasitas, melainkan karena sudah terhubung dengan jaringan informasi program. Ketiga, nilai kekeluargaan yang bertransformasi dari perekat sosial yang inklusif menjadi mekanisme seleksi yang eksklusif dalam konteks Fidi Jaya yang semakin heterogen. Hal ini berkaitan langsung dengan erosi nilai fagogoru yang dibahas lebih lanjut di Pola 10. Li (2007) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dirancang dari atas cenderung mereproduksi hierarki sosial yang sudah ada, bukan karena ada kesengajaan, melainkan karena mekanisme distribusinya tidak dirancang untuk mengintervensi struktur kekuasaan lokal yang berlaku.



Pola 9: Kesenjangan Informasi dan Partisipasi: Ketika Masyarakat Tidak Tahu Apa yang Tidak Mereka Tahu

Temuan menunjukkan kesenjangan informasi yang sistematis antara apa yang diputuskan aparat desa dengan apa yang benar-benar sampai ke warga. Secara prosedural, mekanisme perencanaan seperti musyawarah dusun dan desa tersedia, namun pengalaman warga terhadap pelibatan tidak merata. Informasi program disampaikan secara lisan tanpa papan informasi yang memadai, sehingga seorang warga bisa mendapat informasi bantuan hanya karena kebetulan berada di warung pada waktu yang tepat. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis komunikasi: mereka yang berada dalam jaringan informasi tertentu seperti aktif di masjid, satu gereja dengan aparat, atau dikenal tokoh tertentu mendapat akses lebih awal dan lebih lengkap, sementara yang berada di luar jaringan tidak hanya tidak mendapat informasi tetapi bahkan tidak menyadari bahwa ada informasi yang mereka lewatkan. Ini adalah kegagalan keadilan prosedural yang mendasar: bukan hanya forum yang tidak inklusif, melainkan prasyarat partisipasi yang bermakna yaitu akses informasi yang setara yang tidak terpenuhi. Kondisi ini tidak bersifat statis karena seiring bertambahnya pendatang yang tidak terhubung ke jaringan komunitas apapun, semakin besar proporsi warga yang berada di luar jangkauan informasi.

Pola ini terbentuk dari tiga faktor yang saling menopang. Pertama, kapasitas administratif pemdes yang belum memadai untuk mengelola skala dan heterogenitas desa yang berkembang sangat cepat: pemdes yang sebelumnya melayani desa kecil dengan populasi homogen kini menghadapi lebih dari 17.000 jiwa tanpa penambahan kapasitas yang proporsional. Meskipun kepala desa disebut aktif di media sosial, ini bersifat personal dan tidak terstruktur sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang sudah mengetahui nama akun pribadinya, berbeda dengan desa Were yang sudah lebih mandiri secara digital. Kedua, ketergantungan pada kanal komunikasi berbasis komunitas seperti masjid dan gereja yang dalam desa homogen bekerja efektif, namun di Fidi Jaya yang heterogen justru memproduksi fragmentasi: seseorang yang hanya aktif di gereja baru mendapat informasi pada hari Minggu meskipun informasi tersebut sudah beredar sejak Senin. Ketiga, insentif struktural yang ambigu di sisi penyelenggara informasi: transparansi informasi yang lebih luas berarti transparansi anggaran yang lebih luas pula, yang tidak selalu menguntungkan pihak yang saat ini mengontrol aliran informasi dan manfaat. Kondisi ini terhubung langsung dengan Pola 8 tentang eksklusivitas akses program, serta dengan Pola 5 tentang mekanisme pengaduan yang belum berjalan efektif: ketika informasi tentang hak dan program tidak mengalir merata, kemampuan warga untuk mengenali hak mereka untuk mengadu dan mekanisme untuk melakukannya juga terhambat.

Pola 10: Infrastruktur Modern, SDM yang Tertinggal, dan Erosi Nilai Sosial: Ketika Kemajuan Fisik Melampaui Kesiapan Manusia dan Komunitas

Salah satu fenomena yang terjadi di Fidi Jaya adalah kesenjangan antara kemajuan infrastruktur fisik dan kesiapan sumber daya manusia serta ketahanan nilai sosial komunitas. Kemajuan infrastruktur diakui, seperti jalan beraspal, listrik stabil, papan tulis digital di sekolah, fasilitas kesehatan yang berkembang, namun kehadiran infrastruktur modern tidak otomatis menghasilkan kapasitas untuk memanfaatkannya secara optimal. Papan tulis digital dimanfaatkan hanya sebagai pengganti papan tulis konvensional, sementara perahu fiber bantuan dalam beberapa kasus rusak hanya satu hingga dua bulan setelah diterima. Kondisi ini mencerminkan apa yang Chambers (1997) sebut sebagai intervensi yang didorong oleh ketersediaan program dan anggaran, bukan oleh kesiapan dan kebutuhan penerima. Di sisi nilai sosial, erosi nilai fagogoru, falsafah baku sayang, baku hormat, baku hargai yang menjadi fondasi relasi sosial dan penyelesaian konflik, semakin tidak digunakan sebagai panduan tata kelola desa secara eksplisit. Pola ini dapat dibaca dalam kerangka keadilan rekognisi: hilangnya fagogoru sebagai sistem nilai yang aktif mencerminkan kegagalan pembuat kebijakan dalam mengenali dan melindungi sumber daya sosial yang paling dibutuhkan komunitas justru ketika desa semakin heterogen.

Pola ini terbentuk dari tiga faktor yang saling menopang.

Pertama, ritme pembangunan yang tidak sinkron: infrastruktur fisik memiliki siklus cepat dan terukur sementara pembangunan kapasitas manusia membutuhkan waktu lebih panjang dan hasilnya tidak mudah diukur dalam laporan, sehingga investasi pada yang pertama secara alami mendapat prioritas lebih tinggi.

Kedua, fragmentasi program pengembangan kapasitas: program pelatihan dari Disnaker cenderung sektoral dan berulang tanpa eskalasi, sementara koordinasi lintas dinas belum berjalan terintegrasi. Akibatnya tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan kapasitas SDM secara holistik karena setiap dinas bekerja dalam silonya masing-masing.

Ketiga, absensi pelembagaan nilai lokal dalam kebijakan formal: tanpa pelembagaan yang eksplisit, fagogoru tetap menjadi nilai personal yang bergantung pada karakter individu pemimpin, bukan sistem yang bekerja terlepas dari siapa yang memegang jabatan. Kondisi ini terhubung langsung dengan Pola 3 tentang erosi kohesi sosial dan Pola 14 dan Pola 16 tentang risiko pascatambang: komunitas yang tidak berhasil mempertahankan kapasitas SDM.

Implikasi dan respon yang diperlukan

Berdasarkan dari uraian kondisi dan kesenjangan layanan dasar di Fidi Jaya, berikut beberapa gagasan tindak lanjut:

- **Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memunuhi lonjakan kebutuhan**
  - Penyusunan rencana kapasitas infrastruktur yang antisipatif dan berbasis proyeksi pertumbuhan penduduk jangka menengah
  - Penguatan infrastruktur lingkungan, seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan permukiman di kawasan padat bekas rawa, sebagai prioritas yang setara dengan infrastruktur jalan dan listrik
  - Penambahan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan secara terencana

- **Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih**
  - Perlindungan kawasan tangkapan air, termasuk kawasan Gunung Akejira, dari ekspansi konsesi tambang
  - Pengembangan sistem pengelolaan air terintegrasi: rehabilitasi fungsi hidrologi kawasan bekas rawa, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi PAM, dan rencana sumber air alternatif jangka panjang

- **Membangun mekanisme akses program yang inklusif**
  - Redesain mekanisme distribusi bantuan yang memungkinkan akses individual bagi kelompok yang tidak cocok dengan model kelompok, khususnya nelayan perempuan dan petani tanaman tahunan seperti pala dan cengkeh.
  - Penerapan afirmasi gender yang terukur dalam distribusi bantuan perikanan dan pertanian.
  - Upgrading kualitas dan jenis bantuan secara bertahap untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat komoditas lokal non ekstraktif.
  - Penyediaan ekosistem usaha yang mendukung UMKM dan pendampingan usaha berkelanjutan.



- **Meningkatkan akses informasi dan partisipatif**
  - Pembentukan sistem komunikasi publik desa yang terstruktur.
  - Penguatan kapasitas digital perangkat desa melalui pendampingan.

- **Peningkatan Kapasitas dan Proses Pelembagaan Nilai Lokal**
  - Pelembagaan fagogoru sebagai prinsip tata kelola desa yang eksplisit dalam RPJMDes dan peraturan desa.
  - Sinergi program bantuan dan kapasitas penerima.
  - Integrasi program pengembangan SDM lintas dinas.

Topik 3: Sejauh mana efektivitas program PPM dalam memperkuat layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana mekanisme evaluasinya selama ini?

Temuan terkait program PPM/CSR di FIdi Jaya diakui keberadaanya oleh sebagian orang, terutama melalui bantuan beasiswa pendidikan, material rumah ibadah, dan respons darurat seperti banjir. Namun di balik pengakuan tersebut, muncul tiga pola yang menjelaskan mengapa manfaat program tidak dirasakan secara merata: pertama, akses terhadap program yang bergantung pada posisi seseorang dalam jaringan sosial dan kelembagaan desa; kedua, perubahan mekanisme penyaluran CSR yang saat ini melalui pemerintah daerah membuat warga sulit mengenali sumber bantuan dan menuntut akuntabilitasnya; dan ketiga, distribusi program secara geografis lebih terkonsentrasi di wilayah Ring 1, sementara Fidi Jaya berada di wilayah Ring 3. Ketiga pola ini saling terkait karena tidak adanya mekanisme perencanaan, penyaluran, dan evaluasi program yang transparan dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Penjelasan Pola-pola Teridentifikasi

Pola 11: Akses Eksklusif Dan Partisipasi Yang Tidak Merata

Akses terhadap program PPM/CSR di Fidi Jaya ditentukan bukan semata-mata oleh kebutuhan, melainkan oleh posisi dalam jaringan relasi dengan aparat desa dan pengetahuan tentang mekanisme proposal. Secara formal, pengajuan harus melalui pemerintah desa sebagai perantara tunggal, namun dalam praktiknya kedekatan dengan pengambil keputusan di tingkat desa menentukan siapa yang berhasil Akibatnya, pimpinan desa, tokoh agama yang terhubung ke struktur formal, dan pelajar yang mengetahui mekanisme beasiswa lebih mudah mendapat bantuan, sementara nelayan, perempuan, dan pendatang tanpa koneksi berada di posisi paling jauh. Kondisi ini diperparah oleh sosialisasi yang tidak dirancang untuk menjangkau semua warga, sebagaimana dikonfirmasi dalam proses validasi bahwa informasi hanya turun sampai level tertentu. Pola ini menyentuh dua dimensi keadilan: keadilan prosedural, karena proses seleksi tidak transparan dan tidak dapat diakses secara setara; dan keadilan rekognisi, karena nelayan dan perempuan tidak diakui sebagai kelompok yang secara aktif berhak atas program, melainkan hanya menerima jika ada yang mengusulkan atas nama mereka.

Eksklusivitas ini terbentuk dari dua kondisi struktural yang saling menopang. Pertama, desain mekanisme proposal-via-desa memusatkan kekuasaan pada satu titik tanpa standar seleksi yang transparan atau mekanisme banding. Platteau (2004) menunjukkan bahwa kondisi ini berisiko menghasilkan situasi di mana manfaat program yang seharusnya untuk banyak pihak justru terkonsentrasi pada mereka yang sudah berada dalam posisi menguntungkan secara sosial dan kelembagaan.

Di Fidi Jaya, risiko ini diperkuat oleh sistem kekeluargaan yang kuat dalam tata kelola desa, di mana kedekatan personal dengan pimpinan menentukan siapa yang mendapat akses informasi dan manfaat

Kedua, partisipasi masyarakat secara formal tersedia namun tidak dirasakan karena komunikasi hanya sampai level desa tanpa mekanisme yang memastikan keterlibatan warga yang lebih luas. Kondisi ini sejajar dengan Pola 8 tentang kesenjangan informasi dan partisipasi dalam layanan dasar: di keduanya, informasi dan akses hanya mengalir melalui jaringan tertentu. Kepmen ESDM No. 1824/2018 mengatur bahwa penyusunan Rencana Induk PPM seharusnya melibatkan konsultasi dengan masyarakat di wilayah lingkar tambang, namun apakah proses ini benar-benar terjadi di Fidi Jaya, dalam format apa, dan siapa yang dilibatkan, merupakan pertanyaan yang temuan ini belum dapat menjawab sepenuhnya. Yang perlu digarisbawahi adalah konsekuensi jangka panjang dari kondisi ini: program PPM yang seharusnya menjadi instrumen restoratif, yaitu untuk membangun kemandirian ekonomi komunitas sebelum tambang berakhir, melalui penguatan perikanan, UMKM, pelatihan keterampilan, dan kelembagaan, tidak berfungsi optimal karena kelompok yang paling membutuhkan justru tidak terjangkau. Ketika tambang berakhir, komunitas yang tidak berhasil membangun kapasitas ekonomi alternatif selama era industri akan menghadapi kondisi yang jauh lebih sulit, dan ketimpangan yang ada sekarang akan semakin dalam.

Pola 12: Identitas PPM/CSR Yang Kabur Dan Akuntabilitas Yang Sulit Dituntut

Pola ini berkaitan dengan keterbatasan pemahaman warga tentang perbedaan antara kewajiban hukum perusahaan dalam konteks PPM dan bantuan sukarela. Program yang paling dikenali warga sebagai "bantuan dari perusahaan", sebagai contoh beasiswa pendidikan, material renovasi rumah ibadah, dan respons darurat saat banjir. Bantuan-bantuan ini memiliki satu kesamaan: bersifat visible, langsung dirasakan, dan identitas pemberinya relatif jelas.

S. Namun di Fidi Jaya, pembedaan ini tidak ada dalam pengalaman warga: mereka tidak tahu bahwa ada kewajiban bernama PPM, tidak tahu program apa yang seharusnya tersedia, dan tidak memiliki cara untuk mengevaluasi apakah kewajiban tersebut sudah dipenuhi. Kondisi ini menciptakan dua lapisan ketidakjelasan sekaligus: warga tidak bisa membedakan mana CSR sukarela dan mana PPM wajib; dan karena tidak mengetahui adanya kewajiban PPM, mereka tidak memiliki dasar untuk menuntut pemenuhannya. Pola ini menyentuh dua dimensi keadilan: keadilan prosedural, karena ketidaktahuan tentang hak atas program kewajiban hukum membatasi kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasinya; dan keadilan rekognisi, karena nelayan dan perempuan, yang kebutuhannya seharusnya tercakup dalam kategori kemandirian ekonomi dan peningkatan pendapatan dalam Rencana Induk PPM, tidak diposisikan sebagai pihak yang berhak mengetahui dan mempertanyakan pemenuhan kewajiban tersebut.

Ada dua penjelasan yang saling melengkapi. Penjelasan pertama adalah perbedaan sifat antara CSR dan PPM yang tidak dikomunikasikan kepada publik. CSR sukarela lebih visible karena perusahaan memiliki insentif untuk mengomunikasikannya sebagai bagian dari upaya membangun relasi dan legitimasi sosial. PPM sebagai kewajiban hukum tidak memiliki insentif komunikasi yang sama: pelaporannya bersifat administratif antara perusahaan dan pemerintah, tanpa ketentuan yang mewajibkan perusahaan mengomunikasikan realisasi program kepada warga terdampak (PP No. 96/2021). Akibatnya, laporan PPM bisa saja tersedia di level Dinas ESDM namun sama sekali tidak diketahui oleh warga yang seharusnya menjadi penerima manfaatnya. Penjelasan kedua adalah perubahan skala operasi yang mengubah pola komunikasi.

Pada era WBN sebelum 2018, operasi berjalan dalam skala yang lebih kecil dengan komunitas penerima yang lebih terbatas, sehingga komunikasi dari perusahaan ke desa ke warga masih dapat berjalan dengan identitas yang relatif jelas. Catatan validasi mengonfirmasi bahwa memang tidak ada pemberitahuan yang jelas kepada warga tentang sumber bantuan dan hal ini berkaitan dengan uang sehingga informasinya tidak mudah ditelusuri dari luar. Kondisi ini terhubung dengan temuan Pola 1 tentang eksklusivitas akses.

Pola 13: Ketimpangan Distribusi Antar Wilayah dan Kelompok

Pola ini berkaitan dengan bagaimana manfaat program PPM/CSR terdistribusi secara tidak merata, baik antar wilayah maupun antar kelompok dalam satu wilayah. Dari sisi geografis, warga Fidi Jaya secara konsisten membandingkan pengalaman mereka dengan wilayah Ring 1 yang lebih dekat dengan operasi tambang. Temuan terkait distribusi manfaat PPM/CSR menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah program PPM/CSR yang signifikan antara desa-desa di wilayah Ring 1 dan di wilayah Ring 3.

Perbedaan tidak akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat jika terdapat komunikasi yang jelas dari perusahaan maupun pemerintah kepada warga tentang apa yang menjadi hak mereka berdasarkan posisi geografis desa. Dari sisi kelompok, ketimpangan bekerja dengan cara yang serupa dengan yang telah dibahas di Pola 1: mereka yang memiliki akses ke jaringan sosial desa mendapat manfaat lebih besar, sementara nelayan, perempuan, dan pendatang berada di ujung yang paling jauh. Ada dua penjelasan yang saling melengkapi untuk memahami mengapa ketimpangan distribusi ini terbentuk. Penjelasan pertama adalah logika geografis dari sistem ring: secara regulasi melalui Kepmen ESDM No. 1824/2018 mengatur bahwa program PPM dirancang berdasarkan wilayah lingkar tambang, dengan prioritas yang secara aturan lebih besar pada wilayah yang lebih dekat dengan kegiatan operasional pertambangan.

Kedua, tidak adanya mekanisme evaluasi yang melibatkan komunitas membuat ketimpangan distribusi sulit dikoreksi dari dalam sistem. Tanpa umpan balik dari warga tentang apakah program sudah menjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak ada tekanan internal yang mendorong koreksi. Kondisi ini menghasilkan apa yang Frynas (2005) sebut sebagai accountability gap, yaitu kesenjangan antara komitmen formal perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi apakah komitmen itu benar-benar terlaksana. Pola ini sejajar dengan Pola 8 tentang mekanisme akses eksklusif dalam program pemerintah: di keduanya, ketidaktahuan dan absensi pelibatan masyarakat menghasilkan kondisi di mana kesetaraan prosedural tidak dapat terwujud.

Box 3: Tanpa Koreksi, Ketimpangan Distribusi PPM/CSR Akan Semakin Dalam

Kombinasi antara akses eksklusif, identitas program yang tidak jelas, dan distribusi yang tidak merata akan semakin mempersempit kelompok yang merasakan manfaat PPM/CSR. Tanpa mekanisme evaluasi yang melibatkan komunitas dan tanpa sosialisasi tentang apa yang menjadi hak warga berdasarkan kewajiban PPM perusahaan, permasalahan terkait distribusi manfaat yang tidak merata dan akses program yang masih bersifat eksklusif akan terus terjadi. Ketimpangan ini juga berpotensi memperburuk kohesi sosial yang sudah teridentifikasi dalam RQ1 dan RQ2: ketika sebagian warga melihat bantuan mengalir ke pihak-pihak tertentu sementara mereka sendiri tidak merasakan apapun, kepercayaan terhadap sistem, baik terhadap perusahaan maupun terhadap pemerintah desa, akan semakin melemah.

Implikasi dan Respon yang Diperlukan

Berikut merupakan poin-poin tindak lanjut berdasarkan pola yang teridentifikasi agar efektivitas PPM/CSR dapat terjadi di Fidi Jaya:



- **Peningkatan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan; serta peningkatan aksesibilitas program PPM/CSR**
  - Penyusunan atau konfirmasi ulang Rencana Induk PPM IWIP yang secara eksplisit mencantumkan Fidi Jaya sebagai wilayah sasaran
  - Redesain mekanisme akses program dari model proposal-via-desa yang tunggal menjadi model yang membuka jalur langsung bagi kelompok yang tidak terhubung ke jaringan aparat desa, termasuk mekanisme pendaftaran mandiri dan transpraran atau pendampingan kelompok yang tidak bergantung pada kedekatan dengan pimpinan desa
  - Penyelenggaraan forum konsultasi komunitas yang terstruktur sebelum penyusunan atau revisi program PPM
  - Pengembangan papan pengumuman atau dashboard desa untuk mempublikasikan informasi seputar PPM/CSR dan desa secara umum
  - Penguatan kapasitas pemdes Fidi Jaya dalam menjalankan peran sebagai perantara secara adil dan transparan



- **Rekognisi program PPM/CSR sebagai sebuah kewajiban perusahaan dan peningkatan akuntabilitas program**
  - Pembedaan yang jelas dan dikomunikasikan kepada warga antara CSR sukarela dan PPM sebagai kewajiban hukum
  - Penerbitan ringkasan program PPM yang dapat dipahami publik oleh IWIP setiap tahun

- **Meningkatkan distribusi program PPM/CSR yang lebih merata**
  - Penguatan program PPM yang spesifik untuk sektor-sektor lokal di dan juga menarget perempuan sebagai kelompok sasaran dalam bidang peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi
  - Program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan dan semakin dalam
  - Mekanisme evaluasi distribusi program PPM yang melibatkan perwakilan komunitas dari berbagai kelompok

RQ4: Bagaimana tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah terhadap fase pasca tambang, termasuk aspirasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pasca tambang yang adil?

Temuan pada topik terkait kesiapan pascatambang di Fidi Jaya menggambarkan **kondisi di mana manfaat ekonomi dari kehadiran tambang yang dirasakan saat ini belum diimbangi dengan persiapan yang memadai untuk menghadapi kondisi setelah tambang berakhir.** Ketidaksiapan ini tidak bersifat tunggal melainkan terbentuk dari empat pola yang saling mendukung, yakni ketergantungan ekonomi dan orientasi psikologis yang terfokus pada manfaat hari ini; absensi forum dan dokumentasi yang membuat kesadaran tentang risiko tidak berubah menjadi aksi; serta aspirasi warga tentang ekonomi alternatif yang belum bertemu dengan program yang terstruktur.

Penjelasan Pola-pola Teridentifikasi

Pola 14: Ketergantungan Ekonomi dan Psikologi Masa Kini Yang Menunda Persiapan Pascatambang

Ketergantungan terbentuk melalui dua jalur: jalur langsung melalui kenaikan pendapatan bagi mereka yang bekerja di sektor tambang, dan jalur tidak langsung melalui manfaat turunan di mana usaha jasa, perdagangan, dan hunian yang tumbuh di sekitar ekosistem tambang menciptakan pendapatan bagi kelompok yang tidak bekerja langsung di industri. Dari sisi psikologis, manfaat yang nyata dan terasa hari ini membentuk orientasi yang menempatkan skenario pascatambang sebagai sesuatu yang terasa jauh dan abstrak. Bahkan ketika kesadaran tentang risiko ada — pengalaman Pulau Gebe disebut berulang sebagai bayangan masa depan yang dikhawatirkan — kesadaran tersebut tidak serta-merta menghasilkan langkah persiapan yang konkret. Dalam kerangka keadilan distributif, ada ketidakseimbangan mendasar antara siapa yang menikmati manfaat era tambang dan siapa yang akan menanggung beban terbesar setelah tambang berakhir. Kelompok yang paling banyak menikmati manfaat boom — pelaku jasa dengan aset yang sudah terbentuk, pendatang mobile yang bisa pulang ke daerah asal, PNS dengan jaminan gaji tetap, memiliki buffer yang lebih besar untuk menghadapi kondisi pascatambang. Sebaliknya, pemuda lokal yang masuk ke pasar kerja tambang tanpa mengembangkan keterampilan alternatif, nelayan yang ekosistem lautnya terdegradasi, dan penduduk lokal tanpa lahan akan menghadapi kondisi pascatambang dari titik yang paling rentan.

Pola ini dapat dijelaskan melalui dua aspek. Pertama, **struktural-ekonomi: kehadiran industri tambang menciptakan lonjakan pendapatan yang signifikan dalam waktu singkat pada komunitas yang sebelumnya hidup dengan ekonomi subsisten berskala terbatas.**

Ketergantungan ini diperkuat oleh fakta bahwa biaya hidup sudah menyesuaikan dengan level pendapatan tambang, sehingga kembali ke ekonomi pra-tambang bukan hanya soal kehilangan pendapatan tetapi juga soal tidak mampu memenuhi kebutuhan pada harga yang berlaku saat ini. Kedua, **psikologis-kultural: orientasi pada manfaat hari ini bukan sekadar rasionalitas ekonomi jangka pendek, melainkan mencerminkan ketiadaan narasi kolektif tentang skenario pascatambang yang cukup konkret untuk mendorong aksi.** Kondisi ini berkaitan dengan konsep temporal discounting, yaitu kecenderungan manusia untuk memberikan bobot lebih rendah pada konsekuensi yang terasa jauh dibandingkan manfaat yang terasa nyata hari ini (Frederick, Loewenstein & O'Donoghue, 2002). Dalam proses validasi, delegasi peneliti mengidentifikasi bahwa peluang untuk membangun persiapan semakin sempit seiring bertambahnya jumlah pemuda yang sudah sepenuhnya masuk ke dalam ritme ekonomi tambang tanpa mengembangkan jalur penghidupan alternatif.

Pola 15: Absensi Kelembagaan dan Memori Gebe Yang Belum Menjadi Pembelajaran Kolektif

Pola ini berkaitan dengan ketiadaan forum atau kelembagaan yang membahas persiapan pascatambang secara terstruktur, dan tidak terdokumentasikannya pengalaman Pulau Gebe sebagai pembelajaran kolektif. Dari sisi kelembagaan, hingga saat penelitian berlangsung tidak ada satu pun forum formal di Fidi Jaya yang secara eksplisit membahas skenario pascatambang. Pemuda yang ingin terlibat dalam diskusi tentang masa depan desa tidak menemukan wadah yang menyambut aspirasi mereka: karang taruna belum terbentuk, dan dalam FGD pemuda muncul aspirasi agar desa menyediakan ruang untuk membahas isu lingkungan, ekonomi, dan masa depan desa. Dari sisi memori kolektif, pengalaman Pulau Gebe tersimpan dalam ingatan warga namun bersifat anekdotal: tidak terdokumentasi secara formal, tidak diterjemahkan menjadi pembelajaran terstruktur, dan tidak ada lembaga yang mewarisinya sebagai dasar perencanaan.

Kondisi ini menyentuh dua dimensi keadilan sekaligus: keadilan rekognisi, karena pengalaman komunitas yang sudah melewati pascatambang tidak diakui sebagai pengetahuan yang berharga dan layak diwariskan; dan keadilan prosedural, karena warga terutama kelompok yang paling rentan tidak dilibatkan dalam perencanaan transisi yang menentukan masa depan mereka, tidak ada informasi transparan tentang timeline operasi tambang, dan tidak ada mekanisme yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi tentang jalur transisi yang diinginkan kepada pengambil keputusan yang relevan.

Salah satu penjelasan utama dari pola ini yaitu absensi insentif untuk merencanakan pascatambang selama tambang masih beroperasi. Selama pendapatan tambang masih mengalir dan APBD masih didominasi penerimaan dari industri, tidak ada tekanan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah untuk mulai merencanakan kondisi setelah industri berakhir. Dalam literatur, kondisi ini disebut sebagai staple trap (Watkins, 1963 dalam Hayter & Barnes, 1990) dimana pada akhirnya masyarakat menjadi tidak siap ketika komoditas utama sudah tidak menghasilkan- karena tidak memilki fondasi ekonomi alternatif yang matang. Penjelasan kedua adalah tidak adanya kewajiban formal bagi perusahaan untuk mendampingi perencanaan transisi komunitas: berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, kewajiban perusahaan lebih berfokus pada rehabilitasi fisik lahan daripada pada pembangunan kapasitas komunitas untuk menghadapi kondisi pascatambang.

Penjelasan ketiga yaitu proses subordinasi yang terjadi selama periode tambang menyebabkan negara dan komunitas tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyediakan layanan dan penghidupan secara mandiri setelah perusahaan pergi. Lebih lanjut, dalam proses validasi, delegasi peneliti menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun pada era tambang dirancang dengan kacamata kepentingan industri, bukan untuk keberlanjutan komunitas, sehingga ketika industri pergi beban pemeliharaan jatuh sepenuhnya pada komunitas yang tidak pernah dipersiapkan untuk menanggungnya.

Pola 16: Aspirasi Ekonomi Alternatif Yang Belum Bertemu Program Terstruktur

Pola ini mengidentifikasi potensi yang sudah ada namun belum terhubung dengan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Warga Fidi Jaya menunjukkan pemahaman yang cukup konkret tentang jalur ekonomi alternatif yang ingin dikembangkan, seperti penguatan sektor perikanan dengan sarana tangkap dan penyimpanan yang lebih memadai, pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman tahunan, serta pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal. Namun program yang tersedia, baik dari pemerintah maupun PPM/CSR perusahaan, belum secara konsisten menjawab aspirasi tersebut: pelatihan berulang tanpa eskalasi, bantuan alat tanpa pendampingan operasional, dan tidak ada satu pun program yang secara eksplisit dirancang sebagai persiapan transisi pascatambang. Sebagaimana diuraikan dalam pola sebelumnya, kelompok yang paling membutuhkan penguatan kapasitas alternatif justru paling tidak terjangkau oleh program yang ada.

Pola ini menyentuh dua dimensi keadilan: keadilan rekognisi, karena pengetahuan dan aspirasi warga tentang jalur ekonomi alternatif tidak diakui sebagai dasar perencanaan program; dan keadilan restoratif, karena dampak lingkungan yang sudah terjadi dan tidak dapat dibalik seharusnya mendorong kewajiban untuk memastikan komunitas yang kehilangan fondasi ekologis penghidupannya mendapat dukungan membangun fondasi alternatif sebelum tambang berakhir dan sebelum kapasitas untuk melakukan itu menghilang bersama berakhirnya sumber daya yang sekarang tersedia. Hingga saat ini, tidak ada program pemerintah maupun perusahaan yang secara eksplisit berorientasi pada pembangunan kapasitas dan perencanaan transisi pascatambang.

Penjelasan pertama dari pola ini adalah fragmentasi program pemberdayaan yang sudah dibahas dalam RQ2 dan RQ3, yakni program bantuan dari pemerintah maupun perusahaan melalui CSR atau PPM masih bekerja dalam silo masing-masing tanpa koordinasi yang memastikan program-program tersebut secara bersama-sama membangun kapasitas transisi yang koheren. **Penjelasan kedua adalah orientasi program yang lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan** segera daripada antisipatif terhadap kondisi pascatambang: program yang ada dirancang untuk menjawab kondisi saat ini. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan untuk mengembangkan kapasitas yang dibutuhkan ketika sektor ekonomi utama berubah (Grabher, 1993). Namun, menurut delegasi peneliti dalam proses validasi, dana PPM seharusnya dapat menjadi peluang untuk mendukung usaha-usaha yang tidak langsung terkait tambang, seperti bengkel dan pelatihan barista yang sudah mulai tumbuh di kalangan pemuda Weda. Penjelasan ketiga terkait dengan ketidakjelasan horizon waktu terkat kapan tambang akan berakhir dan tidak adanya komunikasi antara perusahaan dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat terkait perencanaan hingga berakhirnya tambang di Fidi Jaya.

Box 4: Jika Dibiarkan: Ketika Lonjakan Ekonomi Berakhir Tanpa Persiapan

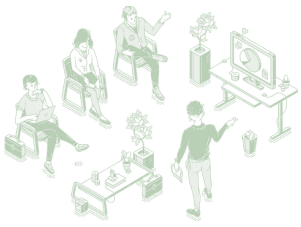
Jika pemahaman dan kesiapan pascatambang tidak dibangun selama tambang masih beroperasi, trajektori yang paling mungkin adalah penurunan ekonomi dan sosial yang tajam setelah industri berakhir, dengan intensitas yang lebih dalam dari kondisi sebelum tambang hadir. Kombinasi antara ketergantungan ekonomi yang semakin dalam, absensi program transisi, dan degradasi lingkungan yang terus berlanjut akan semakin mempersempit opsi penghidupan yang tersedia. Ketika arus pendapatan yang menopang ekosistem ekonomi desa terhenti, komunitas tanpa fondasi alternatif yang siap akan menghadapi guncangan yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan lapangan kerja.

Pengalaman Pulau Gebe memberikan gambaran paling konkret tentang apa yang dapat terjadi: proses subordinasi selama periode tambang menyebabkan negara dan komunitas kehilangan kapasitas untuk menyediakan layanan dan penghidupan secara mandiri setelah perusahaan pergi. Fidi Jaya berpotensi menghadapi kondisi yang bahkan lebih sulit dari Gebe karena tidak mendapatkan manfaat penuh dari kedekatan dengan tambang sebagai wilayah non-Ring 1, namun akan menanggung konsekuensi penuh dari berakhirnya operasi industri di seluruh Halteng, termasuk ekosistem yang sudah terdegradasi dan ketergantungan ekonomi yang sudah mengakar.

Implikasi dan Respon yang Diperlukan

Berikut merupakan poin-poin tindak lanjut berdasarkan pola yang teridentifikasi agar muncul pemahaman dan kesiapan terkait pascatambang di Fidi Jaya:

- **Meningkatkan kemandirian ekonomi dan perubahan psikologi terkait manfaat kegiatan ekstraktif pertambangan**
  - Penyelenggaraan forum desa tentang skenario pascatambang yang melibatkan seluruh kelompok warga.
  - Pengembangan program diversifikasi pendapatan yang secara eksplisit ditujukan bagi pemuda yang bekerja di sektor tambang.
  - Komunikasi yang transparan dari perusahaan dan pemerintah tentang estimasi operasi tambang hingga ditutup.



- **Membangun kelembagaan pascatambang dan pelembagaan memori Gebe**
  - Dokumentasi formal pengalaman Pulau Gebe pascatambang sebagai bahan pembelajaran yang dapat digunakan dalam forum perencanaan pascatambang.
  - Pembentukan wadah kepemudaan yang aktif ebagai ruang bagi pemuda untuk membahas isu lingkungan, ekonomi, dan masa depan desa secara terstruktur, merespons aspirasi yang muncul dalam FGD pemuda.
  - Pengembangan dokumen perencanaan transisi pascatambang di level desa yang melibatkan pemdes, warga, dan pendampingan dari Bappeda Halteng



- **Melakukan perencanaan kesiapan untuk dampak lingkungan yang tidak dapat dibalik**
  - Konfirmasi dan publikasi status rencana reklamasi dan pascatambang perusahaan tambang serta besaran dana jaminan reklamasi yang sudah disetor.
  - Perlindungan kawasan Gunung Akejira sebagai sumber air pertahanan wilayah Weda dari ekspansi konsesi tambang.
  - Program pemulihan ekosistem pesisir.



- **Mewadahi aspirasi ekonomi alternatif**
  - Redesain program PPM perusahaan tambang agar secara eksplisit memuat komponen persiapan transisi pascatambang.
  - Pembangunan infrastruktur dan kapasitas ekononomi lokal
  - Koordinasi lintas dinas ntuk mengembangkan paket program transisi yang terintegrasi, bukan program sektoral yang beroperasi sendiri-sendiri.
  - Dukungan pengembangan usaha lokal non-tambang.

Penutup

Dari perspektif keadilan distributif, temuan lintas topik utama menunjukkan satu pola yang konsisten: **mereka yang sudah berada dalam posisi menguntungkan sebelum tambang hadir,** seperti pelaku usaha dengan modal, pemilik lahan, dan aktor dengan akses ke jaringan kekuasaan formal adalah **yang paling banyak menikmati manfaat dari lonjakan aktivitas ekonomi**, layanan dasar yang membaik, maupun program PPM/CSR yang tersedia. Sebaliknya, kelompok yang menanggung beban terbesar dari kehadiran industri, yaitu nelayan yang ekosistem lautnya terdegradasi, perempuan yang biaya hidupnya meningkat tanpa dukungan produktif yang setara, pendatang tanpa status kependudukan lokal, dan pemuda yang masuk ke pasar kerja tambang tanpa mengembangkan keterampilan alternatif, justru paling tidak terjangkau oleh program yang ada. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berlaku saat ini: kelompok yang paling banyak menikmati manfaat boom memiliki buffer yang lebih besar untuk menghadapi kondisi pascatambang, sementara yang paling rentan akan menghadapinya dari titik yang paling lemah.

Dari perspektif keadilan prosedural, **kegagalan yang paling mendasar bukan pada ketiadaan mekanisme formal, melainkan pada kenyataan bahwa mekanisme yang ada tidak dapat diakses secara setara.** Di seluruh topik utama, pola yang sama berulang: informasi hanya mengalir melalui jaringan tertentu, musyawarah dan forum yang tersedia lebih berfungsi sebagai legitimasi keputusan yang sudah diambil daripada sebagai ruang partisipasi yang bermakna, dan akses ke program ditentukan oleh kedekatan dengan aparat bukan oleh hak sebagai warga yang terdampak.

Kondisi ini berarti bahwa warga yang paling membutuhkan koreksi atas ketidakadilan distributif justru paling tidak memiliki kapasitas untuk mendorongnya melalui jalur formal yang tersedia, termasuk dalam konteks perencanaan transisi pascatambang, di mana tidak ada forum terbuka, tidak ada informasi transparan tentang timeline operasi tambang, dan tidak ada mekanisme penyampaian aspirasi yang menjangkau kelompok paling rentan

Dari perspektif keadilan rekognisi, temuan menunjukkan **dua lapis pengabaian yang saling memperkuat.** Lapis pertama adalah tidak diakuinya kebutuhan dan identitas kelompok tertentu dalam desain program: cara hidup komunitas yang bertumpu pada relasi dengan alam, nilai fagogoru sebagai sistem tata kelola lokal, kebutuhan spesifik perempuan nelayan, dan pengetahuan lokal tentang jalur ekonomi alternatif tidak diposisikan sebagai dasar yang sah untuk merancang intervensi. Lapis kedua adalah tidak diakuinya kelompok rentan sebagai subjek yang berhak atas program secara setara: nelayan, perempuan, dan pendatang tidak diakui sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, melainkan hanya sebagai penerima pasif jika ada yang mengusulkan atas nama mereka.

Dari perspektif keadilan restoratif, **pertanyaan yang paling mendesak adalah tentang pertanggungjawaban atas kerusakan yang sudah terjadi** dan yang masih akan terjadi. Degradasi ekosistem rawa, penurunan kualitas air, erosi modal sosial komunitas, dan hilangnya fondasi penghidupan nelayan adalah dampak nyata yang belum ditangani secara sistematis oleh program apapun, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Program PPM seharusnya dapat menjadi instrumen restoratif yang membangun kembali kapasitas penghidupan yang terdampak, namun hal ini mensyaratkan desain program yang bertolak dari pemahaman tentang siapa yang terdampak dan dalam hal apa, sebuah prasyarat yang tidak terpenuhi selama mekanisme partisipasi belum berjalan inklusif.

Yang paling kritis dalam dimensi ini adalah dimensi waktunya: seiring berjalannya operasi tambang, kapasitas untuk melakukan pemulihan semakin sempit, dan jika jendela waktu ini tidak dimanfaatkan, generasi setelah tambang berakhir akan mewarisi ekosistem yang terdegradasi, komunitas yang kehilangan perekat sosialnya, dan sistem layanan yang tidak dirancang untuk bertahan tanpa penerimaan dari industri.

Penjelasan pola-pola di atas menunjukkan bahwa dampak dari kehadiran industri tambang di Fidi Jaya tidak dirasakan secara seragam, baik dalam hal manfaat yang diterima maupun risiko yang ditanggung ketika kondisi berubah.

Posisi setiap kelompok ditentukan oleh kombinasi dari modal yang dimiliki, akses ke jaringan sosial dan kelembagaan, serta tingkat ketergantungan pada ekosistem ekonomi yang terbentuk di sekitar tambang. Tabel berikut merangkum posisi masing-masing kelompok berdasarkan temuan lintas pertanyaan penelitian dilihat dari tingkat manfaat dan kerentanannya dalam menghadapi perubahan.

Tabel 7. Distribusi manfaat dan kerentanan berdasarkan kelompok di desa Fidi Jaya

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Pimpinan desa dan tokoh agama	Manfaat utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan
Pelaku usaha jasa dan kos – dengan modal dan aset	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan	Manfaat rentan
Pedagang dan pemilik modal – pendatang berakar dengan aset	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan	Stabil
Institusi keagamaan	Tidak relevan	Stabil	Manfaat utama	Tidak relevan
Perusahaan tambang dan kontraktor utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Stabil

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Pimpinan desa dan tokoh agama	Manfaat utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan
Pelaku usaha jasa dan kos – dengan modal dan aset	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan	Manfaat rentan
Pedagang dan pemilik modal – pendatang berakar dengan aset	Manfaat utama	Manfaat utama	Tidak relevan	Stabil
Institusi keagamaan	Tidak relevan	Stabil	Manfaat utama	Tidak relevan
Perusahaan tambang dan kontraktor utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Manfaat utama	Stabil
Petani lokal dengan lahan (tanaman tahunan, seperti pala dan cengkeh)	Stabil	Prioritas	Tidak relevan	Stabil
Pendatang mobile (tanpa aset dan bisa pulang)	Stabil	Prioritas	Prioritas	Stabil
Pemuda pekerja tambang (berkelompok atau terorganisasi) – umumnya laki-laki	Manfaat rentan	Stabil	Tidak relevan	Manfaat rentan
Pelajar dengan koneksi ke jaringan beasiswa dan desa	Tidak relevan	Stabil	Manfaat utama	Manfaat rentan

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Pemuda perempuan lokal				
Nelayan perempuan non-kelompok	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Nelayan laki-laki non-kelompok	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Nelayan laki-laki berkelompok	Stabil	Stabil	Manfaat Rentan	Prioritas
Nelayan perempuan berkelompok	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Perempuan pra-sejahtera tanpa aset dan jaringa	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Perempuan dengan usaha kecil	Manfaat rentan	Prioritas	Prioritas	Manfaat rentan
Pemuda lokal tanpa keterampilan alternatif	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Pendatang tanpa aset dan tanpa jaringan lokal	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Stabil

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Penduduk lokal tanpa lahan (tidak bisa kembali ke pertanian)	Prioritas	Prioritas	Tidak relevan	Prioritas
Penyandang disabilitas dan lansi tanpa pendamping	Prioritas	Prioritas	Tidak relevan	Prioritas
Guru dan tenaga kesehatan lokal	Stabil	Manfaat rentan	Tidak relevan	Manfaat rentan
Aparat desa dengan beban kerja meningkat	Manfaat rentan	Manfaat rentan	Manfaat utama	Manfaat rentan
Aparat keamanan level desa (Babinsa, Bhabinkamtibmas)	Manfaat rentan	Tidak relevan	Tidak relevan	Manfaat rentan
Pekerja informal (seperti ojek dan supir truk)	Manfaat rentan	Prioritas	Prioritas	Prioritas

Catatan: "Tidak relevan" menujukkan bahwa topik-topik utama tidak secara langsung memengaruhi posisi kelompok dalam konteks pertanyaan penelitian yang bersangkutan. Posisi dalam tabel menceritakan kondisi saat tambang beroperasi, kecual topik terkait pemahaman dan kesiapan pascatambang yang mencermintan kerentanan dari topik ini.

Penjelasan terminologi kelompok tingkat penerimaan manfaat dan kerentanan	
Penerima manfaat utama **(Manfaat Utama)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi tinggi dari aktivitas industri namun risiko rendah dalam** menghadapi perubahan karena kapasitas dan sumberdaya yang tinggi.
Relatif stabil **(Stabil)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi relatif terbatas** dari aktivitas industri, namun memiliki b**siko yang rendah** dalam menghadapi perubahan karena sumber penghidupannya **tidak bergantung secara langsung** pada aktivitas industri.
Penerima Manfaat yang Rentan **(Manfaat Rentan)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi yang tinggi** dari aktivitas industri, namun memiliki **risiko yang tinggi** dalam menghadapi perubahan karena **tingkat ketergantungan tinggi** terhadap aktivitas industri.
Kelompok prioritas **(Prioritas)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi yang terbatas atau dirugikan** dari aktivitas industri, sekaligus memiliki **risiko yang tinggi dalam menghadapi perubahan** karena **kapasitas dan sumber daya yang rendah.**

Penguatan keadilan di tingkat desa tidak dapat bertumpu pada satu aktor saja, pola-pola pada semua topik utama secara konsisten menunjukkan bahwa kondisi yang ada merupakan hasil dari interaksi antara perusahaan tambang, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat lokal, di mana masing-masing aktor memiliki kewenangan, kapasitas, dan insentif yang berbeda dan kadang saling bertentangan. Tanpa koordinasi yang disengaja antar level dan antar sektor, intervensi yang dilakukan satu aktor akan terus dinetralkan oleh keterbatasan atau kepentingan aktor lainnya. Tabel berikut merangkum peran dan posisi setiap aktor kunci berdasarkan temuan lintas pertanyaan penelitian.

Tabel 8. Aktor kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih adil di Fidi Jaya

Aktor Kunci	Peran
Perusahaan tambang	Sebagai pemicu utama seluruh perubahan di Fidi Jaya, perusahaan tambang memegang posisi struktural yang paling dominan: keputusan rekrutmen, pengelolaan lingkungan, dan mekanisme pengaduan secara langsung menentukan bagaimana manfaat dan beban terdistribusi di komunitas. Perusahaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tekanan pada sistem layanan dasar, namun paling tidak menanggung konsekuensinya secara langsung — biaya sosial dan lingkungan dari pertumbuhan yang ditimbulkan ditanggung terutama oleh komunitas di level desa. Terkait PPM, perusahaan memiliki kewajiban hukum menyusun Rencana Induk PPM, namun CSR sukarela yang lebih visible justru lebih dikenal warga dibanding PPM yang bersifat wajib. Dalam konteks pascatambang, perusahaan adalah satu-satunya aktor yang memiliki informasi paling akurat tentang horizon waktu operasi, namun hingga saat ini belum ada kewajiban formal untuk mendampingi persiapan transisi komunitas.

Aktor Kunci	Peran
Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan regulatif yang menentukan kerangka kerja di mana seluruh pola yang diidentifikasi dalam penelitian ini berlangsung. Dalam pengawasan dampak lingkungan, posisi tawar Provinsi terbatas karena status IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional. Secara fiskal, Provinsi juga diuntungkan dari penerimaan tambang sehingga ada konflik kepentingan struktural dalam mendorong pertanggungjawaban atas eksternalitas negatif industri. Yang paling kritis adalah kewajiban Gubernur untuk menyusun Cetak Biru PPM sebagai kerangka acuan Rencana Induk PPM perusahaan — jika Cetak Biru ini belum tersedia, seluruh program PPM IWIP berjalan tanpa acuan daerah yang memastikan menjangkau wilayah terdampak seperti Fidi Jaya. Dalam konteks pascatambang, belum ada strategi diversifikasi ekonomi daerah yang mengantisipasi berakhirnya industri tambang.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	Pemerintah Kabupaten Halteng memegang kewenangan yang paling langsung memengaruhi kondisi di Fidi Jaya: alokasi anggaran infrastruktur, desain dan distribusi program bantuan, pengawasan AMDAL, penertiban harga, dan penyediaan forum partisipasi yang inklusif. Namun kondisi ini kontradiktif — Kabupaten adalah pihak yang paling diuntungkan secara fiskal dari keberadaan tambang melalui penerimaan pajak dan royalti yang mendominasi APBD, sekaligus pihak yang seharusnya mengawasi dampak negatifnya. Respons terhadap tekanan infrastruktur dan layanan dasar lebih bersifat reaktif daripada antisipatif. Dalam konteks PPM, Kabupaten berperan sebagai pengawas implementasi dan penerima laporan realisasi, namun belum ada mekanisme evaluasi distribusi yang melibatkan komunitas secara langsung. Ketergantungan fiskal yang tinggi juga menciptakan insentif yang kecil untuk memulai perencanaan transisi pascatambang secara dini.
Pemerintah Desa Fidi Jaya	Pemerintah Desa berada dalam posisi yang paradoksal: paling dekat dengan warga dan paling memahami konteks lokal, namun memiliki kapasitas institusional paling terbatas untuk merespons kompleksitas yang dihadapinya. Pemdes yang sebelumnya mengelola desa kecil dengan populasi homogen kini menghadapi lebih dari 17.000 jiwa yang sangat heterogen tanpa penambahan kapasitas yang memadai. Secara formal ia adalah pelayan publik, namun dalam praktiknya berfungsi sebagai gatekeeper tunggal dalam distribusi informasi dan akses program — baik program pemerintah maupun PPM perusahaan — sehingga sistem kekeluargaan yang kuat dalam tata kelola memengaruhi siapa yang mendapat akses. Kondisi ini menciptakan beban kerja yang meningkat drastis tanpa dukungan kapasitas yang memadai dari level di atasnya. Dalam konteks pascatambang, Pemdes adalah aktor yang paling memahami aspirasi lokal namun kapasitasnya paling terbatas untuk memulai perencanaan transisi secara mandiri.

Aktor Kunci	Peran
Pendatang	Pendatang berfungsi sebagai aktor kolektif yang transformasinya bersifat kumulatif dan tidak terencana: kehadiran mereka dalam jumlah besar mengaktifkan boom cycle ekonomi melalui permintaan jasa dan hunian, namun sekaligus mempercepat erosi kohesi sosial dan mengubah komposisi desa secara mendasar. Pendatang bukan kelompok yang homogen — sebagian datang dengan modal dan mengambil posisi menguntungkan dalam rantai ekonomi baru, sementara pendatang tanpa aset dan jaringan lokal justru masuk ke dalam kelompok yang paling rentan: tidak memiliki KTP lokal sehingga tidak dapat akses layanan dasar gratis, tidak terhubung ke mekanisme proposal desa sehingga tidak terjangkau PPM/CSR, dan menanggung beban sosial urbanisasi tanpa perlindungan formal. Dalam konteks pascatambang, pendatang mobile memiliki buffer berupa opsi untuk pulang ke daerah asal, sementara pendatang yang sudah berakar dengan aset lebih stabil namun tetap bergantung pada keberlangsungan ekosistem ekonomi yang terbentuk di sekitar tambang.
Masyarakat lokal	Masyarakat lokal Fidi Jaya bukan aktor pasif — temuan menunjukkan adanya inisiatif mandiri seperti sweeping yang dilakukan ibu-ibu, aspirasi pemuda untuk terlibat dalam perencanaan desa, dan petani yang terus mengajukan usulan meskipun tidak pernah direspons. Namun kapasitas untuk mengubah sistem sangat terbatas karena tidak ada akses ke informasi, tidak ada relasi ke pengambil keputusan, dan tidak ada forum yang mengakui suara mereka sebagai suara yang sah. Kelompok yang paling menanggung beban — nelayan perempuan non-kelompok, warga kawasan bekas rawa, pemuda lokal tanpa keterampilan alternatif, dan penduduk tanpa lahan — justru paling tidak terjangkau oleh program yang dirancang untuk merespons kondisi mereka. Dalam konteks pascatambang, pemuda menunjukkan kesadaran yang paling reflektif tentang risiko, namun tidak menemukan wadah untuk menyalurkan kesadaran tersebut menjadi aksi kolektif. Kelompok tanpa aset dan keterampilan alternatif akan menghadapi kondisi pascatambang dari titik yang paling rentan.
Lembaga sektoral	Lembaga sektoral — termasuk Disnaker, DP3A, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian — berperan sebagai penyedia program pemberdayaan yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi kelompok rentan. Namun temuan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini bekerja dalam silo masing-masing tanpa koordinasi yang memastikan program secara bersama-sama membangun kapasitas yang koheren. Program pelatihan cenderung berulang tanpa eskalasi, dan tidak ada satu pun lembaga yang bertanggung jawab atas celah antar program yang paling banyak ditinggali oleh kelompok paling rentan. Dalam konteks PPM, lembaga sektoral berpotensi menjadi mitra sinergi yang signifikan namun belum ada koordinasi formal antara program PPM perusahaan dengan program dinas terkait. Dalam konteks pascatambang, lembaga sektoral adalah aktor kunci untuk program transisi terintegrasi — namun hingga saat ini belum ada program yang secara eksplisit berorientasi pada persiapan dan perencanaan transisi pascatambang.

Daftar Pustaka

Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). Building state capability: Evidence, analysis, action. Oxford University Press.

Arsel, M., Adaman, F., & Saad-Filho, A. (2021). Revisiting the frontiers of political economy: Development, extraction, and justice. Journal of Peasant Studies, 49(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069495

Arsel, M., Pellegrini, L., & Mena, C.F. (2019). María's farmers and the oil companies. Journal of Political Ecology, 26(1). https://doi.org/10.2458/v26i1.23228

Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Routledge.

Bryceson, D. F., & MacKinnon, D. (2012). Eureka and beyond: Mining's impact on African urbanisation. Journal of Contemporary African Studies, 30(4), 513–537. https://doi.org/10.1080/02589001.2012.719376

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.

Frederick, S., Loewenstein, G., & O'Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A critical review. Journal of Economic Literature, 40(2), 351–401. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/002205102320161311

Freudenburg, W. R. (1984). Boomtown's youth: The differential impacts of rapid community growth on adolescents and adults. American Sociological Review, 49(5), 697–705. https://doi.org/10.2307/2095474

Freudenburg, W. R. (1992). Addictive economies: Extractive industries and the vulnerable places. Rural Sociology, 57(3), 305–332. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1992.tb00467.x

Frynas, J. G. (2005). The false developmental promise of corporate social responsibility: Evidence from multinational oil companies. International Affairs, 81(3), 581–598. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00470.x

Grabher, G. (1993). The weakness of strong ties: The lock-in of regional development in the Ruhr area. Dalam G. Grabher (Ed.), The embedded firm: On the socioeconomics of industrial networks (hal. 255–277). Routledge.

Hayter, R., & Barnes, T. J. (1990). Innis' staple theory, exports, and recession: British Columbia, 1981–86. Economic Geography, 66(2), 156–173. https://doi.org/10.2307/143814

Jacquet, J. (2014). Review of risks to communities from shale energy development. Environmental Science & Technology, 48(15), 8321–8333. https://doi.org/10.1021/es404647x

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Keputusan%20Menteri%20ESDM%20Nomor%201824%20K%2030%20MEM%202018.pdf

Li, T. M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke University Press.

McCauley, D., & Heffron, R. (2018). Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice. Energy Policy, 119, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.014

McGoey, L. (2012). The logic of strategic ignorance. British Journal of Sociology, 63(3), 533–576. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01424.x

Moretti, E. (2010). Local multipliers. American Economic Review, 100(2), 373–377. https://doi.org/10.1257/aer.100.2.373

Nirmala, R. (2024, 12 September). Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat air dan deforestasi ulah oligarki nikel. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021

Platteau, J. P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. Development and Change, 35(2), 223–246. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2004.00350.x

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020

Shennum, K., & Lakhdhir, L. (2025, Juni). Ongoing harms, limited accountability: Climate, environmental, and human rights violations in the Indonesian nickel industry. Climate Rights International. https://cri.org/reports/ongoing-harms-limited-accountability/